



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2020



**PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, KEARSIPAN
DAN PERPUSTAKAAN
2021**

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dinas Komunikasi Informatika Kearsipan dan Perpustakaan Kota Cimahi adalah dinas tipe A yang menangani 5 (lima) urusan meliputi urusan Komunikasi dan Informatika, urusan Persandian, urusan Statistik, urusan Kearsipan dan urusan Perpustakaan. Dinas Komunikasi Informatika Kearsipan dan Perpustakaan Kota Cimahi terbentuk pada tahun 2017 berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2016 Nomor 207) sebagai pelaksanaan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Pelaksanaan fungsi dan tugas pokok Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan dan Perpustakaan Kota Cimahi berdasarkan Rencana Strategis Dinas Komunikasi Informatika Kearsipan dan Perpustakaan Kota Cimahi Tahun 2017-2022, yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cimahi Tahun 2017-2022.

Pada akhir tahun 2021, Sumber Daya Manusia yang dimiliki Dinas Komunikasi Informatika Kearsipan dan Perpustakaan Kota Cimahi sebanyak 60 orang pegawai terdiri atas 40 orang ASN, 3 orang Tenaga Ahli dan 17 orang THL. Dinamika kepegawaian yang terjadi pada tahun 2021 yaitu terdapat pergantian pejabat pada pertengahan tahun 2021 sebanyak 6 (enam) orang yaitu pada jabatan sekretaris, 3 (tiga) jabatan pada Bidang Kearsipan dan 2 (dua) jabatan pada Bidang Perpustakaan; pengurangan pegawai karena promosi di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebanyak 1 (satu) orang; serta terdapat 2 (dua) orang pegawai yang meninggal dunia yaitu 1 (satu) orang ASN karena menderita penyakit jantung dan 1 (satu) orang pegawai THL setelah melaksanakan vaksin yang ke-2. Tahun 2021 masih merupakan tahun pandemic covid-19. Hampir seluruh pegawai dan keluarganya mengalami terserang virus covid-19 secara bergantian dan serempak selama kurun waktu bulan Maret – Agustus 2021. Pada masa tersebut, sistem kerja dilaksanakan secara kombinasi WFO dan WFH terutama untuk pegawai non struktural, dan dengan batasan jumlah kehadiran

pegawai di kantor sebanyak 5%. Prosentase pegawai yang melaksanakan tugas secara WFO/WFH berubah-ubah sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi pandemic covid-19. Bahkan pada bulan Juli-Agustus 2021 hampir seluruh pegawai diperintahkan untuk WFH karena terjadi puncak pandemic. Namun kemudian secara bertahap situasi kerja kembali normal sampai dengan akhir tahun 2021. Protocol kesehatan covid-19 diterapkan dengan ketat selama tahun 2021.

Situasi dan kondisi kinerja Dinas Komunikasi Informatika Kearsipan dan Perpustakaan Kota Cimahi pada tahun 2021 sangat dipengaruhi oleh situasi nasional bencana Covid-19. Target-target kinerja dan jadwal kegiatan yang telah ditetapkan pada awal tahun 2021, dilakukan perubahan-perubahan mengikuti perkembangan situasi dan kondisi nasional pandemic Covid-19. Perubahan anggaran parsial dilaksanakan sebanyak 8 (delapan) kali sampai dengan masa penetapan APBD Perubahan Kota Cimahi Tahun 2021.

Ditinjau dari besarnya, nilai anggaran Dinas Komunikasi Informatika Kearsipan dan Perpustakaan Kota Cimahi pada tahun 2021 sebesar Rp.18.980.171.637 lebih besar daripada tahun 2020 sebesar Rp. 12.309.924.171. Peningkatan terjadi karena adanya bantuan Keuangan dari Provinsi Jawa Barat untuk pembangunan Command Center sebesar Rp.5.000.000,00.

Terdapat perubahan nomenklatur program dan kegiatan pada tahun 2021 sebagai tindaklanjut dari penerapan Permendagri nomor 90 Tahun 2020 dan kepmendagri nomor 56 tahun 2020. Namun demikian substansi dari urusan hamper sama kecuali Program Perlindungan dan Peyelamatan Arsip dan Program Perizinan Penggunaan Arsip.

Kondisi pandemi covid-19 berdampak pada tingkat penggunaan internet yang sangat tinggi disebabkan karena pertemuan/ rapat dan koordinasi dilaksanakan secara daring dan pelaksanaan WFH. Oleh karena itu, jenis layanan yang baru pada Bidang Penyelenggaraan e-Government dan Persandian adalah memfasilitasi rapat pimpinan baik internal Pemerintah Kota Cimahi maupun koordinasi dengan gubernur, kementerian Presiden dan Satgas Covid-19 melalui daring.

Kota pintar (*smart city*) merupakan upaya-upaya inovatif yang dilakukan ekosistem kota dalam mengatasi berbagai persoalan dan meningkatkan kualitas hidup manusia dan komunitas setempat. Kota Cimahi mengikuti Gerakan Menuju 100 Smart City sejak tahun 2018 sebagai dukungan kepada Pemerintah untuk mewujudkan Negara yang mensejahterakan rakyatnya dengan cara yang *smart*.

Berupaya konsisten dengan gerakan *smart city*, Kota Cimahi secara bertahap juga memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan tujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Selain itu penggunaan teknologi informasi dalam pemerintahan memang sudah menjadi tuntutan jaman, sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari.

Pembangunan *Command Center* oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat secara bertahap di seluruh kota/kabupaten Jawa Barat. Kota Cimahi mendapatkan kesempatan bantaun keuangan untuk Pembangunan *Command Center* pada tahun 2020, namun karena pandemi pembangunannya diwujudkan pada tahun 2021. Diharapkan, penyediaan *command center* (CC) selain untuk membantu kinerja pemerintah, juga harus dapat menghadirkan kemudahan bagi masyarakat. Kemudahan itu antara lain dalam bentuk penyediaan informasi yang lengkap dan akurat yang dibutuhkan masyarakat. iPenggunaan CC harus dioptimalkan untuk pengelolaan pemerintahan berbasis elektronik dan juga untuk meningkatkan sinkronisasi data.

Pelayanan informasi publik sebagai amanat Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, diberikan kepada masyarakat baik tatap muka maupun secara elektronik. Informasi setiap saat Kota Cimahi disajikan melalui website cimahikota.go.id. Layanan pengaduan masyarakat dapat disampaikan melalui sms atau pesan singkat penduduk ke

nomor telepon genggam 0812-2170-0800 maupun melalui Lapor SP4N ataupun email ataupun melalui layanan tatap muka.

Perpustakaan sebagai sumber ilmu pengetahuan disediakan kepada masyarakat sebagai amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. Keterbatasan kapasitas ruang Perpustakaan Umum Kota Cimahi diatasi melalui layanan e-Library. Dalam kondisi pandemic e-Library menjadi andalan layanan perpustakaan Kota Cimahi karena sistem pelayanan perpustakaan umum menggunakan sistem layanan tertutup dan jumlah pengunjung sangat dibatasi. Perpustakaan Umum Kota Cimahi berfungsi juga sebagai perpustakaan induk bagi seluruh perpustakaan di Kota Cimahi berkewajiban melakukan pembinaan kepada perpustakaan dan pengelola perpustakaan di seluruh wilayah Kota Cimahi.

Arsip didefinisikan sebagai rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Arsip dapat berupa segala kertas, berkas, naskah, foto, film, mikro film, rekaman suara, gambar peta, bagan atau dokumen lain dalam segala macam bentuk dan sifatnya atau salinan serta dengan segala cara penciptaanya, dan yang dihasilkan atau diterima oleh suatu badan, sebagai bukti dari tujuan organisasi, fungsi-fungsi kebijakan. Penyelenggaraan kearsipan bertujuan untuk menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah. Secara umum, pengelolaan arsip di Kota Cimahi belum dilaksanakan sesuai dengan standard. Oleh karena itu pembinaan dan pendampingan kepada seluruh Perangkat Daerah menjadi tugas utama Lembaga Kearsipan Daerah Kota Cimahi.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan dan Perpustakaan Kota Cimahi Tahun 2021 dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan dan Perpustakaan Kota Cimahi merupakan perwujudan bentuk akuntabilitas sebagai unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang diamanatkan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk lebih meningkatkan kinerja yang berorientasi pada hasil, baik berupa output maupun *outcomes* di masa mendatang.

Laporan Kinerja ini sekaligus merupakan laporan kinerja terakhir Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan dan Perpustakaan Kota Cimahi karena selanjutnya dipecah menjadi Dinas Komunikasi dan Informatika, dan Dinas Arsip Daerah sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016. Meski demikian, hasil evaluasi dalam laporan ini menjadi bahan bagi peningkatan kinerja urusan Komunikasi dan Informatika, Urusan Statistik, Urusan Persandian, Urusan Kearsipan dan Urusan Perpustakaan yang menjadi tugas pokok dan tanggung jawab Dinas Komunikasi dan Informatika, dan Dinas Arsip Daerah selanjutnya.

Terimakasih kami haturkan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan dan Perpustakaan Kota Cimahi Tahun 2021.

Cimahi, 2021

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA, KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KOTA CIMAHI**



MOCHAMAD RONNY

Pembina Utama Muda

NIP. 19691015 199003 1 011

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF.....	ii
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
I.1. Latar Belakang.....	1
I.2. Dasar Hukum.....	3
I.3. Isu Strategis.....	3
I.4. Uraian Singkat Organisasi.....	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	10
II.1. Indikator Kinerja Utama (IKU).....	10
II.2. Perjanjian Kinerja (PK).....	11
II.2.1. Perjanjian Kinerja Eselon II.....	12
II.2.2. Perjanjian Kinerja Eselon III dan Eselon IV.....	12
1. Urusan Perpustakaan.....	12
2. Urusan Kearsipan.....	13
3. Urusan Komunikasi dan Informatika.....	15
4. Urusan Persandian.....	18
5. Urusan Statistik.....	19
6. Sekretariat.....	20
II.3. Program/Kegiatan dan Anggaran Yang Mendukung Perjanjian Kinerja dengan Penjelasan.....	23
BAB III PENGUKURAN KINERJA.....	27
III.1. Capaian Kinerja Organisasi.....	27
III.1.1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.....	28
1. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU).....	28
2. Capaian Indikator Kinerja Tingkat Hasil (outcome) dan Keluaran (output).....	29
III.1.2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja	

tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.....	78
III.1.3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.....	80
III.1.4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional.....	82
III.1.5. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.....	82
1. Urusan Persandian.....	82
2. Urusan Komunikasi dan Informatika.....	84
3. Urusan Statistik.....	86
4. Urusan Perpustakaan.....	88
5. Urusan Kearsipan.....	90
6. Urusan Penunjang Pemerintahan.....	92
III.1.6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	94
III.1.7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.....	95
III.2. Realisasi Anggaran.....	96
BAB IV PENUTUP.....	104

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Aparatur Sipil Negara Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan dan perpustakaan Kota Cimahi, Berdasarkan Jabatan Struktural pada Tahun 2021.....	8
Tabel 1.2	Jumlah Aparatur Sipil Negara Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan dan perpustakaan Kota Cimahi, berdasarkan Pendidikan pada tahun 2021.....	8
Tabel 1.3	Jumlah Tenaga Non ASN Dinas Komunikasi Informatika Kearsipan dan Perpustakaan Kota Cimahi Tahun 2021.....	9
Tabel 2.1	Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan dan Perpustakaan Kota Cimahi.....	11
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Komunikasi Informatika Kearsipan Dan Perpustakaan Kota Cimahi Tahun 2021.....	12
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Bidang Perpustakaan, Dinas Komunikasi Informatika Kearsipan Dan Perpustakaan Tahun 2021.....	12
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja Perubahan Kasi Pengadaan & Pengolahan Perpustakaan, Dinas Komunikasi Informatika Kearsipan Dan Perpustakaan Kota Cimahi Tahun 2021.....	13
Tabel 2.5	Perjanjian Kinerja Perubahan Kasi Layanan dan Promosi Perpustakaan Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan Dan Perpustakaan Kota Cimahi Tahun 2021.....	13
Tabel 2.6	Perjanjian kinerja perubahan kepala bidang kearsipan dinas komunikasi, informatika, kearsipan dan perpustakaan tahun 2021.	14
Tabel 2.7	Perjanjian Kinerja Perubahan Kasi Pengelolaan Kearsipan, Dinas Komunikasi Informatika Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2021	15
Tabel 2.8	Perjanjian Kinerja Perubahan Kasi Layanan Dan Promosi Kearsipan Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan Dan Perpustakaan Tahun 2021.....	15
Tabel 2.9	Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik Dan Statistik Dinas Komunikasi Informatika Kearsipan Dan Perpustakaan Tahun 2021.....	16
Tabel 2.10	Perjanjian Kinerja Perubahan Kasi Publikasi Dan Dokumentasi Dinas Komunikasi Informatika Kearsipan Dan Perpustakaan Tahun 2021.....	16
Tabel 2.11	Perjanjian Kinerja Perubahan Kasi Pelayanan Informasi Dinas Komunikasi Informatika Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2021	16
Tabel 2.12	Perjanjian Kinerja Perubahan Kasi Data Dan Statistik Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan Dan Perpustakaan Tahun 2021.....	17
Tabel 2.13	Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Bidang Penyelenggaraan E-Government Dan Persandian Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan Dan Perpustakaan Tahun 2021.....	17
Tabel 2.14	Perjanjian Kinerja Perubahan Kasi Pengelolaan Infrastruktur Dan	

	Teknologi Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2021.....	18
Tabel 2.15	Perjanjian Kinerja Perubahan Kasi Pengembangan Aplikasi Dan Layanan Teknologi Informasi Dan Komunikasi, Dinas Komunikasi Informatika Kearsipan Dan Perpustakaan Tahun 2021.....	18
Tabel 2.16	Perjanjian Kinerja Perubahan Kasi Persandian Dan Pengembangan Sumber Daya Telematika Dinas Komunikasi Informatika Kearsipan Dan Perpustakaan Tahun 2021.....	19
Tabel 2.17	Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik Dan Statistik Dinas Komunikasi Informatika Kearsipan Dan Perpustakaan Tahun 2021.....	20
Tabel 2.18	Perjanjian Kinerja Perubahan Kasi Data Dan Statistik Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan Dan Perpustakaan Tahun 2021.....	20
Tabel 2.19	Perjanjian Kinerja Perubahan Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2021.....	21
Tabel 2.20	Perjanjian Kinerja Perubahan Kasubag Program Dan Pelaporan Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan Dan Perpustakaan Tahun 2021.....	21
Tabel 2.21	Perjanjian Kinerja Perubahan Kasubag Program Dan Pelaporan Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan Dan Perpustakaan Tahun 2021.....	22
Tabel 2.22	Perjanjian Kinerja Perubahan Kasubag Umum Dan Kepegawaian Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan Dan Perpustakaan Tahun 2021.....	22
Tabel 2.23	Pagu anggaran Dinas Komunikasi Informatika Kearsipan Dan Perpustakaan Kota Cimahi tahun anggaran 2021.....	24
Tabel 3.1	Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan dan Perpustakaan Kota Cimahi Tahun 2021.....	28
Tabel 3.2	Capaian Indikator Kinerja Hail dan Keluaran Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2021.....	29
Tabel 3.3	Pencapaian Target Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan Dan Perpustakaan Urusan Persandian Tahun 2021.....	34
Tabel 3.4	Pencapaian Target Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan Dan Perpustakaan Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2021.....	38
Tabel 3.5	Banyaknya Analisis Berita di Kota Cimahi Tahun 2021.....	46
Tabel 3.6	Permintaan Layanan Informasi dan Pengaduan Yang Ditindaklanjuti Tahun 2021.....	47
Tabel 3.7	Rekapitulasi Bulanan Publikasi Tahun 2021.....	49
Tabel 3.8	Rincian Berita Pada Website Dan Media Lainnya Tahun 2021.....	49
Tabel 3.9	Pencapaian Target Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan Dan Perpustakaan Urusan Statistik.....	50
Tabel 3.10	Survei Statistik Sektoral yang dilaksanakan selama tahun 2021....	51
Tabel 3.11	Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	

	Kota Cimahi Tahun 2021.....	54
Tabel 3.12	Banyaknya Pengunjung (Pemustaka) Perpustakaan Umum Kota Cimahi Tahun 2021.....	56
Tabel 3.13	Peningkatan Pemustaka Perpustakaan Umum Kota Cimahi Tahun 2017-2021.....	56
Tabel 3.14	Pengadaan e-book Perpustakaan Umum Daerah Kota Cimahi Tahun 2021.....	57
Tabel 3.15	Rekapitulasi Penerimaan Piagam CRH Online Tahun 2021.....	62
Tabel 3.16	Pemenang Lomba Bercerita Kota Cimahi Tingkat Sekolah Dasar Kota Cimahi Tahun 2021.....	64
Tabel 3.17	Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan, Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan dan Perpustakaan Kota Cimahi Tahun 2021.....	68
Tabel 3.18	Peringkat dan Kategori Hasil Audit Kearsipan Internal di Lingkup Pemerintah Kota Cimahi Tahun 2021.....	71
Tabel 3.19	Pencapaian Target Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan Dan Perpustakaan Urusan Pendukung Pemerintahan	76
Tabel 3.20	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama (impact) Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan dan Perpustakaan Kota Cimahi, Tahun 2020 dan 2021.....	78
Tabel 3.21	Perbandingan Realisasi Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan dan Perpustakaan Kota Cimahi Tahun 2021 dengan Target Kinerja pada Perubahan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan dan Perpustakaan Kota Cimahi Tahun 2018-2022.....	80
Tabel 3.22	Analisa Keberhasilan dan Kegagalan Urusan Persandian Dalam Proses Pencapaian Kinerja Organisasi Tahun 2021.....	82
Tabel 3.23	Analisa Keberhasilan dan Kegagalan Urusan Komunikasi dan Informatika, Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dalam Proses Pencapaian Kinerja Organisasi Tahun 2021.....	84
Tabel 3.24	Analisa Keberhasilan dan Kegagalan Urusan Statistik Dalam Proses Pencapaian Kinerja Organisasi Tahun 2021.....	86
Tabel 3.25	Analisa Keberhasilan dan Kegagalan Urusan Perpustakaan Dalam Proses Pencapaian Kinerja Organisasi Tahun 2021.....	88
Tabel 3.26	Analisa Keberhasilan dan Kegagalan Urusan Kearsipan Dalam Proses Pencapaian Kinerja Organisasi Tahun 2021.....	90
Tabel 3.27	Analisa Keberhasilan dan Kegagalan Kegiatan Kesekretariatan Dalam Proses Pencapaian Kinerja Organisasi Tahun 2021.....	92
Tabel 3.28	Realisasi Anggaran Dinas Komunikasi Informatika Kearsipan dan Perpustakaan Kota Cimahi Tahun 2021.....	96

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Bagan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informasi, Kearsipan dan Perpustakaan Kota Cimahi.....	7
Gambar 1.2	Grafik ASN Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan dan Perpustakaan Kota Cimahi Tahun 2020, Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	8
Gambar 3.1	Aktifitas Pengamanan Sinyal Kegiatan Strategis.....	37
Gambar 3.2	CCTV yang terhubung melalui jaringan yang disediakan oleh Diskominfoarpus.....	41
Gambar 3.3	Command Center Kota Cimahi.....	43
Gambar 3.4	Penerimaan penghargaan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika atas implementasi program smart city dengan kategori Smart Economy.....	44
Gambar 3.5	Capaian Pemerintah Kota Cimahi dalam Rating Transformasi Digital dan Kota Cerdas Indonesia.....	45
Gambar 3.6	Tampilan layar aplikasi Open Data.....	51
Gambar 3.7	Publikasi Buku Data Statistik Sektor Kota Cimahi.....	52
Gambar 3.8	Publikasi Survei Persepsi Warga Kota Cimahi.....	52
Gambar 3.9	Layanan Perpustakaan Kota Cimahi Sistem Tertutup dalam Masa Pandemi Tahun 2021.....	55
Gambar 3.10	Aktivitas Pembinaan Perpustakaan Kota Cimahi Tahun 2021.....	59
Gambar 3.11	Aktivitas Peningkatan Kapasitas SDM Perpustakaan Kota Cimahi Tahun 2021.....	59
Gambar 3.12	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi Membaca Melalui Media Sosial Kota Cimahi Tahun 2021.....	61
Gambar 3.13	Aktivitas Penyerahan Hadiah Pemenang Cimahi Reading Habit Kota Cimahi Tahun 2021.....	62
Gambar 3.14	Flyer Cimahi Reading Habit Kota Cimahi Tahun 2021.....	62
Gambar 3.15	Aktivitas Lomba Bercerita Kota Cimahi Tahun 2021.....	64
Gambar 3.16	Aktivitas Pengembangan Literasi Kota Cimahi Tahun 2021.....	66
Gambar 3.17	Rekapitulasi Hasil Pengawasan Kearsipan Eksternal Pemerintah Kota Cimahi Tahun 2021.....	67
Gambar 3.18	Aktivitas Penelusuran Arsip Sekretaris Daerah Kota Cimahi Tahun 2001-2005.....	70
Gambar 3.19	Aktivitas webinar yang diselenggarakan oleh ANRI Tahun 2021...	73
Gambar 3.20	Sosialisasi JRA Kota Cimahi Tahun 2021 secara Virtual.....	74
Gambar 3.21	Sosialisasi SKKAD Kota Cimahi Tahun 2021 secara Virtual.....	76

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Teknis penyusunan LKIP dilakukan berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKIP ini disusun sebagai media dalam menyampaikan informasi pencapaian target kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan dan Perpustakaan Kota Cimahi kepada Walikota Cimahi atas pemberian mandat yang diberikan kepada Kepala Dinas, sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah disepakati pada tahun anggaran 2021 dan sebagai pertanggung-jawaban kepada masyarakat atas penggunaan anggaran publik tahun anggaran 2021 yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat secara langsung maupun tidak secara langsung.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Komunikasi melaksanakan kewenangan Wali Kota Cimahi dalam hal yang berkaitan dengan 5 urusan yaitu Urusan Komunikasi dan Informatika, Urusan Persandian, Urusan Statistik, Urusan Kearsipan dan Urusan Perpustakaan. Semua urusan tersebut merupakan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Tertuang dalam Perubahan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022 Dinas Komunikasi, Informasi, Kearsipan dan Perpustakaan Kota Cimahi

melalui kewenangannya dan fungsinya diharapkan mampu mendukung pencapaian Visi Kota Cimahi melalui :

- Misi 1 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkepribadian, berakhlak mulia, cerdas, sehat dan unggul
 - Tujuan : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing
 - Sasaran : Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan
 - Strategi : Meningkatkan budaya gemar membaca masyarakat

- Misi 2 : Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, professional, efektif, efisien, dan ekonomis yang berbasis pada sistem penganggaran yang pro publik, dengan tujuan meningkatkan tata kelola pemerintahan.
 - Tujuan : Meningkatkan tata kelola Pemerintahan Daerah
 - Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pemerintahan Daerah
 - Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
 - Strategi : Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah

Program prioritas Wali Kota Cimahi yang menjadi target pelaksanaan tugas Dinas Komunikasi Informatika Kearsipan dan Perpustakaan Kota Cimahi adalah program ke 6 Kemudahan Birokrasi.

Perubahan RPJMD Kota Cimahi yang kemudian dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2021 dan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2021 selanjutnya dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Cimahi Tahun Anggaran 2021 menjadi dasar bagi pelaksanaan pembangunan Kota Cimahi Tahun 2021.

Dinas Komunikasi Informatika Kearsipan dan Perpustakaan sebagai salah satu unsur pelaksana Pemerintah Kota Cimahi mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya. Pelaporan kinerja Dinas Komunikasi Informatika Kearsipan dan Perpustakaan

Kota Cimahi Tahun 2021 merupakan salah satu pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD Kota Cimahi Tahun 2021 tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD Kota Cimahi Tahun 2021.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi Informatika Kearsipan dan Perputakaan Kota Cimahi, sebagai berikut :

- a. Undang Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi
- b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- c. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- d. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
- e. Undang Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan
- f. Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
- g. Kepres No. 50 tahun 1997 tentang Pedoman Umum Perpustakaan
- h. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendencygunaan Telematika Indonesia
- i. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government
- j. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- k. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2016 Nomor 207).

1.3. Isu Strategis

Merujuk pada RKPD Kota Cimahi Tahun 2021 bahwa arah kebijakan pembangunan Kota Cimahi pada tahun 2021 sesuai dengan RPJMD Kota Cimahi tahun 2017-2022 adalah Peningkatan Daya Saing Kota Melalui

Pemerataan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat yang ditunjang dengan Kemantapan Infrastruktur.

Isu strategis diperoleh melalui hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan, dan memperhatikan lingkungan strategis internal dan eksternal yang meliputi (1) Isu strategis Kota Cimahi Tahun 2017-2022; (2) Capaian pembangunan tahun/periode sebelumnya dan permasalahan pembangunan ; (3) Isu Strategis Pembangunan Provinsi Jawa Barat dalam RKPD Tahun 2020; (4) Isu Strategis Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2020; (5) Optimalisasi tujuan pembangunan berkelanjutan *Sustainable Development Goals/SDGs*; dan (6) Kondisi Global. Lima Belas isu strategis pembangunan Kota Cimahi pada tahun 2021 adalah :

1. Percepatan Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
2. Penanggulangan Kemiskinan;
3. Penanggulangan Pengangguran;
4. Peningkatan Upaya Pemerataan Pendapatan;
5. Peningkatan Pencegahan dan Penanggulangan Bencana;
6. Peningkatan Keamanan, Kenyamanan, dan Keselamatan Bertansportasi;
7. Peningkatan Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
8. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
9. Optimalisasi Kualitas Pendidikan;
10. Optimalisasi Kualitas Kesehatan;
11. Pembinaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
12. Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat;
13. Pengendalian Pertumbuhan Penduduk;
14. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan; dan
15. Belum optimalnya layanan dan kualitas infrastruktur kota dan sinergitas antar wilayah.

Berdasarkan hal tersebut di atas, isu-isu strategis yang sesuai dengan dengan kewenangan Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan dan Perputakaan adalah :

1. Kondisi pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

Pandemi Covid-19 berdampak pada penyesuaian dan perubahan metoda kerja dan pelayanan kepada masyarakat. Kondisi tersebut menimbulkan dampak baik negatif maupun positif.

a. Dampak negatif pandemi Covid-19 adalah :

- 1) Waktu dan metode kerja dan layanan kepada masyarakat menyesuaikan dengan tingkat penyebaran dan kesakitan Covid-19
- 2) Beberapa pegawai tertular penyakit yang disebabkan Covid-19 sehingga berpotensi penurunan kinerja organisasi
- 3) Layanan perpustakaan umum dibatasi dan perpustakaan keliling ditiadakan karena sekolah dilakukan secara daring dan mencegah penularan virus melalui buku
- 4) Publikasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan melalui media cetak sangat berkurang
- 5) Anggaran berkurang karena difokuskan pada penanganan Covid-19

b. Dampak positif pandemic Covid-19 terutama adalah meningkatnya kebutuhan dan penggunaan teknologi informasi baik dalam seluruh bidang penyelenggaraan pemerintahan maupun pelayanan kepada masyarakat sehingga berpotensi kinerja lebih baik, lebih cepat, lebih praktis dan lebih efisien;

2. Optimalisasi Kualitas Pendidikan

Peningkatan kualitas pendidikan dan pengetahuan masyarakat secara langsung maupun tidak langsung didukung oleh :

- a. Penyediaan buku-buku pengetahuan baik secara konvensional maupun secara elektronik
- b. Pengelolaan dan penyediaan data-data statistik sebagai bahan bagi dunia pendidikan maupun kepentingan lainnya
- c. Publikasi pembangunan dan pemerintahan melalui berbagai media
- d. Penyediaan sarana dan prasarana teknologi informasi baik di lingkungan kantor pemerintahan maupun di tempat-tempat umum sehingga masyarakat mempunyai akses untuk mendapatkan informasi secara elektronik

- e. Penelusuran dan penyajian informasi-informasi yang bernilai sejarah dari hasil penyelenggaraan arsip yang baik dan tertib sesuai dengan NSPK
- 3. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan
Penggunaan teknologi informasi, penyebarluasan informasi pemerintahan dan pembangunan, pengelolaan data-data statistik dan kearsipan, pengelolaan keamanan informasi dan persandian secara signifikan berpengaruh pada upaya optimalisasi tata kelola pemerintahan bagi peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat

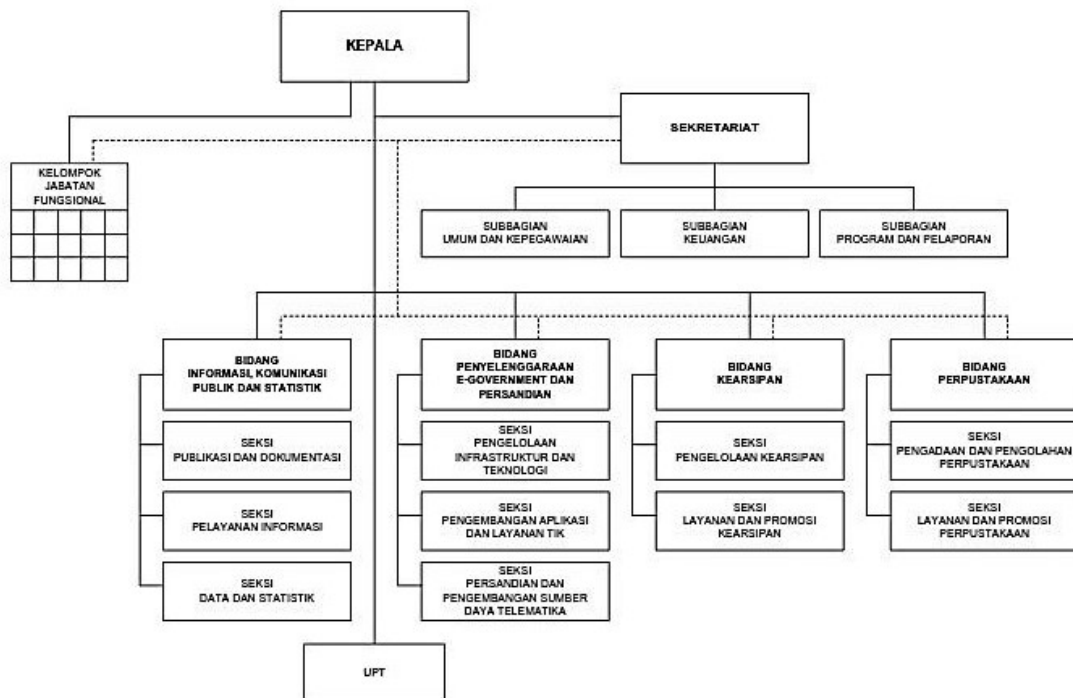
1.4. Uraian Singkat Organisasi

1.4.1. Struktur Organisasi

Dinas Komunikasi, Informasi, Kearsipan dan Perpustakaan Kota Cimahi dibentuk berdasarkan amanat Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2016 Nomor 207) adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, persandian, statistik, kearsipan dan perpustakaan yang menjadi kewenangan Daerah dengan Susunan Organisasi sebagai berikut :

- i. Kepala Dinas
- ii. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian
 - 2. Subbagian Keuangan
 - 3. Subbagian Program dan Pelaporan
- iii. Bidang Informasi, Komunikasi Publik dan Statistik, membawahi :
 - 1. Seksi Publikasi dan Dokumentasi
 - 2. Seksi Pelayanan Informasi
 - 3. Seksi Data dan Statistik
- iv. Bidang Penyelenggaraan E-Government dan Persandian, membawahi :
 - 1. Seksi Pengelolaan Infrastruktur dan Teknologi
 - 2. Seksi Pengembangan Aplikasi dan Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi
 - 3. Seksi Persandian dan Pengembangan Sumber Daya Telematika.

- iv. Bidang Kearsipan, membawahi:
 - 1. Seksi Pengelolaan Kearsipan
 - 2. Seksi Layanan dan Promosi Kearsipan
- v. Bidang Perpustakaan, membawahi:
 - 1. Seksi Pengadaan dan Pengolahan Perpustakaan
 - 2. Seksi Layanan dan Promosi Perpustakaan
- vi. Kelompok Jabatan Fungsional



Gambar 1-1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informasi, Kearsipan dan Perpustakaan Kota Cimahi

I.4.2. Sumber Daya Manusia

Penyelenggaraan tugas dan fungsi, pada tahun 2021 Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan dan Perpustakaan Kota Cimahi didukung oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 44 orang.

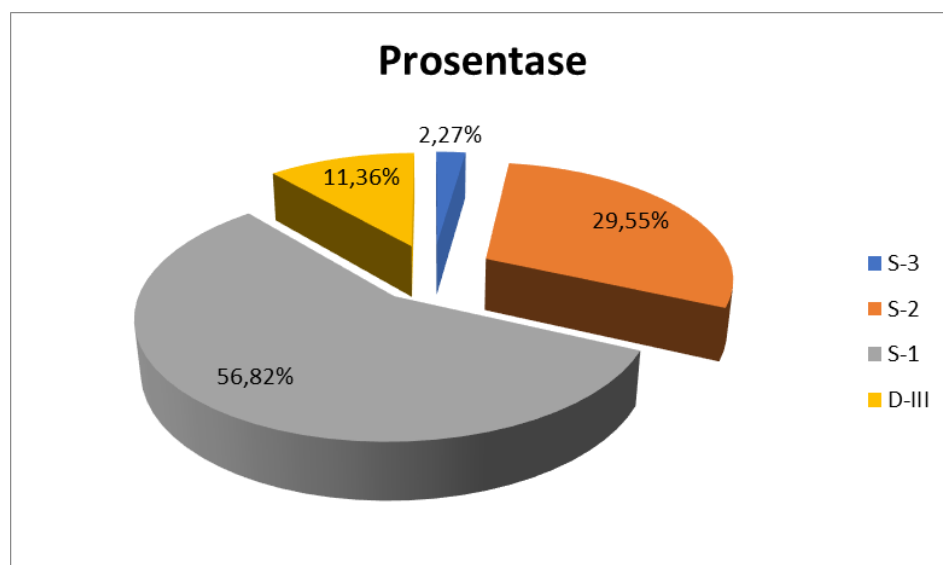
Tabel 1.1 Jumlah Aparatur Sipil Negara Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan dan perpustakaan Kota Cimahi, Berdasarkan Jabatan Struktural pada Tahun 2021

NO	JABATAN	PRIA	WANITA	JUMLAH
1	Eselon 2A	1		1
2	Eselon 3A			
3	Eselon 3B	3	1	4
4	Eselon 4A	8	5	13
5	Fungsional Arsiparis	1	1	2
6	Fungsional Perencana	1		1
7	Fungsional Pustakawan	1	1	2
8	Staf	12	9	211
	Jumlah	27	17	44

Tabel 1.2 Jumlah Aparatur Sipil Negara Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan dan perpustakaan Kota Cimahi, berdasarkan Pendidikan pada tahun 2021

NO	PENDIDIKAN	PRIA	WANITA	JUMLAH
1	S-3	1	0	1
1	S-2	9	4	13
2	S-1	14	11	25
3	D-III	3	2	5
4	SMA	0	0	0
	Jumlah	27	17	44

Secara grafis, tingkat pendidikan Aparatur Sipil Negara Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan dan Perpustakaan Kota Cimahi, sebagai berikut :



Gambar 1-2 Grafik ASN Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan dan Perpustakaan Kota Cimahi Tahun 2020, Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Sumber daya manusia di Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan dan Perpustakaan Kota Cimahi didukung pula oleh tenaga non ASN, terdiri dari Tenaga Ahli dan Tenaga Harian Lepas (THL) sebagai berikut :

Tabel 1.3 Jumlah Tenaga Non ASN Dinas Komunikasi Informatika Kearsipan dan Perpustakaan Kota Cimahi Tahun 2021

NO	PENDIDIKAN	TENAGA AHLI		THL		JUMLAH
		PRIA	WANITA	PRIA	WANITA	
1	S-1	3	0	5	3	11
2	D-III	0	0	2	0	2
3	D-II	0	0	1	0	1
4	SMA	0	0	4	1	5
	Jumlah	3	0	12	4	19

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi, bahwa Dinas Komunikasi Informatika Kearsipan dan Perpustakaan Kota Cimahi mempunyai tugas pokok, kewenangan dan tanggung jawab meliputi 5 (lima) urusan, yaitu :

- a. Urusan Perpustakaan
- b. Urusan Kearsipan
- c. Urusan Komunikasi dan Informatika
- d. Urusan Persandian, dan
- e. Urusan Statistik

Berdasarkan Perubahan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022 dan Perubahan Renstra Dinas Komunikasi Informatika Kearsipan dan Perpustakaan Kota Cimahi Tahun 2018-2022, dalam upaya mencapai Visi Kota Cimahi :

“Mewujudkan Cimahi Baru yang Maju, Agamis dan Berbudaya”

Dinas Komunikasi Informatika Kearsipan dan Perpustakaan Kota Cimahi mengemban pelaksanaan misi-misi sebagai berikut:

- Misi 1 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkepribadian, berakhlak mulia, cerdas, sehat dan unggul
- Misi 2 : Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, professional, efektif, efisien dan ekonomis yang berbasis pada sistem penganggaran yang pro publik

IKU pada unit organisasi minimal adalah indikator kinerja output. Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi Informatika Kearsipan dan Perpustakaan Kota Cimahi maka Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi Informatika Kearsipan dan Perpustakaan Kota Cimahi, sebagai berikut :

Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi Informatika Kearsipan dan Perpustakaan Kota Cimahi

NO	MISI	URUSAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(5)
1	1	Perpustakaan	Meningkatnya akses membaca masyarakat	Persentase peningkatan pemustaka aktif	IKU Dinas
2	2	Penunjang	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan dan Perpustakaan Kota Cimahi	Nilai SAKIP Dinas	IKU Dinas
3	2	Kearsipan	Meningkatnya kinerja kearsipan daerah pada pencipta arsip	Indeks LAKE (laporan Audit Kearsipan Eksternal)	IKU Dinas
4	2	Komunikasi dan Informatika & Persandian	Meningkatnya tata kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	IKU KOTA
5	2	Statistik	Meningkatnya Tata Kelola Statistik Sektoral Daerah	Prosentase Perangkat daerah yang telah melakukan integrasi data statistik sektoral	IKU Dinas

2.2. Perjanjian Kinerja (PK)

Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program / kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Sesuai dengan sasaran strategis, program dan kegiatan yang telah ditetapkan, Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi Informatika Kearsipan dan Perpustakaan Kota Cimahi, terdiri dari :

- a. Perjanjian Kinerja Eselon II
- b. Perjanjian Kinerja Eselon III
- c. Penjanjian Kinerja Eselon IV

Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi Informatika Kearsipan dan Perpustakaan Kota Cimahi Tahun Anggaran 2021 ditetapkan mengacu pada dokumen Perubahan Rencana Strategis Tahun 2018-2022, Perubahan Rencana Kerja Tahun 2021 serta dengan mempertimbangkan nilai anggaran yang dialokasikan. Perjanjian Kerja yang ditetapkan sebagai berikut :

2.2.1. Perjanjian Kinerja Eselon II

IKU Dinas Komunikasi Informatika Kearsipan dan Perpustakaan Kota Cimahi merupakan indikator kinerja Kepala Dinas (eselon II) dengan target kinerja, meliputi seluruh urusan kewenangan, sebagai berikut :

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Komunikasi Informatika Kearsipan Dan Perpustakaan Kota Cimahi Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya akses membaca masyarakat	Persentase Peningkatan Pemustaka Aktif	1,07 Persen
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan dan Perpustakaan Kota Cimahi	Nilai SAKIP	BB
3	Meningkatnya kinerja kearsipan daerah pada pencipta arsip	Indeks LAKE (laporan Audit Kearsipan Eksternal)	72,32 Persen
4	Meningkatnya tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik	Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	3,18
5	Meningkatnya tata kelola statistik sektoral daerah	Persentase Perangkat daerah yang telah melakukan integrasi data statistik sektoral	80 Persen

2.2.2. Perjanjian Kinerja Eselon III dan Eselon IV

1. Urusan Perpustakaan

Urusan Perpustakaan diampu oleh Bidang Perpustakaan. Perjanjian Kinerja Eselon III dan IV pada Bidang Perpustakaan, sebagai berikut :

a. Kepala Bidang Perpustakaan

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Bidang Perpustakaan, Dinas Komunikasi Informatika Kearsipan Dan Perpustakaan Tahun 2021

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatkan layanan perpustakaan daerah	Persentase Sarana Baca Masyarakat Yang Aktif	30 persen
		Tingkat Kepuasan Pengunjung Perpustakaan Umum Kota	78.8 Angka

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.1	Meningkatnya kunjungan masyarakat ke perpustakaan daerah	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Kota Cimahi;	24.000 Pengunjung;
1.2	Terlaksananya pembudayaan gemar membaca	Jumlah aktivitas berbasis pustaka;	3 Aktivitas;

b. Kepala Seksi Pengadaan dan Pengolahan Perpustakaan

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Perubahan Kasi Pengadaan & Pengolahan Perpustakaan, Dinas Komunikasi Informatika Kearsipan Dan Perpustakaan Kota Cimahi Tahun 2021

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya pembinaan perpustakaan Kota Cimahi	Jumlah perpustakaan Kota Cimahi yang dilakukan pembinaan	5 perpustakaan
2	Terlaksananya pelayanan-pelayanan perpustakaan	Jumlah layanan perpustakaan Kota Cimahi	3 layanan
3	Meningkatnya kapasitas SDM perpustakaan	Jumlah pengelola perpustakaan Kota Cimahi yang telah dilakukan pembinaan	50 Pengelola

c. Kepala Seksi Layanan dan Promosi Perpustakaan

Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja Perubahan Kasi Layanan dan Promosi Perpustakaan Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan Dan Perpustakaan Kota Cimahi Tahun 2021

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya pengembangan literasi membaca	Jumlah aktivitas pengembangan literasi berbasis inklusi sosial	1 aktivitas
2	Meningkatnya budaya baca dan literasi membaca masyarakat	Jumlah aktivitas sosialisasi peningkatan gemar membaca	1 Aktivitas;

2. Urusan Kearsipan

Pelaksanaan Urusan Kearsipan dilakukan oleh Bidang Kearsipan. Perjanjian Kinerja Eselon III dan IV pada Bidang Kearsipan, sebagai berikut :

a. Kepala Bidang Kearsipan

Tabel 2.6 Perjanjian kinerja perubahan kepala bidang kearsipan dinas komunikasi, informatika, kearsipan dan perpustakaan tahun 2021

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya pengelolaan kearsipan daerah	Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara Baku	15 Persen
2		(hasil) Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	100 persen
3		Persentase arsip bersifat tertutup yang diizinkan untuk digunakan	100 persen

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.1	Terlaksananya pengelolaan arsip dinamis Kota Cimahi	Nilai LAKE Aspek Pengolahan Arsip Inaktif	81 Persen
1.2	Terlaksananya pengelolaan arsip statis Kota Cimahi	Nilai LAKE aspek Pengelolaan Arsip Statis	49,88 Persen
1.3	Terlaksananya pengelolaan simpul jaringan informasi kearsipan nasional Kota Cimahi	Nilai LAKE Program Kearsipan	66,25 persen
2.1	Terlaksananya pemusnahan arsip Pemerintah Kota Cimahi yang memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun	Tingkat Kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK	100 persen
3.1	Terlaksananya pelayanan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup di Kota Cimahi	Prosentase Permohonan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang dilayani	100 persen

b. Kepala Seksi Pengelolaan Kearsipan

Tabel 2.7 Perjanjian Kinerja Perubahan Kasi Pengelolaan Kearsipan, Dinas Komunikasi Informatika Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2021

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya pemeliharaan dan penyusutan arsip dinamis Kota Cimahi	Jumlah pendampingan pengelolaan arsip dinamis	1 aktivitas
2	Terlaksananya akuisisi, pengolahan, preservasi dan akses arsip statis Kota Cimahi	Jumlah Perangkat Daerah yang melaksanakan penyerahan arsip statis	1 PD
3	Terlaksananya pemberdayaan kapasitas unit kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kota Cimahi	Jumlah kegiatan pembinaan kearsipan	1 kali

c. Kepala Seksi Layanan dan Promosi Kearsipan

Tabel 2.8 Perjanjian Kinerja Perubahan Kasi Layanan Dan Promosi Kearsipan Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan Dan Perpustakaan Tahun 2021

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya penilaian, penetapan dan pelaksanaan pemusnahan arsip yang memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan pendampingan dalam rangka pelaksanaan pemusnahan arsip	1 Perangkat Daerah
2	Terlaksananya penyediaan daftar dan penetapan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup	(output) Jumlah Daftar Arsip Perangkat Daerah yang Bersifat Tertutup berdasarkan pedoman dari Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis (SKKAAD)	3 daftar

3. Urusan Komunikasi dan Informatika

Urusan Komunikasi dan Informatika dilaksanakan oleh 2 bidang, yaitu :

i. Bidang Informasi, Komunikasi Publik dan Statistik.

Perjanjian Kinerja Eselon III dan IV Urusan Komunikasi dan Informatika pada Bidang Informasi, Komunikasi Publik dan Statistik, sebagai berikut :

a. Kepala Bidang Informasi, Komunikasi Publik dan Statistik

Tabel 2.9 Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik Dan Statistik Dinas Komunikasi Informatika Kearsipan Dan Perpustakaan Tahun 2021

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya informasi dan komunikasi publik yang efektif dan efisien	Cakupan layanan informasi pemerintahan daerah	60 Persen

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.1	Meningkatnya kualitas komunikasi antara pemerintah dan masyarakat	prosentase analisis berita yang berkonten positif	80 persen

b. Kepala Seksi Publikasi dan Dokumentasi

Tabel 2.10 Perjanjian Kinerja Perubahan Kasi Publikasi Dan Dokumentasi Dinas Komunikasi Informatika Kearsipan Dan Perpustakaan Tahun 2021

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya publikasi penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui berbagai media	jumlah publikasi pemerintahan	4.330 Publikasi

c. Kepala Seksi Pelayanan Informasi

Tabel 2.11 Perjanjian Kinerja Perubahan Kasi Pelayanan Informasi Dinas Komunikasi Informatika Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2021

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya layanan informasi dan pengaduan masyarakat	prosentase permintaan layanan informasi dan pengaduan yang ditindaklanjuti	50 persen
2	Terlaksananya komunikasi antara pemerintah dan masyarakat	jumlah berita pada website dan media lainnya	50 persen

ii. Bidang Penyelenggaraan e-Government

Perjanjian Kinerja Eselon III dan IV Urusan Komunikasi dan Informatika pada Bidang Penyelenggaraan e-Government, sebagai berikut :

a. Kepala Bidang Penyelenggaraan e-Government

Tabel 2.12 Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Bidang Penyelenggaraan E-Government Dan Persandian Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan Dan Perpustakaan Tahun 2021

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatkan penyelenggaraan e-Government	Cakupan Pengembangan E-Government Daerah;	50 Persen;

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.1	Terlaksananya penyelenggaraan domain dan sub-domain Pemerintah Kota Cimahi	Prosentase perangkat daerah yang menggunakan domain cimahikota.go.id	86 Persen
1.2	Meningkatnya layanan TIK	Prosentase cakupan layanan TIK;	50 Persen;

b. Kepala Seksi Pengelolaan Infrastruktur dan Teknologi

Tabel 2.13 Perjanjian Kinerja Perubahan Kasi Pengelolaan Infrastruktur Dan Teknologi Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2021

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya layanan jaringan intra Pemerintah Kota Cimahi	Prosentase cakupan layanan infrastruktur jaringan TIK	86 Persen
2	Terlaksananya pengelolaan pusat data	Level Pengoperasian Pusat Data;	2 Level;

- c. Kepala Seksi Pengembangan Aplikasi dan Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Tabel 2.14 Perjanjian Kinerja Perubahan Kasi Pengembangan Aplikasi Dan Layanan Teknologi Informasi Dan Komunikasi, Dinas Komunikasi Informatika Kearsipan Dan Perpustakaan Tahun 2021

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya pengembangan sistem yang memudahkan integrasi layanan antar sistem pemerintahan berbasis elektronik	Prosentase aplikasi yang dikelola	80 Persen
2	Terlaksananya pengembangan Cimahi Kota Cerdas	Jumlah aktivitas pengembangan kota cerdas	2 aktivitas

4. Urusan Persandian

Urusan Persandian dilaksanakan oleh setingkat eselon IV pada Bidang Penyelenggaraan e-Government Perjanjian Kinerja Urusan Persandian sebagai berikut :

- a. Kepala Bidang Penyelenggaraan e-Government

Tabel 2.15 Perjanjian Kinerja Perubahan Bidang Penyelenggaraan E-Government Dan Persandian Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2021

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya keamanan informasi pemerintah daerah	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan layanan persandian dalam rangka pengamanan informasi milik pemerintah	3 Persen

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
----	---------	----------------------------	--------

	KEGIATAN		
(1)	(2)	(3)	(4)
1.1	Terselenggaranya pola hubungan komunikasi sandi antara PD Kota Cimahi	Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang diterapkan pemerintah daerah berdasarkan pola hubungan komunikasi sandi;	50 Persen
1.2	Terselenggaranya persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Kota Cimahi	Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan;	25 Persen

b. Kepala Seksi Persandian

Tabel 2.16 Perjanjian Kinerja Perubahan Kasi Persandian Dan Pengembangan Sumber Daya Telematika Dinas Komunikasi Informatika Kearsipan Dan Perpustakaan Tahun 2021

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya penggunaan komunikasi sandi	Jumlah penggunaan jaring komunikasi sandi	8 Perangkat Daerah
2	Terlaksananya pengelolaan sumber daya keamanan informasi Pemerintah Kota Cimahi	Jumlah PD yang dilakukan asesment Tingkat Kematangan Keamanan Informasi dan Persandian	7 Perangkat Daerah
3	Terlaksananya layanan keamanan informasi Pemerintah Kota Cimahi	Jumlah layanan kemanan informasi yang dilakukan	4 Layanan

5. Urusan Statistik

Urusan Statistik dilaksanakan oleh setingkat eselon IV pada Bidang Informasi, Komunikasi Publik dan Statistik. Perjanjian Kinerja Urusan Statistik sebagai berikut :

a. Kepala Bidang Informasi, Komunikasi Publik dan Statistik

Tabel 2.17 Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik Dan Statistik Dinas Komunikasi Informatika Kearsipan Dan Perpustakaan Tahun 2021

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tersedianya Data Statistik Daerah	Persentase ketersediaan data statistik daerah	65 Persen;

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.1	Meningkatnya pengelolaan data statistik sektoral	(Jumlah publikasi Data Statistik Kota Cimahi;	2 Publikasi

b. Kepala Seksi Statistik

Tabel 2.18 Perjanjian Kinerja Perubahan Kasi Data Dan Statistik Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan Dan Perpustakaan Tahun 2021

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya koordinasi pengembangan data/informasi/statistik daerah	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan dengan perangkat daerah/instansi/lembaga/unit kerja	2 kali

6. Sekretariat

Sekretariat sebagai pelaksana layanan administrasi Dinas Komunikasi Informatika Kearsipan dan Perpustakaan Kota Cimahi. Perjanjian kinerja Sekretaris dan eselon IV, sebagai berikut :

a. Sekretaris

Tabel 2.19 Perjanjian Kinerja Perubahan Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2021

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kinerja Organisasi	Nilai LAKIP	75,65 Indeks

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.1	Tersusunnya dokumen perencanaan dan evaluasi	Prosentase dokumen perencanaan dan evaluasi yang disusun	100 persen
1.2	Terselenggaranya administrasi penyelenggaraan barang milik daerah	Prosentase penyelenggaraan administrasi barang milik daerah	75 persen
1.3	Tersedianya administrasi umum	Prosentase penyediaan administrasi umum	50 persen
1.4	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Prosentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	50 persen
1.5	Terpeliharanya barang milik daerah	Prosentase pemeliharaan barang milik daerah	50 persen
1.6	Terfasilitasinya pembinaan pegawai	Jumlah Pegawai Yang terfasilitasi pembinaan	48 Pegawai;
1.7	Terlaksananya administrasi keuangan	Prosentase administrasi keuangan terlaksana	100 persen

b. Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan

Tabel 2.20. Perjanjian Kinerja Perubahan Kasubag Program Dan Pelaporan Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan Dan Perpustakaan Tahun 2021

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan PD	2 dokumen
2	Terlaksananya monitoring dan evaluasi	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja PD	2 dokumen

c. Kepala Sub Bagian Keuangan

Tabel 2.21 Perjanjian Kinerja Perubahan Kasubag Program Dan Pelaporan Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan Dan Perpustakaan Tahun 2021

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terfasilitasinya gaji dan tunjangan ASN	Prosentase ASN yang terfasilitasi gaji dan tunjangan	100 Persen
2	Terfasilitasinya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dan non ASN	Prosentase ASN dan non ASN yang terfasilitasi administrasi	100 Persen
3	Terlaksanya penatausahaan dan verifikasi keuangan SKPD	Jumlah bulan penatausahaan dan verikasi keuangan	12 bulan
4	Terlaksananya koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	Jumlah bulan koordinasi dan pelaksanaan Akuntansi	12 bulan
5	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun;	1 dokumen
6	Terlaksananya pengelolaan dan penyiapan dokumen tanggapan pemeriksaan	Jumlah dokumen tanggapan pemeriksaan	2 dokumen
7	Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan, Triwulan dan Semesteran	Jumlah dokumen laporan Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	17 dokumen
8	Tersusunnya laporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Jumlah Dokumen Laporan prognosis	1 Dokumen

d. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Tabel 2.22 Perjanjian Kinerja Perubahan Kasubag Umum Dan Kepegawaian Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan Dan Perpustakaan Tahun 2021

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya pengamanan barang milik daerah	Jumlah barang milik daerah yang dilakukan pengamanan	6 unit
2	Tersedianya bahan logistik kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Logistik Kantor;	12 Bulan
3	Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan penyediaan cetakan dan penggandaan;	12 Bulan
4	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah set peralatan dan perlengkapan kantor;	2 Set

5	Terfasilitasinya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah aktivitas koordinasi dan konsultasi yang difasilitasi	76 Aktivitas
6	Terlaksananya pelayanan jasa surat menyurat	Jumlah Bulan Pelayanan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan
7	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan
8	Tersedianya layanan yang memenuhi kebutuhan umum kantor	Jumlah bulan penyediaan kebutuhan perlengkapan kebersihan dan jasa tenaga kebersihan	12 Bulan
9	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas operasional/lapangan	jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dilakukan pemeliharaan	6 unit
10	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	Jumlah bulan pemeliharaan gedung/kantor dan bangunan lainnya	12 Bulan
11	Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor	Jumlah sarana dan prasarana yang dilakukan pemeliharaan	19 unit
12	Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan kepada seluruh pegawai	Jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi	48 Pegawai;

2.3. Program/Kegiatan dan Anggaran Yang Mendukung Perjanjian Kinerja dengan Penjelasan

Dalam mendukung pencapaian kinerja murni Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan dan Perpustakaan Kota Cimahi Tahun 2021 dilaksanakan melalui Program, Kegiatan dan Sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebagai berikut :

- Anggaran Murni : Rp. 13.493.034.317,-
- Anggaran Perubahan : Rp. 18.980.171.637,-

Terdapat penambahan anggaran yang cukup besar di Anggaran Perubahan 2021 yang dialokasikan untuk pembangunan Command Center. Dana tersebut bersumber dari Bantuan Keuangan Gubernur Provinsi Jawa Barat.

Secara ringkas, program, kegiatan dan sub kegiatan pada Dinas Komunikasi Informatika Kearsipan dan Perpustakaan Kota Cimahi Tahun 2020, sebagai berikut :

Tabel 2.23 Pagu anggaran Dinas Komunikasi Informatika Kearsipan Dan Perpustakaan Kota Cimahi tahun anggaran 2021

KODE				URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		JUMLAH
1				2		3
				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		17.906.234.637
	1			Program	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.357.436.237
		2,01		Kegiatan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.020.000
			1	Sub Kegiatan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.020.000
			7	Sub Kegiatan	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.000.000
		2,02		Kegiatan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.787.016.617
			1	Sub Kegiatan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.735.966.617
			3	Sub Kegiatan	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	51.050.000
		2,03		Kegiatan	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	23.012.000
			2	Sub Kegiatan	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	23.012.000
		2,05		Kegiatan	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.800.000
			10	Sub Kegiatan	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	2.800.000
		2,06		Kegiatan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	294.680.420
			2	Sub Kegiatan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	91.503.720
			4	Sub Kegiatan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	29.298.200
			5	Sub Kegiatan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.638.500
			9	Sub Kegiatan	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	161.240.000
		2,08		Kegiatan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90.038.100
			1	Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	39.430.000
			2	Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.600.000
			4	Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	47.008.100
		2,09		Kegiatan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	144.869.100
			2	Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	65.739.100
			9	Sub Kegiatan	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	45.630.000

KODE				URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		JUMLAH
1				2		3
			10	Sub Kegiatan	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	33.500.000
	2			Program	INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.512.031.800
		2,01		Kegiatan	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.512.031.800
			5	Sub Kegiatan	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	209.486.600
			6	Sub Kegiatan	Pelayanan Informasi Publik	140.700.000
			7	Sub Kegiatan	Layanan Hubungan Media	2.161.845.200
	3			Program	APLIKASI INFORMATIKA	7.036.766.600
		2,01		Kegiatan	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.433.895.500
			3	Sub Kegiatan	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	1.433.895.500
		2,02		Kegiatan	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	5.602.871.100
			3	Sub Kegiatan	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	5.166.048.000
			8	Sub Kegiatan	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	214.543.000
			9	Sub Kegiatan	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	222.280.100
20					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	258.061.400
	2			Program	PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	258.061.400
		2,01		Kegiatan	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	258.061.400
			1	Sub Kegiatan	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	258.061.400
21					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	100.438.200
	2			Program	PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	100.438.200
		2,01		Kegiatan	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	58.300.000
			2	Sub Kegiatan	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	30.800.000
			4	Sub Kegiatan	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	27.500.000
		2,02		Kegiatan	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	42.138.200
			1	Sub Kegiatan	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	42.138.200
23					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	373.467.800
	2			Program	PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	373.467.800
		2,01		Kegiatan	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	323.836.800
			2	Sub Kegiatan	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	312.736.800
			4	Sub Kegiatan	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	10.600.000

KODE				URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		JUMLAH
1				2		3
			6	Sub Kegiatan	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	500
		2,02		Kegiatan	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	49.631.000
			1	Sub Kegiatan	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	18.200.000
			4	Sub Kegiatan	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	31.431.000
24				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN		341.969.600
	2			Program	PENGELOLAAN ARSIP	312.869.600
		2,01		Kegiatan	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	11.946.400
			2	Sub Kegiatan	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	11.946.400
		2,02		Kegiatan	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	291.625.000
			2	Sub Kegiatan	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	291.625.000
		2,03		Kegiatan	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	9.298.200
			2	Sub Kegiatan	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	9.298.200
	3			Program	PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	19.400.000
		2,01		Kegiatan	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	19.400.000
			1	Sub Kegiatan	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	19.400.000
	4			Program	PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	9.700.000
		2,01		Kegiatan	Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	9.700.000
			2	Sub Kegiatan	Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	9.700.000

BAB III PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja adalah tindakan pengukuran yang dilakukan terhadap berbagai aktivitas dalam rantai nilai yang ada pada suatu organisasi. Hasil pengukuran tersebut kemudian digunakan sebagai umpan balik yang akan memberikan informasi tentang prestasi pelaksanaan suatu rencana dan titik di mana organisasi memerlukan penyesuaian-penyesuaian atas aktivitas perencanaan dan pengendalian. Perjanjian kinerja yang telah dilakukan merupakan target yang diharapkan dapat dicapai pada akhir masa anggaran tahun berjalan.

Pengukuran kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan dan Perpustakaan Kota Cimahi Tahun 2021 dilakukan terhadap target kinerja yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan dan Perpustakaan Kota Cimahi Tahun 2021. Perbandingan dengan target kinerja dan pengukuran kinerja Tahun 2020 terutama dilakukan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) karena pada indikator kinerja program dan kegiatan terdapat perubahan karena adanya perubahan nomenklatur program dan kegiatan sesuai dengan aturan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 90 Tahun 2020, serta target akhir tahun Rencana Strategis (Renstra) untuk melihat kecenderungannya dan kemungkinan ketercapaiannya pada masa akhir Renstra.

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja organisasi merupakan kolaborasi antara sumber-sumber daya yang dimiliki dan dikelola oleh organisasi. Sumberdaya organisasi antara lain sumber daya manusia atau personil organisasi mencakup kemampuan / kualitas intelektual dan berorganisasi dan kuantitasnya, kualitas dan kuantitas peralatan dan perlengkapan kerja, nilai anggaran yang dikelola, peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya serta kebijakan-kebijakan yang mengatur dan berpengaruh baik secara tertulis maupun tidak tertulis dalam seluruh skala; struktur dan sistem manajemen dan operasi baik yang tertulis maupun tidak tertulis; hubungan-hubungan organisasi formal dan informal baik dalam lingkup Pemerintah Kota Cimahi, instansi vertikal pemerintahan maupun dengan lembaga non pemerintahan; hubungan-hubungan dengan masyarakat, baik dalam skala individual maupun kelompok.

Capaian kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan dan Perpustakaan Kota Cimahi, terdiri dari :

A. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

- B. Capaian Indikator Kinerja Tingkat Hasil (outcome) dan Keluaran (output), meliputi:
- Urusan Persandian
 - Urusan Komunikasi dan Informatika
 - Urusan Statistik
 - Urusan Perpustakaan
 - Urusan Kearsipan

3.1.1. Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Realisasi kinerja Dinas Komunikasi Informatika Kearsipan dan Perpustakaan Kota Cimahi yang diukur melalui indikator kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2021, untuk masing-masing urusan kewenangan dijabarkan, dideskripsikan dan dinarasikan berdasarkan data-data kinerja proses maupun output baik secara numerik maupun visual.

Capaian kinerja Dinas Komunikasi Informatika Kearsipan dan Perpustakaan Kota Cimahi Tahun 2021, sebagai berikut:

1. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Capaian kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan dan Perpustakaan Kota Cimahi Tahun 2021, sebagai berikut :

Tabel 3.1. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan dan Perpustakaan Kota Cimahi Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya akses membaca masyarakat	Persentase Peningkatan Pemustaka Aktif	1,07 Persen	181, 34 Persen	100%
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan dan Perpustakaan Kota Cimahi	Nilai SAKIP	BB	BB	100%
3	Meningkatnya kinerja kearsipan daerah pada pencipta arsip	Indeks LAKE (laporan Audit Kearsipan Eksternal)	72,32 Persen	64,17 Persen	89%
4	Meningkatnya tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik	Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	3,18	2,75	86%
5	Meningkatnya tata kelola statistik sektoral daerah	Persentase Perangkat daerah yang telah melakukan integrasi data statistik sektoral	80 Persen	80 Persen	100%

Terdapat beberapa capaian indikator yang capaiannya diluar ekspektasi, sebagai berikut :

- a. Capaian indikator Perentase Peningkatan Pemustakan Aktif menunjukkan hal yang aneh karena sangat jauh melampaui batas. Hal tersebut terjadi disebabkan oleh pada tahun sebelumnya layanan perpustakaan dilakukan penutupan karena terjadi pandemi Covid-19, sedangkan e-library belum digalakan. Pada tahun 2021 layanan perpustakaan menggunakan sistem tertutup, namun e-Library dilakukan sosialisasi secara terus menerus dan diberikan reward serta dikaitkan dengan program Cimahi Reading Habit (CRH) sehingga pemustaka nya sangat tinggi.
- b. Capaian Indeks LAKE Kota Cimahi pada Tahun 2021 berada di bawah target karena pengawasan kearsipan eksternal yang dilakukan oleh ANRI dilaksanakan dengan menggunakan instrumen pengawasan kearsipan yang berbeda dengan tahun sebelumnya yaitu menggunakan instrument pengawasan sebagaimana diatur dalam lampiran Keputusan Kepala ANRI Nomor 92 Tahun 2021 tentang Instrumen Pengawasan Atas Pelaksanaan Penyelenggaraan Kearsipan Dan Tata Cara Penilaian Pengawasan Kearsipan.
- c. Capaian Indeks SPBE Kota Cimahi tidak mencapai target karena terdapat perubahan indicator-indikator dan penambahan indicator yang digunakan dalam penghitungan Indeks SPBE dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada Tahun 2020 diterbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang mencabut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 yang sebelumnya digunakan sebagai pedoman evaluasi SPBE, sehingga penilaian SPBE yang sebelumnya menggunakan 35 indikator berubah menjadi 47 indikator.

2. Capaian Indikator Kinerja Tingkat Hasil (outcome) dan Keluaran (output)

Capaian indikator kinerja tingkat hasil (*outcome*) dan keluaran (*output*) Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan dan Perpustakaan Kota Cimahi Tahun 2021, sebagai berikut :

Tabel 3.2. Capaian Indikator Kinerja Hail dan Keluaran Dinas Komunikasi, Infomatika, Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2021

NO	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	INDIKATOR KINERJA		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)

NO	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	INDIKATOR KINERJA		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
I	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				
	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan layanan persandian dalam rangka pengamanan informasi milik pemerintah	3 Persen	100 Persen	100%
1	Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang diterapkan pemerintah daerah berdasarkan pola hubungan komunikasi sandi;	50 Persen	51,3 Persen	100%
1.1	Sub Kegiatan Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penggunaan jaring komunikasi sandi	8 Perangkat Daerah	9 Perangkat Daerah	100%
2	Kegiatan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan;	25 Persen	100 Persen	100%
2.1	Sub Kegiatan Pelaksanaan Analisis Kebutuhan Dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PD yang dilakukan asesment Tingkat Kematangan Keamanan Informasi dan Persandian	7 Perangkat Daerah	7 Perangkat Daerah	100%
2.2	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan kemanan informasi yang dilakukan	4 Layanan	4 Layanan	100%
II	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	3,18	2,75	86%
	Program Pengelolaan Aplikasi Informa tika	Cakupan Pengembangan E-Government Daerah;	50 Persen;	91 Persen	100%
3	Kegiatan Pengelolaan Nama Domain Yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat Dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase perangkat daerah yang menggunakan domain cimahikota.go.id	86 Persen	96,85 Persen	100%
3.1	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Prosentase cakupan layanan infrastruktur jaringan TIK	86 Persen	100 Persen	100%
4	Kegiatan Pengelolaan E-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase cakupan layanan TIK;	50 Persen;	91 Persen	100%
4.2	Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Level Pengoperasian Pusat Data;	2 Level;	3 Level	100%
4.3	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Prosentase aplikasi yang dikelola	80 Persen	90 Persen	100%
4.4	Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah aktivitas pengembangan kota cerdas	2 aktivitas	2 aktivitas	2%

NO	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	INDIKATOR KINERJA		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Cakupan layanan informasi pemerintahan daerah	60 Persen	60 Persen	100%
5	Kegiatan Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Peresentase analisis berita yang berkonten positif	80 persen	82,5 persen	100%
5.1	Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik	Peosentase permintaan layanan informasi dan pengaduan yang ditindaklanjuti	50 persen	74,74 Persen	100%
5.2	Sub Kegiatan Layanan Hubungan Media	Jumlah publikasi pemerintahan	4330 publikasi	4449 publikasi	100%
5.3	Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah berita pada website dan media lainnya	600 berita	1.297 berita berita	100%
III	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	Persentase Perangkat daerah yang telah melakukan integrasi data statistik sektoral	80 Persen	80 Persen	100%
	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase ketersediaan data statistik daerah	65 Persen	71,42 Persen	100%
6	Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral Di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah publikasi Data Statistik Kota Cimahi;	2 publikasi	2 publikasi	100%
		Jumlah data sektoral pada basis data Pemerintah Kota Cimahi;	200 dataset	200 dataset	100%
6.1	Sub Kegiatan Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis Dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan dengan perangkat daerah/instansi/lembaga/unit kerja	2 kali	2 kali	100%
6.2	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Pemda Dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah Yang Terintegrasi	Jumlah SDM pengelola data/statistik/informasi yang mengikuti pelatihan/pembinaan/pendidikan	60 Orang;	60 Orang;	100%
I V	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	Persentase Peningkatan pemustaka aktif	1,07 Persen	181 Persen	100%
	Program Pembinaan Perpustakaan	Tingkat kepuasan pengunjung perpustakaan umum kota	78.8 Angka	80,74 Angka	100%
		Persentase Sarana Baca Masyarakat Yang Aktif	30 persen	30 persen	100%
7	Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Kota Cimahi;	24.000 pengunjung	25.381 pengunjung	100%
7.1	Sub Kegiatan Pembinaan Perpustakaan Pada Satuan Pendidikan Dasar Di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah perpustakaan Kota Cimahi yang dilakukan pembinaan	5 perpustakaan	5 perpustakaan	100%
7.2	Sub Kegiatan Pengembangan Perpustakaan Di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan perpustakaan Kota Cimahi	3 layanan	3 layanan	100%
7.3	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan Dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengelola perpustakaan Kota Cimahi yang telah dilakukan pembinaan	50 pengelola	50 pengelola	100%
8	Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah aktivitas berbasis pustaka;	3 Aktivitas	3 Aktivitas	100%

NO	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	INDIKATOR KINERJA		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
8.1	Sub Kegiatan Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	jumlah aktivitas pengembangan literasi berbasis inklusi sosial	1 aktivitas	1 aktivitas	100%
8.2	Sub Kegiatan Sosialisasi Budaya Baca Dan Literasi Pada Satuan Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Khusus Serta Masyarakat	Jumlah aktivitas sosialisasi peningkatan gemar membaca	1 Aktivitas	13 Aktivitas	100%
V	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	Indeks LAKE (laporan Audit Kearsipan Eksternal)	72,32 Persen	64,17 Persen	100%
	Program Pengelolaan Arsip	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	15 Persen	50 Persen	100%
9	Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Nilai LAKE Aspek Pengolahan Arsip Inaktif;	81 Persen	28,82 Persen	3,6%
9.1	Sub Kegiatan Pemeliharaan Dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah pendampingan pengelolaan arsip dinamis	1 aktivitas	1 aktivitas	100%
10	Kegiatan Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Nilai LAKE aspek Pengelolaan Arsip Statis;	49,88 Persen	6,94 Persen	7,18%
10.1	Sub Kegiatan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, Dan Akses Arsip Statis	Jumlah Perangkat Daerah yang melaksanakan penyerahan arsip statis	1 PD	1 PD	100%
11	Kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Nilai LAKE Program Kearsipan	66,25 persen	25,25 Persen	38,11%
11.1	Sub Kegiatan Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pembinaan kearsipan	1 kali	1 kali	100%
	Program PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	100 persen	100 persen	100%
12	Kegiatan Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Tingkat Kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK	100 persen	100 persen	100%
12.1	Sub Kegiatan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan pendampingan dalam rangka pelaksanaan pemusnahan arsip	3 Perangkat Daerah	1 Perangkat Daerah	100%
	Program Perizinan Penggunaan Arsip	Persentase arsip bersifat tertutup yang diizinkan untuk digunakan	100 persen	100 persen	100%
13	Kegiatan Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	Prosentase Permohonan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang dilayani	100 persen	100 persen	100%

NO	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	INDIKATOR KINERJA		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
13.1	Sub Kegiatan Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah Daftar Arsip Perangkat Daerah yang Bersifat Tertutup berdasarkan pedoman dari Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis (SKKAAD)	3 daftar	1 daftar	100%
	URUSAN PENDUKUNG PEMERINTAHAN	Nilai SAKIP	BB	BB	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai LAKIP	75,65 Indeks	75,65 Indeks	100%
14	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase dokumen perencanaan dan evaluasi yang disusun	100 persen	100 persen	100%
		Jumlah Dokumen Perencanaan dan Monev Yang Disusun;	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
14.1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan PD	2 dokumen	2 dokumen	100%
14.7	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja PD	2 dokumen	2 dokumen	100%
15	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Pesentase penyelenggaraan administrasi barang milik daerah	75 persen	75 persen	100%
15.1	Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah barang milik daerah yang dilakukan pengamanan	6 unit	6 unit	100%
16	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase penyediaan administrasi umum	50 persen	100 persen	100%
		Jumlah Bulan Penyediaan Adminitrasi Umum;	12 Bulan	12 Bulan	100%
16.1	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Logistik Kantor;	12 Bulan	12 Bulan	100%
16.2	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan cetakan dan penggandaan;	12 Bulan	12 Bulan	100%
16.3	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah set peralatan dan perlengkapan kantor;	2 Set	2 Set	100%
16.4	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah aktivitas koordinasi dan konsultasi yang difasilitasi	76 Aktivitas	102 Aktivitas	100%
17	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	50 persen	50 persen	100%
		Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12 bulan	12 bulan	100%
17.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Bulan Pelayanan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	12 Bulan	100%
17.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	12 Bulan	100%
17.3	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan kebutuhan perlengkapan kebersihan dan jasa tenaga kebersihan	12 Bulan	12 Bulan	100%
		jumlah bulan penyediaan umum kantor	12 bulan	12 bulan	100%
18	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase pemeliharaan barang milik daerah	50 persen	50 persen	100%

NO	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	INDIKATOR KINERJA		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
		Jumlah bulan pemeliharaan barang milik daerah	12 bulan	12 bulan	100%
18.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dilakukan pemeliharaan	6 unit	6 unit	100%
18.2	Sub Kegiatan Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan gedung/kantor dan bangunan lainnya	12 bulan	12 bulan	100%
18.3	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana yang dilakukan pemeliharaan	19 unit	19 unit	100%
19	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Yang terfasilitasi pembinaan	48 pegawai;	43 pegawai	100%
19.1	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi	48 pegawai;	43 pegawai	100%
20	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase administrasi keuangan terlaksana	100 persen	100 persen	100%
		Jumlah Dokumen Keuangan Yang Disusun;	21 dokumen	21 dokumen	100%
20.1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terfasilitasi gaji dan tunjangan;	48 pegawai	43 pegawai	100%
20.3	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bulan penatausahaan dan verikasi keuangan	12 bulan	12 bulan	100%

Gambaran capaian kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan dan Perpustakaan Kota Cimahi Tahun 2020, sebagai berikut :

A. Urusan Persandian

Sesuai dengan Peraturan Pemerinatah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daearah menyebutkan bahwa urusan Persandian merupakan urusan wajib yang berada satu rumpun dengan Urusan Komunikasi dan infromatika. Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2021tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi bahwa Urusan Persandian diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan dan Perpustakaan Kota Cimahi. Secara struktural Urusan Persandian berada di Bidang Penyelenggaraan **e-Government** dan Persandian dan secara teknis dalam pelaksanaannya dilaksanakan oleh Seksi Persandian dan Pengembangan Telematika. Capaian pencapaian sasaran urusan persandian dapat dilihat pada tebel berikut:

Tabel 3.3. Pencapaian Target Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan Dan Perpustakaan Urusan Persandian Tahun 2021

Esselon	Sasaran	INDIKATOR	INDIKATOR KINERJA		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
III	Meningkatnya keamanan informasi pemerintah daerah	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan layanan persandian dalam rangka pengamanan informasi milik pemerintah	3 Persen	100 Persen	100%
III	Terselenggaranya pola hubungan komunikasi sandi antara PD Kota Cimahi	Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang diterapkan pemerintah daerah berdasarkan pola hubungan komunikasi sandi;	50 Persen	51,3 Persen	103%
IV	Terlaksananya penggunaan komunikasi sandi	Jumlah penggunaan jaring komunikasi sandi	8 Perangkat Daerah	9 Perangkat Daerah	112%
III	Terselenggaranya persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Kota Cimahi	Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan;	25 Persen	100 Persen	400%
IV	Terlaksananya pengelolaan sumber daya keamanan informasi Pemerintah Kota Cimahi	Jumlah PD yang dilakukan asesment Tingkat Kematangan Keamanan Informasi dan Persandian	7 Perangkat Daerah	7 Perangkat Daerah	100%
IV	Terlaksananya layanan keamanan informasi Pemerintah Kota Cimahi	Jumlah layanan keamanan informasi yang dilakukan	4 Layanan	4 Layanan	100%

Pada tahun anggaran 2021 Urusan Persandian dilaksanakan melalui 1 Program, 2 Kegiatan dan 3 sub kegiatan yang diharapkan dapat mendukung pencapaian IKU Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan dan Perpustakaan Kota Cimahi dalam meningkatkan Indeks SPBE.

Alokasi anggaran untuk melaksanakan urusan persandian sebesar Rp. 100.438.200,- anggaran sebesar ini masih dikatakan jauh dari kebutuhan namun demikian ketersediaan anggaran tersebut dapat digunakan secara optimal untuk penyelenggaraan urusan persandian Tahun 2021

Capaian kinerja urusan persandian di Tahun 2021 sangat baik dengan capaian kinerja rata-rata 100%, secara terperinci diuraikan sebagai berikut:

- 1. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi**
- Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi dengan indikator kinerja Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan layanan persandian dalam rangka pengamanan informasi milik pemerintah, pada tahun 2021 target capainnya adalah 3%, realisasi kinerja mencapai 100%. Semua perangkat daerah di Kota Cimahi telah menggunakan layanan persandian dalam rangka pengamanan informasi milik pemerintah, adapun jenis layanan-layanan persandian yang dilaksanakan terdiri dari:
- a. Layanan Penetration test.

- b. Layanan Penerbitan Sertifikat Elektronik.
- c. Layanan Jamming.
- d. Layanan surat elektronik resmi dinas (@cimahikota.go.id).

1.1. Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

Dalam kegiatan ini indikator capaian kinerja adalah Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang diterapkan pemerintah daerah berdasarkan pola hubungan komunikasi sandi. Titik yang diamankan merupakan Sistem Elektronik milik perangkat daerah berupa layanan administrasi dan layanan publik yang disenggarakan secara elektronik. Pengamanan titik PHKS yang dilakukan adalah berupa kegiatan Penetration test (Pentest) adalah sebuah metode yang dilakukan evaluasi kemanan dari sebuah sistem elektronik. Evaluasi dilakukan dengan cara melakukan sebuah simulasi serangan. Hasil dari *pentest* ini berguna sebagai *feedback* bagi pengelola sistem untuk memperbaiki tingkat keamanan dari sistem komputer mereka, sehingga diharapkan dapat diketahui kelemahan-kelemahan dari sistem elektronik yang mungkin dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab untuk dilakukan perbaikan system keamanan sehingga mengurangi risiko terjadinya serangan siber.

Capaian kinerja kegiatan ini mencapai 100%, dari target kinerja 50% tercapai 51,3% yaitu telah dilakukan Pentest terhadap 60 Sistem Elektronik dari 117 Sistem elektronik yang ada.

Sub Kegiatan Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Sub kegiatan ini memiliki indikator kinerja Jumlah penggunaan jaring komunikasi sandi dengan target kinerja 8 Perangkat Daerah, di tahun 2021 ini 9 Perangkat Daerah telah jaring komunikasi sandi. Jaring komunikasi sandi diartikan adalah Pemanfaatan Sertifikat elektronik. Ke 9 Perangkat Daerah yang telah memanfaatkan sertifikat elektronik di Kota Cimahi terdiri dari:

- 1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- 2) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
- 3) Badan Pengelola Pendapatan Daerah
- 4) Rumah Sakit Umum Daerah Cibabat
- 5) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- 6) Sekretariat Daerah.
- 7) Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan dan Perpustakaan.
- 8) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah.
- 9) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

1.2. Kegiatan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Dalam kegiatan ini menyelenggarakan layanan pengamanan sinyal untuk kegiatan strategis. Keberhasilan kinerja kegiatan ini dapat dilihat melalui indikator berupa Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan. Pada tahun 2021 terdapat satu kali pengamanan sinyal untuk kegiatan strategis yaitu pengamanan kunjungan Wakil Presiden Indonesia. Sehingga capaian kinerja sebesar 100%.

Gambar 3.1. Aktivitas Pengamanan Sinyal Kegiatan Strategis



1.2.1. Sub Kegiatan Pelaksanaan Analisis Kebutuhan Dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Indikator kinerjanya adalah Jumlah PD yang dilakukan asesment Tingkat Kematangan Keamanan Informasi dan Persandian, Assment dan evaluasi ini dilakukan untuk mengukur tingkat kesiapan (tingkat kematangan dan tingkat kelengkapan) Perangkat Daerah dalam menerapkan keamanan informasi berdasarkan kriteria SNI ISO/IEC 27001 yang terdiri dari aspek tata kelola, pengolahan risiko, kerangka kerja, pengelolaan asset, dan teknologi. Pada Tahun 2021 telah dilakukan 7 assesment terhadap perangkat daerah sesuai dengan target kinerja. Assesment dan evaluasi dilakukan terhadap:

- 1) Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan dan Perpustakaan.
- 2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- 3) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- 4) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- 5) Satpol PP dan Damkar
- 6) Inspektorat.
- 7) Kantor Kesatuan Bangsa
- 8) BPBD.

Sehingga capain kinerja mencapai 100%.

1.2.2. Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Indikator kegiatan adalah jumlah layanan kemanan informasi yang dilakukan dengan target pada tahun 2021 adalah 4 layanan dan direalisasikan 4 layanan terdiri dari layanan Pentest, layanan Penerbitan Sertifikat Elektronik, Layanan Jamming dan faslitasi e-mail dinas. Capaian sub kegiatan 100%.

B. Urusan Komunikasi dan Informatika

Dalam penyelenggaraan urusan Komunikasi dan Informatika pada Dinas Komunikasi, Infomatika, Kearsipan dan Perustakaan Kota Cimahi dilaksanakan oleh Bidang Penyelenggaraan e-Government dan Persandian serta Bidang Informasi dan Komunikasi Pubik dan Statistik.

Pencapaian sasaran penyelenggaraan urusan Komunikasi dan Informatika disajikan dalam tebel sebagai berikut:

Tabel 3.4. Pencapaian Target Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan Dan Perpustakaan Urusan Komunikasi dan Infomatika Tahun 2021

Esselon	Sasaran	INDIKATOR	INDIKATOR KINERJA		
			TARGET	REALISASI	CAPAIA N (%)
II	Meningkatnya tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik	Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	3,18	2,75	86%
III	Meningkatkan penyelenggaraan e-Government	Cakupan Pengembangan E-Government Daerah;	50 Persen;	91 Persen	182%
III	Terlaksananya penyelenggaraan domain dan sub-domain Pemerintah Kota Cimahi	Prosentase perangkat daerah yang menggunakan domain cimahikota.go.id	86 Persen	96,85 Persen	112%
IV	Terlaksananya layanan jaringan intra Pemerintah Kota Cimahi	Prosentase cakupan layanan infrastruktur jaringan TIK	86 Persen	100 Persen	116%
III	Meningkatnya layanan TIK	Prosentase cakupan layanan TIK;	50 Persen;	91 Persen	182%
IV	Terlaksananya pengelolaan pusat data	Level Pengoperasian Pusat Data;	2 Level;	3 Level	150%
IV	Terlaksananya pengembangan sistem yang memudahkan integrasi layanan antar sistem pemerintahan berbasis elektronik	Prosentase aplikasi yang dikelola	80 Persen	90 Persen	100%
IV	Terlaksananya pengembangan Cimahi Kota Cerdas	Jumlah aktivitas pengembangan kota cerdas	2 aktivitas	2 aktivitas	100%
III	Meningkatnya informasi dan komunikasi publik yang efektif dan efisien	Cakupan layanan informasi pemerintahan daerah	60 Persen	60 Persen	100%
III	Meningkatnya kualitas komunikasi antara pemerintah dan masyarakat	Peresentase analisis berita yang berkonten positif	80 persen	82,5 persen	149%
IV	Terlaksananya layanan informasi dan pengaduan masyarakat	Peosentase permintaan layanan informasi dan pengaduan yang ditindaklanjuti	50 persen	74,74 Persen	100%

Esselon	Sasaran	INDIKATOR	INDIKATOR KINERJA		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
IV	Tertindakannya publikasi penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui berbagai media	Jumlah publikasi pemerintahan	4.330 Publikasi	4.449 Publikasi	103%
IV	Tertindakannya komunikasi antara pemerintah dan masyarakat	Jumlah berita pada website dan media lainnya	600 berita	1.297 berita	216%

Urusan Komunikasi dan Informatika terdiri dari Program Pengelolaan Aplikasi Informatika dilaksanakan oleh Bidang Penyelenggaraan e-Government dan Persandian dan Program Informasi dan Komunikasi Publik diselenggarakan oleh Bidang Informasi dan Komunikasi Publik dan Statistik. Secara terperinci dapat diuraikan pencapaian kinerja urusan Komunikasi dan Informatika yang dilaksanakan selama tahun anggaran 2001 sebagai berikut:

Pada Tahun 2020 diterbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang mencabut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 yang sebelumnya digunakan sebagai pedoman evaluasi SPBE.

Terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 59 Tahun 2020 ini adalah untuk mengakomodir ketentuan-ketentuan pada Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 yang sebelumnya tidak terakomodir pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 antara lain ketentuan tentang Arsitektur SPBE, Peta Rencana SPBE, Jaringan Intra Pemerintah, Sistem Penghubung Layanan, Pembangunan Aplikasi Terpadu, Keamanan SPBE, Manajemen SPBE dan Audit TIK. Dengan demikian perubahan struktur penilaian indeks SPBE yang cukup signifikan antara lain yang semula Domain SPBE berjumlah 3 menjadi 4 Domain. Semula 7 Aspek berubah menjadi 8 Aspek dan yang semula 35 Indikator menjadi 47 Indikator.

Konsep penilaian tingkat kematangan SPBE menggunakan 2 pendekatan yaitu : Kapabilitas Proses yang mengadopsi CMM, CMMI, COBIT meliputi Tingkat Kematangan Domain Kebijakan, Tata Kelola dan Manajemen dan Kapabilitas Layanan yang mengadopsi E-Gov Maturity Model yang diterapkan pada Tingkat Kematangan pada Domain Layanan.

Perubahan indikator evaluasi SPBE ini berdampak pada hasil evaluasi SPBE Pemerintah Kota Cimahi Tahun 2021 sehingga mengakibatkan penurunan dari 3,16 pada tahun 2020 menjadi 2,75 pada tahun 2021. Sehingga capaian kinerja sasaran Meningkatnya tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik

mencapai 86%. Untuk pencapaian sasaran program sampai dengan sub kegiatan secara lebih terperinci disampaikan sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

Indikator program ini adalah Cakupan Pengembangan E-Government Daerah dengan target 50 Persen realisasi pada program ini adalah 91% dengan demikian capaian kinerja untuk program Pengelolaan Aplikasi Informatika adalah 100%. Cakupan Pengembangan E-Government Daerah dihitung dengan menggabungkan kinerja layanan pengelolaan infrastruktur teknologi dengan layanan pengembangan aplikasi dan layanan TIK.

1.1. Kegiatan Pengelolaan Nama Domain Yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Indikator kinerja Kegiatan adalah prosentase perangkat daerah yang menggunakan domain cimahikota.go.id. Domain cimahikota.go.id merupakan domain resmi yang digunakan oleh Pemerintah Kota Cimahi untuk digunakan berbagai layanan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Cimahi yang berbasis TIK. Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kota Cimahi dapat memanfaatkan domain tersebut untuk mengintegrasikan data dan layanannya yang diselenggarakan secara online. Saat ini terdapat 26 Perangkat Daerah yang telah menggunakan domain cimahikota.go.id dari total 28 Perangkat Daerah sehingga realisasi kinerja kegiatan ini sebesar 96,85% sehingga capaian kinerja mencapai 100%.

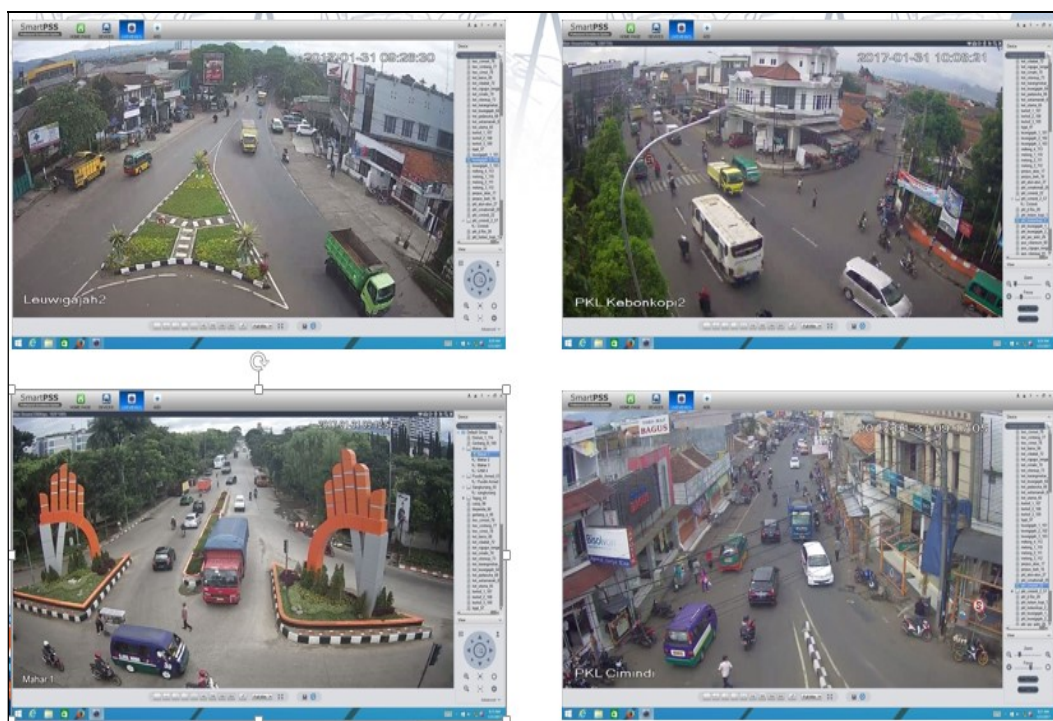
1.1.1. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Prosentase cakupan layanan infrastruktur jaringan TIK dengan target kinerja tahun 2021 86%. Infrastruktur jaringan sistem informasi pemerintah Kota Cimahi dibangun dalam rangka mengintegrasikan seluruh unit kerja di lingkungan pemerintah Kota Cimahi dalam sistem e-government Pemerintah Kota Cimahi.

Kondisi jaringan Pemerintah Kota Cimahi jalur utama (*backbone* dan tulangan) transmisi sudah mencapai ± 140 km tarikan *fiber optic* (FO), topologi jaringan wan menggunakan topologi ring terbagi menjadi 4 segmen menghubungkan DPRD, RSUD, inspektorat, BPBD, 3 kecamatan, 15 kelurahan, 13 puskesmas, perpustakaan umum, 9 upt dinas, menghubungkan 117 titik CCTV Satpol PP, Dinas Perhubungan dan CCTV pelayanan.

Pemanfaatan jaringan sampai dengan Tahun 2021 jumlah client setiap Perangkat Daerah maksimal sebanyak 255 dengan 1 gateway. Akses aplikasi e-government pemerintah kota cimahi (sipd, sipkd, simkel, e-reporting, simrenda, simpeg, absensi finger print, website, internet, dan lain-lain). Jalur komunikasi data (browsing, chatting, streaming, video conference, digital signage, transfer file dan cctv) dan Pelayanan publik (kependudukan, perizinan, Ipse, pajak dan retribusi, puskesmas). Layanan akses internet Pemerintah Kota Cimahi saat ini kapasitas *bandwidth* 1000Mbps *dedicated* . Distribusi akses internet merata ke seluruh perangkat daerah yang terhubung melalui jaringan lan dan wan serta akses wifi di gedung Pemerintah Kota Cimahi sebanyak 8 titik.

Gambar 3.2. CCTV yang terhubung melalui jaringan yang disediakan oleh Diskominfoarpus



Realisasi cakupan layanan infrastruktur jaringan mencapai 100% dengan kata lain seluruh perangkat daerah sudah terhubung infrastruktur jaringan sehingga dapat menggunakan jaringan internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan dan Perpustakaan Kota Cimahi. Capaian kinerja tercapai 100%.

Pekerjaan yang dilaksanakan dalam sub kegiatan ini adalah:

- 1) Pengelolaan dan Pemeliharaan Infrastruktur Jaringan TIK Pemerintah Kota Cimahi (Pengelolaan Jaringan LAN dan WAN)
- 2) Penyediaan Jaringan Internet Pemerintah Kota Cimahi
- 3) Penyediaan Jaringan Internet Wifi di Ruang Publik
- 4) Penyediaan Jaringan Lastmile FO Jaringan WAN Kota Cimahi

- 5) Jasa Pemeliharaan Perangkat Aktif Jaringan LAN dan WAN
- 6) Belanja Instalasi Jaringan FO dari Data Center Pemkot Ke Gedung MPP
- 7) Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum
- 8) Pengadaan pendukung kegiatan lainnya.

1.2. Kegiatan Pengelolaan E-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Pada tahun 2021 ini ditargetkan 50% cakupan layanan TIK, dalam kegiatan ini terdapat 3 sub kegiatan yang mendukung pencapaian target pada kegiatan ini. Realisasi kegiatan pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah 91% di mana capaian tersebut merupakan rata-rata capaian layanan Pengelolaan email resmi dinas (100), Pengelolaan domain dan sub domain (27 PD/ 28 PD x 100%), Pengelolaan hosting aplikasi 90%, Pendampingan pengembangan aplikasi 90%, Layanan pengembangan aplikasi 100%, layanan pemeliharaan aplikasi 100%, layanan backup database 70%, layanan backup aplikasi 70% dan layanan ticketing 95% telah terselesaikan.

Dari berbagai layanan yang telah dijelaskan dan telah diselesaikan pada tahun 2021 capaian kinerja kegiatan ini mencapai 100%.

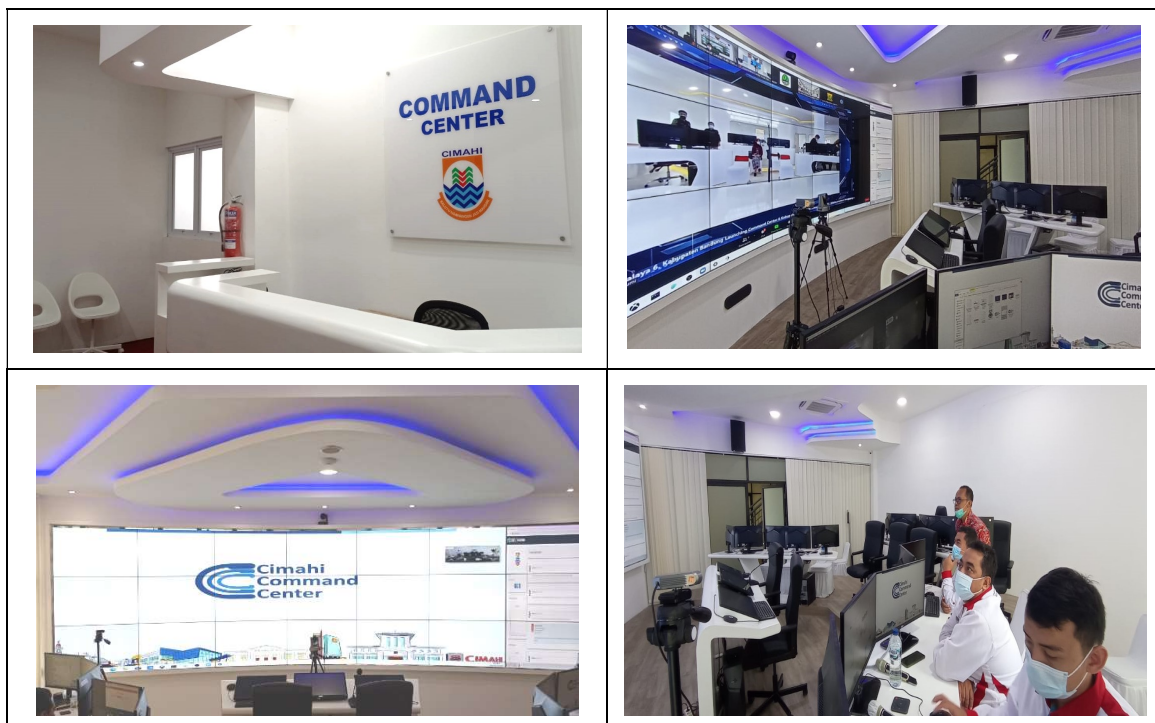
1.2.1. Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah

Level Pengoperasian Pusat Data target level 2, realisasi tingkat kematangan pengoperasian pusat data pada Pemerintah Kota Cimahi mencapai level 3 didapat dari hasil evaluasi SPBE yang telah dilaksanakan oleh Kementerian PANRb pada tahun 2021. Tingkat kematangan (*maturity*) pada level 3 memiliki arti bahwa pengoperasian pusat data sudah **terstandarisasi** proses tata kelola dilaksanakan sepenuhnya dengan standardisasi oleh semua unit organisasi terkait. Kebijakan internal telah mengatur standar proses tata kelola bagi semua unit organisasi terkait, tetapi belum mengatur keselarasan antar proses tata kelola.

Pekerjaan utama pada sub kegiatan ini terdiri dari pengelolaan data center, operasional monitoring room, perpanjangan lisensi protocol keamanan jaringan, lisensi monitoring data center dan pembangunan command center Kota Cimahi.

Pembangunan *command center* telah dilaksanakan pada Tahun 2021 dan diharapkan dapat memberikan manfaat dalam penyelenggaraan pemerintahan, menjadi pusat pengendalian pemerintahan dan menjadi tempat pengambilan kebijakan-kebijakan strategis dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan Kota Cimahi yang termonitor di *command center*.

Gambar 3.3. Command Center Kota Cimahi



1.3. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah

Indikator kinerja kegiatan ini adalah Prosentase aplikasi yang dikelola. Tujuan dari Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Tahun Anggaran 2021 adalah:

- a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sistem informasi aplikasi.
- b. Meningkatkan kualitas interoperabilitas sistem aplikasi.
- c. Melakukan pemeliharaan sistem aplikasi.
- d. Meningkatkan layanan email dan domain resmi Pemerintah Daerah Kota Cimahi.
- e. Meningkatkan layanan teknologi informasi dan komunikasi lainnya.

Indikator capaian kinerja sub kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Prosentase aplikasi yang dikelola, target sesuai dengan rencana adalah 80% sedangkan realisasi mencapai 90 % sehingga capaian kinerja 100%.

1.4. Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas

Kota Cerdas pada Tahun Anggaran 2021 menyelenggarakan kegiatan-kegiatan dalam rangka mewujudkan Kota Cimahi menjadi kota cerdas.

Ruang lingkup pelaksanaan Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas Tahun Anggaran 2021 meliputi:

- a. Penyelenggaraan Field Evaluation/Tinjauan Lapangan Program Smart City
- b. Pelaksanaan evaluasi implementasi program smart city
- c. Pelaksanaan pameran smart city/smart city expo
- d. Riset dan Rating Transformasi Digital dan Kota Cerdas Indonesia (RTDI&RKCI)

Target kinerja sub kegiatan Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas di tahun 2021 adalah Jumlah aktivitas pengembangan kota cerdas dengan target 2 aktivitas dan terealisasi 4 aktivitas sehingga capaiannya mencapai 100%.

Pada tahun 2021 Kota Cimahi dalam penilaian hasil evaluasi implementasi *smart city* yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika memperoleh hasil positif. Nilai bobot berada pada urutan 7 besar dan memperoleh penghargaan atas implementasi program *smart city* dengan kategori *Smart Economy*.

Gambar 3.4. Penerimaan penghargaan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika atas implementasi program *smart city* dengan kategori *Smart Economy*.



Sedangkan pada ajang Rating Transformasi Digital dan Kota Cerdas Indonesia (RTDI&RKCI) dengan penyelenggara Pusat Inovasi Komunitas dan Kota Cerdas ITB yang didukung Sekretariat Wakil Presiden memperoleh penghargaan 5 besar dalam 3 kategori.

Gambar 3.5. Capaian Pemerintah Kota Cimahi dalam Rating Transformasi Digital dan Kota Cerdas Indonesia



2. Program Informasi dan Komunikasi Publik.

Program Informasi dan Komunikasi Publik, diselenggarakan oleh Bidang Informasi, Komunikasi Publik dan Statistik, di dalamnya terdiri dari 1 kegiatan dan 3 sub kegiatan yang secara struktural dilaksanakan oleh Seksi Publikasi dan Dokumentasi dan Seksi Layanan Informasi. Indikator kinerja Program Informasi dan Komunikasi Publik di Tahun 2021 adalah Cakupan layanan informasi pemerintahan daerah dengan target 60 %, saat ini layanan informasi pemerintahan daerah diselenggarakan melalui berbagai sub kegiatan dan berbagai kanal publikasi. Kanal yang digunakan dalam publikasi untuk menyampaikan informasi pemerintahan daerah antara lain, website resmi <https://cimahikota.go.id>, media cetak, media online dan media social. Dengan adanya berbagai media yang digunakan dalam menyampaikan berbagai informasi pembangunan daerah dapat lebih efektif dan dapat menjangkau berbagai lapisan masyarakat. Realisasi Cakupan layanan informasi pemerintahan daerah pada tahun 2021 sebesar 60% sehingga capaian kinerja Program Informasi dan Komunikasi Publik mencapai 100%.

2.1. Kegiatan Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Target Indikator kegiatan ini adalah Persentase analisis berita yang berkonten positif, untuk mengetahui berita berkonten positif atau negatif dilakukan analisis

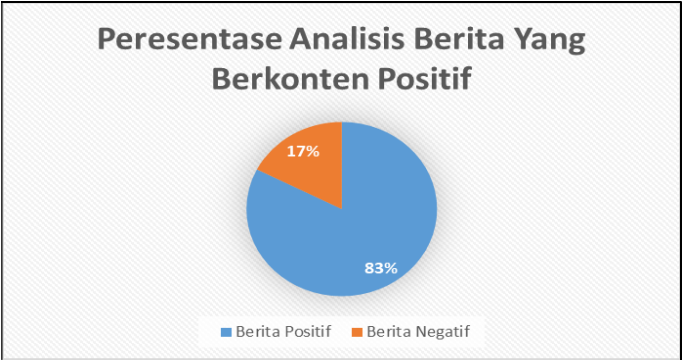
berita terhadap artikel atau berita dari berbagai media. Analisi berita yang dilakukan pada tahun 2021 ini dilaksanakan terhadap 10 media massa cetak local dan nasional. Suatu berita dikategorikan sebagai berita positif apabila peliputan media membuat pembaca mendukung, merekomendasikan, dan/atau bersedia bekerjasama dan menyampaikan berita positif tentang pembangunan pemerintah daerah yang dilaksanakan sedangkan berita negatif Peliputan media membuat pembaca tidak mau mendukung dan bekerjasama dalam program pemerintah. Dari hasil analisis berita yang dilaksanakan pada Tahun 2021 berita positif yang dianalisis sebanyak 1.153 berita, berita negatif sebanyak 244 berita, dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 3.5. Banyaknya Analisis Berita di Kota Cimahi Tahun 2021

Analisis Berita	Bulan												Jumlah
	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	
Berita Positif	62	68	74	116	107	61	91	99	160	98	121	96	1.153
Berita Negatif	25	23	17	34	38	26	15	8	12	25	17	4	244
Jumlah Berita	87	91	91	150	145	87	106	107	172	123	138	100	1.397

Kesimpulan hasil analisis berita pada Tahun 2021, 82,5% hasil analisis berita bersifat positif sedangkan target tahun 20021 80 % berita berkonten positif sehingga capaian kinerja kegiatan Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mencapai 100%.

Grafik 3.1. Hasil Analis Berita Tahun 2021



2.1.1. Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik

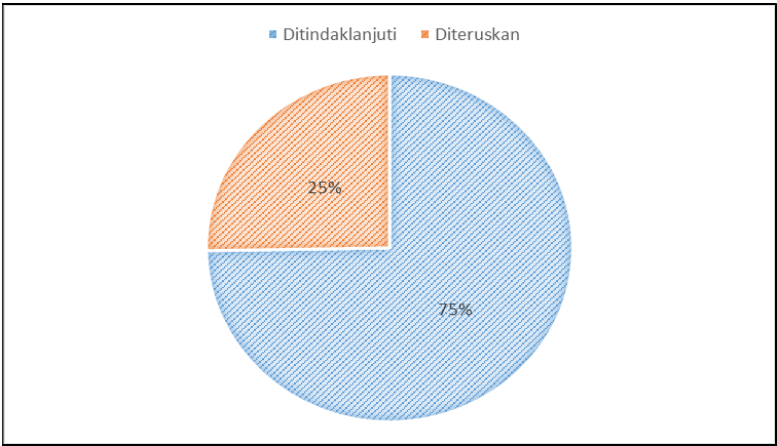
Sub kegiatan Pelayanan Informasi Publik melaksanakan kegiatan peningkatan pelayanan komunikasi dan pengelolaan informasi daerah. Target kinerja sub kegiatan ini adalah Peosentase permintaan layanan informasi dan pengaduan yang ditindaklanjuti dengan target 50% realisasi 74,4%. Selama tahun 2021 terdapat 99 permintaan layanan infromasi dan pengaduan, dari jumlah tersebut 74 ditindaklanjuti dan 25 diteruskan. Seluruh permohonan infromasi dan

pengaduan diproses sesuai dengan SOP yang ada, selanjutnya pengaduan diteruskan kepada dinas teknis untuk ditindaklanjuti sesuai dengan tupoksi dan kewenangannya. Secara prosentase sebesar 74,4% pelayanan informasi dan pengaduann telah ditindaklanjuti, capaian kinerja ini melebihi target yang ditetapkan dalam perencanaan yaitu 50% sehingga capaian kinerja mencapai 100%

Tabel 3.6. Permintaan Layanan Informasi dan Pengaduan Yang Ditindaklanjuti Tahun 2021

No	Bulan	Ditindaklanjuti	Diteruskan
1	Januari	6	2
2	Februari	2	6
3	Maret	3	0
4	April	6	1
5	Mei	4	2
6	Juni	6	2
7	Juli	11	0
8	Agustus	11	0
9	September	7	0
10	Oktober	8	1
11	November	0	6
12	Desember	10	5
Jumlah		74	25

Grafik 3.2 Prosentase Permintaan Layanan Informasi dan Pengaduan Yang Ditindaklanjuti Tahun 2021



Pada tahun 2021 telah dilaksanakan Monitoring, evaluasi dan pemeringkatan Keterbukaan Infromasi Badan Publik Tahun 2021. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Tim Penilaian Independen Monev Keterbukaan Infromasi Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Melalui Monev 2021 ini, untuk memperoleh gambaran sebagai berikut:

Pertama, penerapan UU KIP terkait informasi publik pada masa pandemi terhadap Badan Publik di Jawa Barat khususnya Pemda Kab/Kota.

Kedua, memberikan dorongan kepada Badan Publik untuk lebih transparan dan akuntabel terkait pelaksanaan penerapan UU Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi pada masa pandemi.

Ketiga, memenuhi hak atas informasi masyarakat dalam mewujudkan negara yang menjunjung demokrasi yang sehat.

Keempat, mendorong partisipasi masyarakat dalam mencegah informasi hoak pada masa pandemi.

Hasil Monitoring, Evaluasi, dan Pemeringkatan Penerapan Keterbukaan Informasi Publik Pada Badan Publik di Jawa Barat Tahun 2021 nilai yang dicapai oleh Pemerintah Kota Cimahi 74,91%, nilai tersebut menunjukkan predikat Menuju Informatif.

2.1.2. Sub Kegiatan Layanan Hubungan Media.

Tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaa sub kegiatan Layanan Hubungan Media adalah Menyebarkan informasi (publikasi) pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di Kota Cimahi selama Tahun Anggaran 2021 melalui kerjasama dengan media dan memenuhi hak masyarakat untuk memperoleh Informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui publikasi. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman, pengetahuan dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah Kota Cimahi bahwa pelaksanaan pembangunan dilaksanakan demi mencapai kesejahteraan rakyat.

Target kinerja sub kegiatan Layanan Hubungan Media adalah Jumlah publikasi pemerintahan dengan target 4.330 publikasi

Publikasi dilakukan melalui:

- 1) Televisi/Radio.
- 2) Advertorial.
- 3) Publikasi media online.
- 4) Iklan Display.
- 5) Iklan Advertorial

Selama tahun 2021 Jumlah publikasi yang dilaksanakan sebanyak 4.449 Publikasi, dengan demikian capaian tersebut melampaui target yang ditetapkan sebelumnya sebanyak 4.330 publikasi dengan demikian capaian kinerja pada sub kegiatan Layanan Hubungan Media pada tahun 2021 sebesar 100%.

Tabel 3.7. Rekapitulasi Bulanan Publikasi Tahun 2021

NO.	BULAN	Jumlah Publikasi
1	JANUARI	252 publikasi
2	PEBRUARI	381 publikasi
3	MARET	403 publikasi
4	APRIL	448 publikasi
5	MEI	390 publikasi
6	JUNI	288 publikasi
7	JULI	430 publikasi
8	AGUSTUS	340 publikasi
9	SEPTEMBER	411 publikasi
10	OKTOBER	348 publikasi
11	NOVEMBER	338 publikasi
12	DESEMBER	420 publikasi
Jumlah		4.449 blikasi

2.1.3. Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik

Kegiatan yang dilaksanakan dalam sub kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik meliputi:

- 1) Pembuatan naskah sambutan.
- 2) Pengelolaan konten website <https://www.cimahikota.go.id> dalam bentuk modul berita, video dan lainnya.
- 3) Pengelolaan konten website <https://covid19.cimahikota.go.id> modul berita, infografis.
- 4) Pembuatan bahan publikasi melalui media sosial : Instagram (@cimahikota) dan Facebook (Pemerintah Kota Cimahi).

Indikator kinerja Sub Kegiatan Pengelolaan Media Publik Jumlah berita pada website dan media lainnya, target pada tahun 2021 adalah 600 berita, selama tahun 2021 berita yang dibuat dan disampaikan dalam website resmi dan media lainnya (Media social, instragam, facebook dan twitter) sebanyak 1.297 konten atau berita. Sehingga capaian kinerja melebihi target yang ditetapkan 100%

Tabel 3.8. Rincian Berita Pada Website Dan Media Lainnya Tahun 2021

No	Publikasi	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jml
1	Artikel	6	9	35	38	38	4	9	8	7	6	13	6	179
2	Berita	17	35	100	25	2	33	35	30	29	31	31	21	389
4	Medsos	66	36	69	84	66	61	87	81	46	53	57	7	713
5	Video	0	0	0	0	3	2	2	2	3	0	0	4	16
Jumlah		23	44	135	63	40	37	44	38	36	37	44	27	1.297

C. Urusan Statistik

Penyelenggaraan urusan wajib Statistik pada Dinas Komnuikasi Infromatika Kearsipan dan Perpustakaan Kota Cimahi diselenggarakan oleh Bidang Infromasi Komunikasi Publik dan Statistik dan secara teknis dilaksanakan oleh Seksi Statistik pada tingkat eselon IV. Untuk menyelenggarakan satu urusan apabila dilihat dari beban pekerjaan dan rentang kendali yang hanya dilaksnakan oleh tingkat eselon IV masih belum optimal, demikian juga dukungan anggaran yang dialokasikan untk menyelenggarakan urusan statistik. Anggaran yang dialokasikan pada tahun 2021 untuk menyelenggarakan urusan statistik sebesar Rp.258.061.400. Namun demikian dengan segala keterbatasan tersebut pencapaian target penyelenggaraan urusan statistik secara umum dapat dicapai dengan baik. Berikut capaian sasaran urusan ststitik:

Tabel 3.9. Pencapaian Target Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan Dan Perpustakaan Urusan Statistik

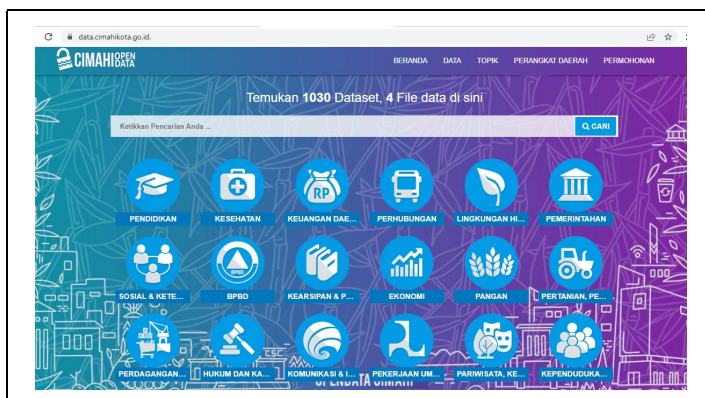
ESELON	SASARAN	INDIKATOR	INDIKATOR KINERJA		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
II		Persentase Perangkat daerah yang telah melakukan integrasi data statistik sektoral	80 Persen	80 Persen	100%
III	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase ketersediaan data statistik daerah	65 Persen;	71,42 Persen;	110%
III	Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral Di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah publikasi Data Statistik Kota Cimahi;	2 PUBLIKASI	2 PUBLIKASI	100%
		Jumlah data sektoral pada basis data Pemerintah Kota Cimahi;	200 dataset	200 dataset	100%
IV	Meningkatnya koordinasi pengembangan data/informasi/statistik daerah	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan dengan perangkat daerah/instansi/lembaga/unit kerja	2 kali	2 kali	100%
IV	Meningkatnya SDM pengelola data/statistik.	Jumlah SDM pengelola data/statistik/informasi yang mengikuti pelatihan/pembinaan/pendidikan	60 Orang;	60 Orang;	100%

1. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan urusan statistik adalah memastikan ketersediaan data statistik daerah sebagai bahan anlisis untuk mendukung pengambilan kebijakan-kebijakan strategis dan mengukur tingkat keberhasilan pembangunan yang telah dilaksanakan. Ketersediaan data statistik daerah dangat bergantung dari peran aktif seluruh perangkat daerah dalam melakukan pengisian dan pemutakhiran data statistik yang berkaitan dengan sektor masing-masing. Dalam melaksanakan Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral ini didukung oleh satu sub kegiatan dan dua sub kegiatan dengan

jumlah anggaran sebesar Rp., Dapat dikatakan anggaran yang dialokasikan pada tahun 2021 untuk menyelenggarakan urusan statistik masih jauh dari cukup sehingga dukungan anggaran masih belum optimal. Namun dengan segala keterbatasan berbagai upaya dan terobosan telah dilakukan agar ketersediaan data statistik dapat mencapai target yang telah ditetapkan salah satunya dengan membangun portal open data berupa aplikasi berbasis web yang berfungsi untuk menyediakan dan mempublikasikan data statistik sektoral Pemerintah Kota Cimahi.

Gambar 3.6. Tampilan layar aplikasi Open Data



Indikator kinerja Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral adalah Persentase ketersediaan data statistik daerah dengan target 65 Persen di tahun 2021. Pada Tahun 2021 terdapat 20 Perangkat Daerah yang sudah melengkapi data statistik sektoral dari total 28 Perangkat Daerah, sehingga apabila dihitung Prosentase ketersediaan data statistik daerah sebesar 71,42% sehingga capaian kinerja mencapai 100%.

1.1. Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral Di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota.

Terdapat dua indikator kinerja dalam kegiatan ini yaitu Jumlah publikasi Data Statistik Kota Cimahi target 2 Publikasi dan Jumlah data sektoral pada basis data Pemerintah Kota Cimahi dengan terget 200 dataset.

Publikasi yang dilakukan selama tahun 2021 terdiri dari 2 publikasi yaitu:

- 1) Buku Data Statistik Sektoral Kota Cimahi, buku ini berisi Data Statistik Sektoral dari seluruh perangkat daerah di lingkup Pemerintah Kota Cimahi.
- 2) Survey Persepsi Warga Kota Cimahi terkait Pencapaian Pembangunan di Kota Cimahi dan jelang Pilkada Serentak Mendatang.

Gambar 3.7 Publikasi Buku Data Statistik Sektor Kota Cimahi



Gambar 3.8 Publikasi Survei Persepsi Warga Kota Cimahi



Sedangkan realisasi kinerja untuk indikator Jumlah data sektoral pada basis data Pemerintah Kota Cimahi dilaksanakan sesuai dengan target yaitu 200 dataset yang dipublikasikan dalam aplikasi opendata sehingga capaian kinerja baik indikator Jumlah publikasi Data Statistik Kota Cimahi maupun Jumlah data sektoral pada basis data Pemerintah Kota Cimahi mencapai 100%.

1.1.1. Sub Kegiatan Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis Dan Diseminasi Data Statistik Sektoral.

Sub kegiatan ini melaksanakan pekerjaan utama melaksanakan sinkronisasi Pengumpulan, pengolahan analisis dan diseminasi statistik sektoral di Kota Cimahi. Koordinasi yang dilaksanakan meliputi koordinasi secara internal antar perangkat daerah dan koordinasi yang dilaksanakan secara eksternal baik ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pusat maupun lembaga teknis (Badan Pusat Statistik).

Terdapat 18 Sektor yang secara terus menerus setiap tahun dipenuhi ketersediaan datanya melalui survey statistik, ke 18 sektor tersebut terdiri dari:

Tabel 3.10 Survei Statistik Sektoral yang dilaksanakan selama tahun 2021

NO	SURVEI
1	Sektor Pendidikan
2	Sektor Pertanian
3	Sektor Kesehatan
4	Sektor Keuangan Daerah
5	Sektor Kependudukan
6	Sektor Perhubungan
7	Sektor Lingkungan Hidup
8	Sektor Hukum
9	Sektor Pemerintahan
10	Sektor Sosial dan Ketenagakerjaan
11	Sektor Pekerjaan Umum
12	Sektor Bencana
13	Sektor Pariwisata dan Kebudayaan
14	Sektor Komunikasi dan Informatika
15	Sektor Kearsipan dan Peprustakaan
16	Sektor Ekonomi
17	Sektor Pangan
18	Sektor Perdagangan

Jumlah koordinasi yang dilaksanakan dengan perangkat daerah/ instansi/ lembaga/ unit kerja pada tahun 2021 adalah 2 koordinasi sehingga capaian kinerja mencapai 100%.

1.1.2. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Pemda Dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah Yang Terintegrasi

Tujuan penyelenggaraan sub kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kapasitas Sumber Daya Pengelola statistik baik internal maupun yang berada di setiap Paerangkat Daerah. Pada tahun 2021 dilakanakan 2 kali kegiatan peningkatan kapasitas pegawai dengan sasaran pengelola statistik di Perangkat Daerah. Kegiatan tersebut terdiri dari:

- 1) Pelatihan Pengolahan Data, dalam pelatihan tersebut diharapkan peserta dapat melakukan pengolahan data statistik untuk keperluan analisis dengan menggunakan aplikasi pengolah data sederhana.
- 2) Pelatihan teknis survey, tujuan dari pelaksanaan pelatihan ini adalah bertambahnya kemampuan dan pengetahuan tentang teknis pelaksanaan

survey dengan menggunakan kaidah-kaidah dan metode survey sehingga hasil survey yang akan dilakukan nantinya memiliki kualitas dan dapat dapat digunakan untuk berbagai keperluan pengambilan kebijakan.

Jumlah SDM pengelola data/statistik/informasi yang mengikuti pelatihan/ pembinaan/ pendidikan sebanyak 60 orang sesuai dengan target yang direncanakan sehingga capaian kinerja mencapai 100%.

D. Bidang Perpustakaan

Pada Tahun 2021, seluruh aktivitas dan layanan bidang Perpustakaan masih menggunakan protokol covid-19. Pada bulan Juli – Agustus 2021, layanan Perpustakaan Umum ditutup karena penyebaran covid-19 mencapai titik maksimum, seluruh pegawai diberlakukan *WFH* dan banyak dari pegawai yang terpapar covid-19. Target kinerja dan anggaran Bidang Perpustakaan sebagaimana pada Tabel 3.3.

Tabel 3.11. Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan Kota Cimahi Tahun 2021

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA 2021		CAPAIAN (100%)
		TARGET	REALISASI	
Meningkatnya akses membaca masyarakat	Persentase Peningkatan Pemustaka Aktif	1,07 Persen	181, 34 Persen	100%
Meningkatnya layanan perpustakaan daerah	Tingkat kepuasan pengunjung perpustakaan umum kota	78,80	80,32	100%
Meningkatnya kunjungan masyarakat ke perpustakaan daerah	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Kota Cimahi;	24.000 pengunjung	28.835 pengunjung	100%
Terlaksanya pelayanan Perpustakaan Umum daerah	Jumlah layanan perpustakaan Kota Cimahi	3 layanan	3 layanan	100%
Terlaksananya pembinaan perpustakaan	Jumlah perpustakaan Kota Cimahi yang dilakukan pembinaan	5 perpustakaan	5 perpustakaan	100%
Meningkatnya kapasitas SDM Perpustakaan	Jumlah pengelola perpustakaan Kota Cimahi yang telah dilakukan pembinaan	50 Pengelola	50 pengelola	100%
Terlaksananya Pembudayaan Gemar Membaca	Jumlah aktivitas berbasis pustaka	2 aktivitas	2 aktivitas	100%
Terlaksananya Pengembangan Literasi Membaca	Jumlah aktivitas pengembangan literasi berbasis inklusi sosial	1 aktivitas	2 aktivitas	100%
Meningkatnya budaya baca dan literasi membaca masyarakat	Jumlah aktivitas sosialisasi peningkatan gemar membaca	1 aktivitas	2 aktivitas	100%

Dengan adanya kebijakan anggaran yang difokuskan pada penanganan Covid-19 dan aktivitas yang harus memperhatikan protocol kesehatan, pada tahun 2021 hanya sedikit aktivitas bidang Perpustakaan. Beberapa aktivitas yang sebelum pandemi diselenggarakan, pada tahun 2021 masih belum dapat

dilaksanakan. Gambaran kinerja yang telah dilaksanakan di Bidang Perpustakaan sebagai berikut :

1. Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Kewajiban penyediaan bahan bacaan bagi masyarakat diselenggarakan melalui layanan Perpustakaan. Melalui perpustakaan diharapkan masyarakat dapat meningkatkan pengetahuannya melalui membaca.

1.1. Sub Kegiatan Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Perpustakaan Umum Kota Cimahi memberikan layanan kepada masyarakat sesuai dengan situasi pandemi covid-19. Secara umum layanan Perpustakaan Umum dilakukan menggunakan sistem tertutup sebagaimana yang dilakukan pada tahun 2020, dan pada situasi penyebaran virus yang sangat tinggi, layanan Perpustakaan Umum dilakukan penutupan. Layanan yang dilakukan pada masa pandemi covid-19 antara lain layanan sirkulasi, layanan referensi, dan layanan e-library. Layanan Perpustakaan keliling dan layanan Perpustakaan Kecamatan/Kelurahan tidak dilakukan karena alasan protokol kesehatan dan pengurangan anggaran.

Capain kinerja sub kegiatan ini sebagai berikut :

SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	CAPAIAN
Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan perpustakaan Kota Cimahi	3 layanan	3 layanan

Gambar 3.9. Layanan Perpustakaan Kota Cimahi Sistem Tertutup dalam Masa Pandemi Tahun 2021



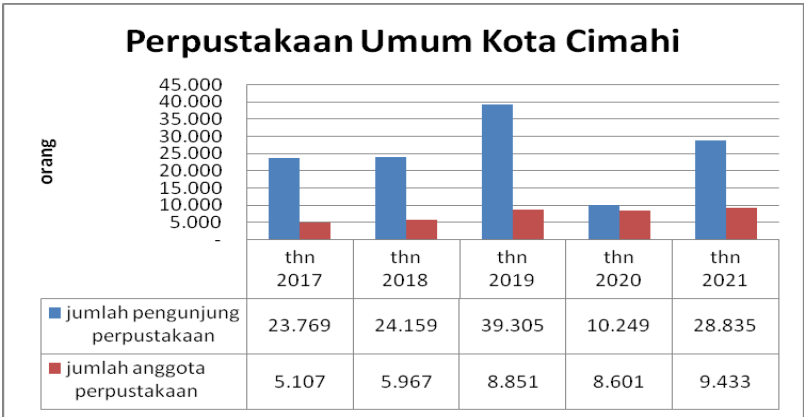
Kunjungan pemustaka Perpustakaan Umum Kota Cimahi dihitung berdasarkan jumlah kunjungan pada perpustakaan fisik dan e-library. Dibandingkan dengan tahun 2020, kunjungan pemustaka meningkat dengan diadakannya Cimahi Reading Habit (CRH) online. Data kunjungan pemustaka Perpustakaan Umum Kota Cimahi Tahun 2021, sebagai berikut :

Tabel 3.12. Banyaknya Pengunjung (Pemustaka) Perpustakaan Umum Kota Cimahi Tahun 2021

NO	BULAN	PERPUSTAKAAN FISIK		e-LIBRARY		
		PENGUNJUNG	PEMINJAM	PEMBACA	PENGAKSES	PEMINJAMAN
1	Januari	328	123	1.447	2.520	2.031
2	Februari	443	192	1.321	2.352	1.732
3	Maret	492	192	2.025	2.733	3.297
4	April	465	210	1.819	2.555	2.118
5	Mei	360	117	1.661	1.718	1.760
6	Juni	434	139	1.346	1.603	1.819
7	Juli	220	53	1.210	1.276	1.156
8	Agustus	159	48	1.931	2.350	2.153
9	September	337	111	1.657	2.016	1.464
10	Oktober	435	228	1.392	1.643	1.117
11	November	502	327	1.297	1.497	1.046
12	Desember	467	298	1.653	1.930	1.160
	JUMLAH	4642	2038	18.759	24.193	20.853

Perkembangan kunjungan pemustaka Perpustakaan Umum Kota Cimahi tahun 2017- 2021, sebagai berikut :

Grafik 3.3. Pemustaka Perpustakaan Umum Daerah Kota Cimahi Tahun 2021



Tabel 3.13. Peningkatan Pemustaka Perpustakaan Umum Kota Cimahi Tahun 2017-2021

NO	INDIKATOR	TAHUN				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Peningkatan Pemustaka	-26,95%	1,64%	62,69%	-73,92%	181,34%

Ditinjau dari fluktuasi peningkatan pemustaka Perpustakaan Umum Kota Cimahi yang cukup ekstrim, menunjukkan bahwa selama 5 tahun tersebut terjadi kejadian luar biasa atau terdapat perlakuan yang berbeda dari tahun sebelumnya.

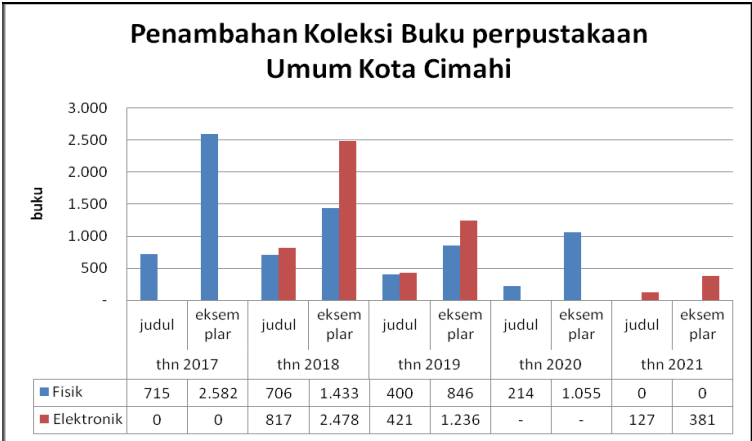
Pengadaan koleksi buku bahan bacaan perpustakaan pada tahun 2021 difokuskan pada buku elektronik (e-book) karena alasan efektivitas anggaran dan layanan, sebagai berikut :

Tabel 3.14. Pengadaan e-book Perpustakaan Umum Daerah Kota Cimahi Tahun 2021

NO	KLASIFIKASI	SUBJEK	JUMLAH	
			JUDUL	EKSEMPLAR
1	100	Filsafat, Motivasi, Psikologi	19	57
2	200	Agama	8	24
3	300	Ilmu Sosial : Ekonomi, Budaya, Politik, Hukum	16	48
4	400	Bahasa	5	15
5	500	Ilmu Murni	4	12
6	600	Ilmu Terapan	17	51
7	700	Kesenian, Olahraga	8	24
8	800	Kesusatraan	41	123
9	900	Sejarah,Biografi Dll	7	21
10	000	Karya Umum	2	6
JUMLAH			127	381

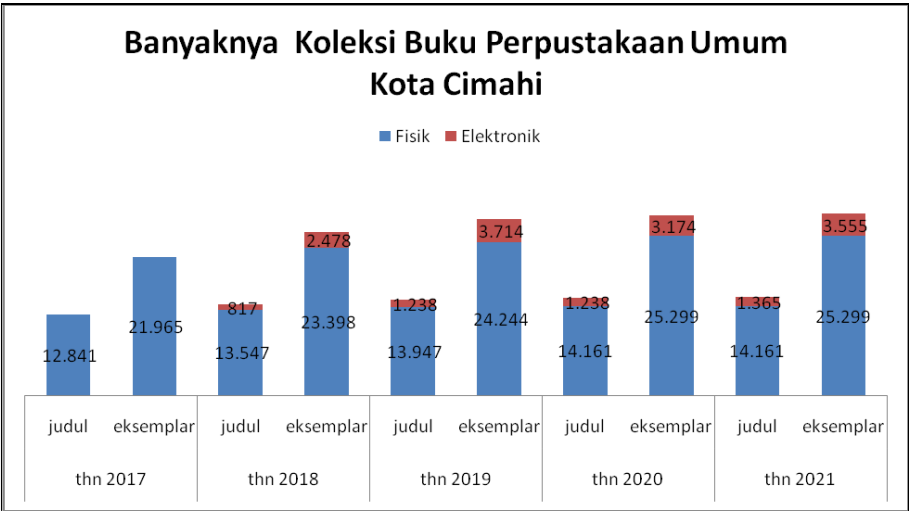
Penambahan buku koleksi Perpustakaan Umum Kota Cimahi selain dari pengadaan APBD Kota Cimahi juga mendapat bantuan dari Provinsi Jawa Barat maupun dari pihak lain/ masyarakat. Perkembangan penambahan koleksi buku Perpustakaan Umum Kota Cimahi Tahun 2017-2021 sebagai berikut :

Grafik 3.4 Penambahan Koleksi Buku Perpustakaan Kota Cimahi Tahun 2017-2021



Perkembangan jumlah koleksi buku Perpustakaan Kota Cimahi Tahun 2017-2021, sebagai berikut :

Grafik 3.5. Koleksi Buku Perpustakaan Umum Kota Cimahi Tahun 2017-2021



1.2. Sub Kegiatan Pembinaan Perpustakaan Pada Satuan Pendidikan Dasar Di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Dengan Standar Nasional Perpustakaan

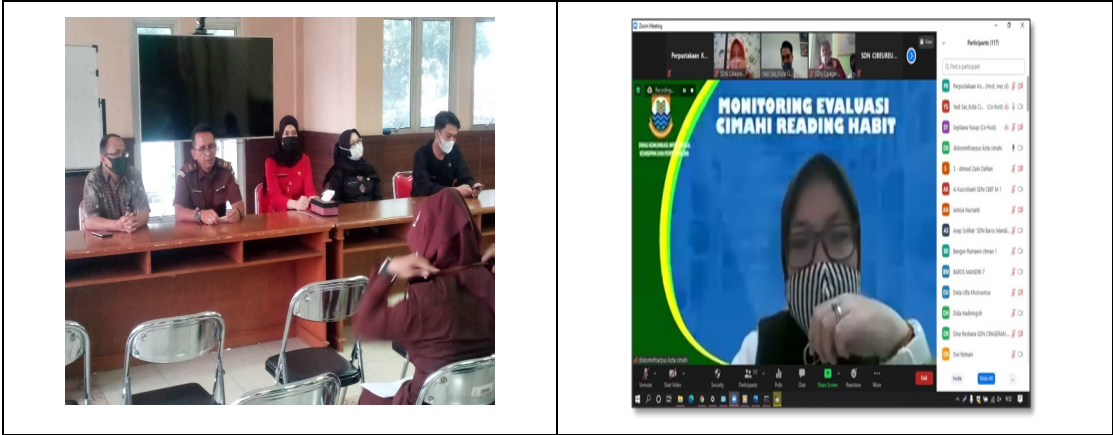
Salah satu fungsi Perpustakaan Umum Kota Cimahi adalah sebagai perpustakaan Pembina dan perpustakaan rujukan bagi perpustakaan-perpustakaan di wilayah Kota Cimahi. Capaian sub kegiatan ini sebagai berikut :

SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	CAPAIAN
Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh WilayahKabupaten/ Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah perpustakaan Kota Cimahi yang dilakukan pembinaan	5 Perpustakaan	5 perpustakaan

Pembinaan perpustakaan yang dilakukan, antara lain :

- 1) Pendampingan terhadap perpustakaan-perpustakaan sekolah dalam upaya peningkatan pengelolaan perpustakaan dan pelayanan perpustakaan, antara lain dengan memanfaatkan aplikasi inlist yang dikembangkan oleh Perpunas.
- 2) Pendampingan pengelolaan perpustakaan khusus Bagian Hukum, Sekretariat Daerah Kota Cimahi
- 3) Pendampingan pengelolaan perpustakaan khusus Kejaksaan Negeri Kota Cimahi
- 4) Evaluasi dan monitoring sekolah peserta Cimahi Reading Habit secara daring

Gambar 3.10. Aktivitas Pembinaan Perpustakaan Kota Cimahi Tahun 2021



1.3. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan

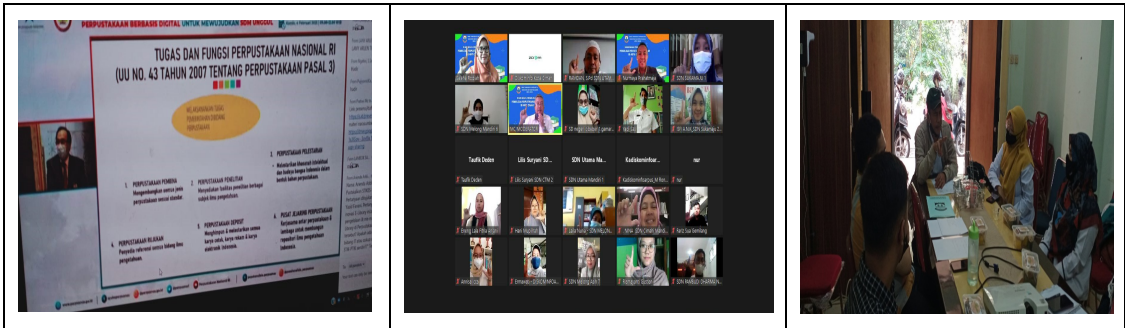
Dalam masa pandemi, peningkatan kapsitas tenaga perpustakaan dan pustakawan di Kota Cimahi dilaksanakan secara virtual/ daring. Indikator sub kegiatan ini sebagai berikut :

SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	CAPAIAN
Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengelola perpustakaan Kota Cimahi yang telah dilakukan pembinaan	50 Pengelola	50 pengelola

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) perpustakaan dilaksanakan sebagai berikut :

- 1) Mengikuti webinar yang diselenggarakan oleh Perpustakaan Nasional RI bagi tenaga perpustakaan dan pustakawan Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan dan Perpustakaan Kota Cimahi;
- 2) Menyelenggarakan bimbingan teknis bagi pengelola perpustakaan sekolah di wilayah Kota Cimahi secara daring yang diikuti oleh 50 orang pengelola perpustakaan;
- 3) Pembentukan Atpusi Kota Cimahi sebagai wadah untuk tukar pikiran dan meningkatkan kapasitas pusatakawan dan tenaga perpustakaan

Gambar 3. 11. Aktivitas Peningkatan Kapasitas SDM Perpustakaan Kota Cimahi Tahun 2021



2. Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Upaya untuk meningkatkan literasi membaca masyarakat Kota Cimahi dilakukan melalui aktivitas-aktivitas sebagai berikut:

2.1. Sub Kegiatan Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat

Capaian kinerja sub Kegiatan Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat adalah :

SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	CAPAIAN
Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah aktivitas sosialisasi peningkatan gemar membaca	1 aktivitas	2 aktivitas

Sosialisasi budaya baca dan literasi dilakukan baik kepada satuan pendidikan maupun masyarakat umum. Materi sosialisasi terutama adalah e-Library karena dalam kondisi pandemi e-Library menjadi andalan layanan Perpustakaan Umum Kota Cimahi. Pelaksanaan sosialisasi e-Library pada bulan Februari secara daring, dengan peserta seluruh pengelola perpustakaan sekolah di Kota Cimahi. Sosialisasi ini dilakukan sekaligus untuk menginformasikan bahwa aktivitas CRH (Cimahi Reading Habit) yang selama ini dilakukan menggunakan buku fisik, maka pada tahun 2021 dilakukan berbasis e-Library. Selain itu sosialisasi dilakukan juga *person-to-person* atau secara individual.

Gambar 3.11. Aktivitas Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi Membaca Kota Cimahi Tahun 2021

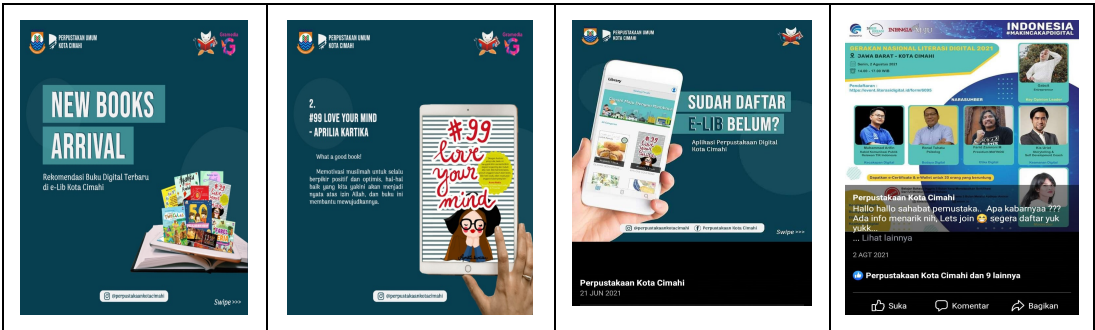


Sosialisasi secara intensif dilakukan melalui akun facebook “Perpustakaan Kota Cimahi” dan instagram “Perpustakaan Kota Cimahi”. Sosialisasi dalam bentuk penyampaian informasi tentang aktivitas-aktivitas Perpustakaan Umum Kota

Cimahi maupun resensi buku sehingga diharapkan mampu menarik minat baca masyarakat dan kemudian mengakses e-Library Kota Cimahi.

Sosialisasi literasi juga dilakukan bersinergi dengan Gerakan Nasional Literasi Digital yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan sasaran masyarakat Kota Cimahi.

Gambar 3.13 Sosialisasi Budaya Baca dan Lietrasi Membaca Melalui Media Sosial Kota Cimahi Tahun 2021



2.2. Sub Kegiatan Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial

Indikator kinerja sub Kegiatan Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial adalah :

SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	CAPAIAN
Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah aktivitas pengembangan literasi berbasis inklusi sosial	1 aktivitas	2 aktivitas

Beberapa aktivitas dalam Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial dilakukan melalui pelaksanaan Cimahi Reading Habit, monitoring dan lomba-lomba.

1) Cimahi Reading Habit (CRH)

Pada awalnya CRH dillakukan secara manual atau berbasis buku fisik, dengan sasaran siswa tingkat SD. *Reward* atau penghargaan diberikan berupa *menchandise* berupa peralatan sekolah bagi siswa yang telah menyelesaikan membaca berdasarkan level pencapaian membaca.

Pada situasi pandemi, CRH bermutasi menjadi CRH Online berbasis e-Library. CRH Online diikuti oleh siswa SD dan SMP. Selain hadiah, penghargaan kepada peserta diberikan dalam bentuk piagam. Rekapitulasi jumlah peserta penerima piagam program CRH Online tingkat SD dan SMP sampai dengan 31 Desember 2021:

Tabel 3.15 Rekapitulasi Penerimaan Piagam CRH Online Tahun 2021

NO	Piagam	JUMLAH
1	Pioneer (5 Buku)	1036
2	Bronze (10 Buku)	215
3	Silver (15 Buku)	130
4	Gold (20 Buku)	66
5	Platinum (25 Buku)	46
6	Champion (30 Buku)	32
7	Ultimate (>30 Buku)	22

Selanjutnya, pemberian hadiah disesuaikan pula dengan kondisi pandemi yaitu dalam bentuk piala dan pulsa. Dengan hadiah berupa pulsa diharapkan menambah semangat siswa untuk membaca melalui e-Library.

Gambar 3.14. Aktivitas Penyerahan Hadiah Pemenang Cimahi Reanding Habit Kota Cimahi Tahun 2021



Untuk menarik minat membaca, program CRH Online setiap bulan diberikan nama yang berbeda sesuai dengan tema bulan.

Gambar 3.15. Flyer Cimahi Reading Habit Kota Cimahi Tahun 2021





2) Lomba Bercerita

Dalam rangka meningkatkan minat dan budaya baca masyarakat Kota Cimahi terutama bagi kelompok usia sekolah dasar, diselenggarakan Lomba bercerita untuk tingkat Sekolah Dasar (SD) / Madrasah Ibtidaiyah (MI) se-Kota Cimahi. Kegiatan dilaksanakan secara online sejak pendaftaran sampai dengan tingkat seleksi, sebagai berikut :

- 1) Pendaftaran sekaligus pengiriman video bercerita dilakukan secara daring/*online* melalui link <https://bit.ly/lombaceritacimahi2021>
- 2) Tahap seleksi diikuti oleh seluruh peserta sebanyak 76 siswa berdasarkan video bercerita yang dikirimkan.
- 3) Untuk masuk ke babak final, dilakukan penilaian oleh Tim Juri yang terdiri dari perwakilan dari komunitas Hayu Maca dan Kampung Dongeng Cimahi, serta unsur PNS Dinas Komunikasi, Informatika Kearsipan, dan Perpustakaan Kota Cimahi.
- 4) Penilaian pada babak final dilakukan secara tatap muka (*offline*) terhadap 6 peserta terbaik yang telah dinilai sebelumnya pada tahap seleksi.

Tabel 3.16. Pemenang Lomba Bercerita Kota Cimahi Tingkat Sekolah Dasar Kota Cimahi Tahun 2021

NO	NAMA SISWA	NAMA SEKOLAH	JUARA
1	Freya Anindhita Nareswari	SD Hikmah Teladan	I
2	Ivana Priscila	SDK BPK Penabur	II
3	Eleazar Manahaim Sinaga	SDK BPK Penabur	III
4	Dea Camelia Razaq	SD Plus Nurul Aulia	Harapan I
5	Althaf Kaysan Firjatullah	SDN Cimahi Mandiri 1	Harapan 2

Gambar 3.16 Aktivitas Lomba Bercerita Kota Cimahi Tahun 2021



2) Lomba Perpustakaan Sekolah

Pembinaan terhadap perpustakaan di wilayah Kota Cimahi dilakukan melalui monitoring dan penilaian terhadap perpustakaan sekolah tingkat sekolah dasar (SD), sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP) dan sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA). Monitoring dilakukan melalui pengisian instrument monitoring perpustakaan pada tahun 2020 dan selanjutnya dilakukan penilaian berdasarkan hasil pengisian instrument dan verifikasi ke perpustakaan sekolah oleh Tim Penilai. Pada tahun 2021 dilakukan penilaian lanjutan berdasarkan hasil pemaparan secara daring/ *online* oleh pengelola perpustakaan sekolah. Tim Penilai terdiri dari unsur akademisi Jurusan Perpustakaan Universitas Padjadjaran dan perwakilan dari komunitas membaca, Hayu Maca. Urutan peringkat kualitas perpustakaan sekolah terbaik di Kota Cimahi, sebagai berikut :

a. Tingkat Sekolah Dasar

NO	NAMA	PERINGKAT
1	SDN Baros Mandiri 1	I
2	SDK BPK Penabur	II
3	SD Plus Nurul Aulia	III
4	SDN Cimahi Mandiri 1	Harapan I
5	SDN Cibeber Mandiri 2	Harapan II
6	SDN Utama Mandiri 1	Harapan III

b. Tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama

NO	NAMA	PERINGKAT
1	SMPN 6 Cimahi	I
2	SMPN 4 Cimahi	II
3	SMPN 10 Cimahi	III
4	SMPN 9 Cimahi	Harapan I
5	SMPK BPK Penabur	Harapan II
6	SMPN 11 Cimahi	Harapan III

c. Tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas

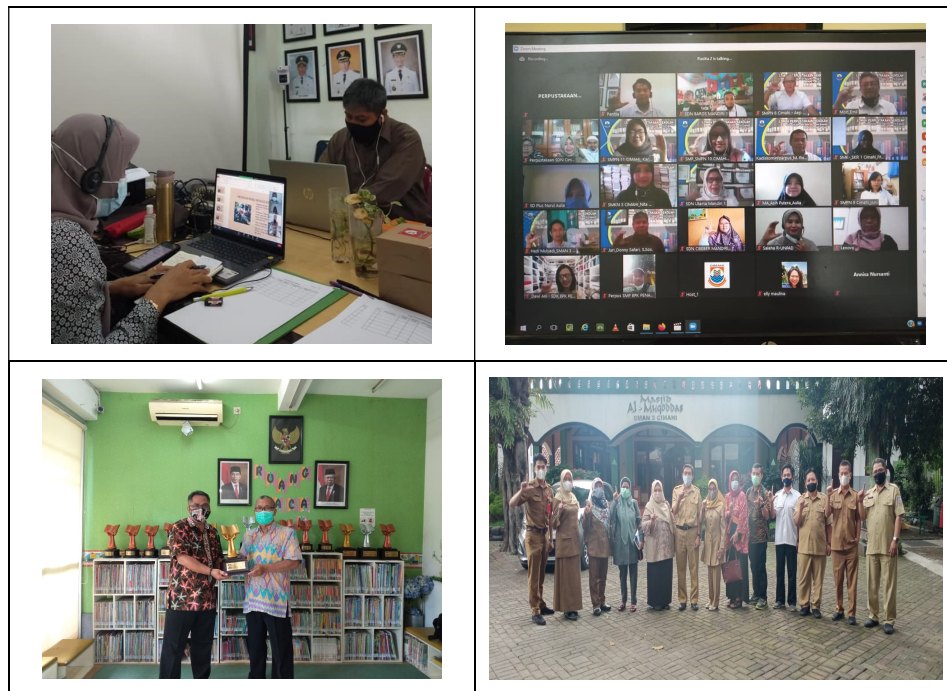
NO	NAMA	JUARA
1	SMAN 3 Cimahi	I
2	SMKN 3 Cimahi	II
3	MA Asih Putera	III
4	SMK Sangkuriang 1	Harapan I
5	SMA Pasundan 1	Harapan II
6	SMAN 5 Cimahi	Harapan III

3) **Lomba Perpustakaan Sekolah Tingkat SLTA se-Jawa Barat**

Penilaian perpustakaan sekolah tingkat SLTA di wilayah Provinsi Jawa Barat diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Barat, sebagai upaya pembinaan perpustakaan tingkat SLTA di wilayah Jawa Barat. Hasil penilaian disampaikan melalui surat Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Barat nomor : 3151/PUS.05.01.03/BPBGGM Tahun 2021, hal pemenang lomba perpustakaan sekolah /madrasah SLTA (SMA, SMK, MA, MAK) Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2021, SMAN 3 Cimahi mendapatkan peringkat Harapan II, sebagai berikut :

NO	NAMA	NILAI	PERINGKAT
1	SMKN 2 Ciamis	933	I
2	SMAN 1 Ciamis	910	II
3	SMKN 6 Bandung	865	III
4	MAN 2 Ciamis	736	Harapan I
5	SMAN 3 Cimahi	712	Harapan II
6	SMKN Pacet Cianjur	700	Harapan III
7	SMAN 1 Ciwidey	690	Favorit

Gambar 3.17. Aktivitas Pengembangan Literasi Kota Cimahi Tahun 2021



E. URUSAN KEARSIPAN

Capaian kinerja utama Dinas Komunikasi Informatika Kearsipan dan Perpustakaan Kota Cimahi yaitu Indeks LAKE yang merupakan hasil penilaian dari pengawasan kearsipan yang dilakukan oleh ANRI.

Nilai hasil Pengawasan Kearsipan Eksternal Tahun 2021 Kota Cimahi sebesar 64,17 (enam puluh empat koma satu tujuh) dengan kategori B (Baik). Nilai tersebut merupakan nilai komposit yang terdiri atas nilai aspek-aspek :

- Aspek Kebijakan
- Aspek Pembinaan
- Aspek Pengelolaan Arsip Inaktif Dengan Retensi Sekurang-kurangnya 10 Tahun
- Aspek pengelolaan Arsip Statis
- Aspek Sumber Daya Kearsipan

Nilai-nilai per aspek pengawasan kearsipan eksternal sebagai berikut :

Gambar 3.18. Rekapitulasi Hasil Pengawasan Kearsipan Eksternal Pemerintah Kota Cimahi Tahun 2021

LAMPIRAN

**REKAPITULASI HASIL PENGAWASAN KEARSIPAN EKSTERNAL
PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAH
TAHUN 2021**

NO	ASPEK/KOMPONEN	NILAI STD	NILAI PEROLEHAN	BOBOT KOMPONEN	NILAI KOMPONEN	BOBOT ASPEK	NILAI ASPEK
I.	ASPEK KEBIJAKAN	1200	1010	0%	84.16666667	30%	25.25
A.	PEMENUHAN	1200	1010	100%	84.16666667	0%	0.00
B.	REFORM	0	0	0%	0	0%	0.00
II.	ASPEK PEMBINAAN	1000	810	0%	83.04761905	20%	16.61
A.	KEWAJIBAN MELAKSANAKAN PEMBINAAN	700	610	80%	69.71428571	0%	0.00
B.	REFORM	300	200	20%	13.33333333	0%	0.00
III.	ASPEK PENGELOLAAN ARSIP INAKTIF DENGAN RETENSI SEKURANG-KURANGNYA 10 TAHUN	1700	490	0%	28.82352941	10%	2.88
A.	KEWAJIBAN MELAKSANAKAN PENGELOLAAN ARSIP INAKTIF DENGAN RETENSI SEKURANG- KURANGNYA 10 TAHUN	1700	490	100%	28.82352941	0%	0.00
B.	REFORM	0	0	0%	0	0%	0.00
IV.	ASPEK PENGELOLAAN ARSIP STATIS	2900	1000	0%	34.72463768	20%	6.94
A.	KEWAJIBAN MELAKSANAKAN PENGELOLAAN ARSIP STATIS	2300	960	80%	33.39130435	0%	0.00
B.	REFORM	600	40	20%	1.333333333	0%	0.00
V.	ASPEK SUMBER DAYA KEARSIPAN	3300	2060	0%	62.42424242	20%	12.48
A.	KEWAJIBAN PEMENUHAN SDK	3300	2060	100%	62.42424242	0%	0.00

LAPORAN PENGAWASAN KEARSIPAN EKSTERNAL KOTA CIMAH TAHUN 2021

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh
Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

B.	REFORM	0	0	0%	0	0%	0.00
TOTAL NILAI/ NILAI STANDAR/ SKOR		10100	5370	64.17165277			
KATEGORI		B (BAIK)					

Capaian Indeks LAKE Kota Cimahi pada Tahun 2021 berada di bawah target karena pengawasan kearsipan eksternal yang dilakukan oleh ANRI dilaksanakan dengan menggunakan instrumen pengawasan kearsipan yang berbeda dengan tahun sebelumnya yaitu menggunakan instrument pengawasan sebagaimana diatur dalam lampiran Keputusan Kepala ANRI Nomor 92 Tahun 2021 tentang Instrumen Pengawasan Atas Pelaksanaan Penyelenggaraan Kearsipan Dan Tata Cara Penilaian Pengawasan Kearsipan.

Sedangkan capaian kinerja program kegiatan dan sub kegiatan dalam urusan pemerintah Bidang Kearsipan pada Tahun 2021, sebagai berikut :

Tabel 3.17. Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan, Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan dan Perpustakaan Kota Cimahi Tahun 2021

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA 2021	
		TARGET	REALISASI
Meningkatnya kinerja kearsipan daerah	INDEKS LAKE		
Meningkatnya pengelolaan kearsipan daerah	Prosentase Perangkat Daerah Yang mengelola arsip secara baku	15 persen	50,00
Terlaksananya Pengelolaan Arsip Statis Kota Cimahi	Nilai LAKE Aspek Pengelolaan Arsip Statis	49,88	6,94
Terlaksananya Akuisisi, Pengolahan,Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Perangkat Daerah yang melakukan penyerahan arsip statis	1 PD	1PD
Terlaksananya Pengelolaan Arsip Dinamis Kota Cimahi	Nilai LAKE Aspek Pengelolaan Arsip Inaktif	81 persen	2,88
Terlaksananya Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Pendampingan Pengelolaan Arsip Dinamis	1 aktivitas	1 aktivitas
Terlaksananya Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Kota Cimahi	Nilai LAKE Program Kearsipan	66,25 persen	25,25 persen
Terlaksananya Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pembinaan Kearsipan	1 kali	1 kali
Meningkatnya Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip Daerah Kota Cimahi	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	100 persen	100 persen
Terlaksananya Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Tingkat Kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK	100 persen	100 persen
Terlaksananya Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi diBawah 10 (sepuluh) Tahun	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan pendampingan dalam rangka pelaksanaan pemusnahan arsip	3 PD	1 PD
Terlaksananya Pelayanan Perizinan Penggunaan Arsip	Persentase arsip bersifat tertutup yang diizinkan untuk digunakan	100 persen	100 persen
Terlaksanya Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	Prosentase Permohonan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang dilayani	100 persen	100 persen
Terlaksananya Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah Daftar Arsip Perangkat Daerah yang Bersifat Tertutup berdasarkan pedoman dari Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis	3 daftar	3 daftar

Indikator kinerja urusan kearsipan adalah prosentase perangkat daerah Kota Cimahi yang mengelola arsip secara baku. Hal ini terkait dengan pengawasan kearsipan internal yang telah dilaksanakan pada seluruh Perangkat Daerah melalui pengisian formulir ASKI dan uji petik kunjungan lapangan. Dari 28 Perangkat Daerah Kota Cimahi yang mengisi dan mengembalikan formulir terdapat sebanyak 14 Perangkat Daerah atau 50%.

PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	CAPAIAN
Pengelolaan Arsip	Prosentase Perangkat Daerah Yang mengelola arsip secara baku	15 persen	50,00

1. Kegiatan Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupate/ Kota

Terdapat 1 sub kegiatan pada Kegiatan Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupate/ Kota. Indikator kinerja Sub Kegiatan Akuisisi, pengolahan, preservasi, dan Akses Arsip Statis, sebagai berikut :

SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	CAPAIAN
Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Perangkat Daerah yang melakukan penyerahan arsip statis	1 PD	1PD

Pengelolaan arsip statis merupakan rangkaian dari pengelolaan arsip dinamis yang dilaksanakan pada pencipta arsip atau Perangkat Daerah Kota Cimahi, sehingga harus ada kerjasama seluruh perangkat daerah dalam pengelolaan arsip di Kota Cimahi.

Kondisi pengelolaan arsip dinamis pada perangkat daerah di Kota Cimahi saat ini masih belum sesuai dengan kaidah-kaidah pengelolaan kearsipan, sehingga target akuisisi arsip statis pada tahun 2021 adalah arsip BKPSDMD khususnya sub-sub aspek sk pejabat daerah Kota Cimahi yaitu yang terkait dengan arsip tentang Sekretaris Daerah Kota Cimahi

Berdasarkan Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan adalah proses penambahan khasanah arsip statis pada lembaga kearsipan yang dilaksanakan melalui kegiatan penyerahan arsip statis dan hak pengelolaannya dari pencipta kepada lembaga kearsipan.

Berpedoman antara lain pada Peraturan Kepala ANRI Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelusuran Arsip Statis di lingkungan Pencipta Arsip, pada tahun 2021, dalam upaya pelestarian arsip yang memiliki nilai sejarah pemerintahan Kota Cimahi dilakukan penelusuran arsip bernilai sejarah yaitu Sekretaris Daerah Kota Cimahi periode tahun 2001 sampai tahun 2005. Pada masa tersebut Sekretaris Daerah Kota Cimahi yaitu :

- 1) Drs. H. Moch. Sedar (2001 -2005)

- 2) Ir. H. Ahmad S. Solihin (2005 – 2009)
- 3) Drs. Encep Saepuloh, M.Si. (2009 – 2014)
- 4) Drs. H. Bambang Arie Nugroho, M.M. (2013 – 2014)
- 5) Drs. Muhamad Yani (2015)

Metode yang digunakan dalam penelusuran arsip sekretaris daerah Kota Cimahi adalah *fact finding* melalui :

- 1) melakukan wawancara dengan yang bersangkutan dan keluarga almarhum bagi yang sudah meninggal yaitu bapak Mochamad Sedar dan bapak Achmad Solihin
- 2) studi pustaka buku Cimahi Otonom dan Sejarah Cimahi
- 3) arsip pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Gambar 3.19. Aktivitas Penelusuran Arsip Sekretaris Daerah Kota Cimahi Tahun 2001-2005



Hasil dari aktivitas tersebut adalah buku Sekretaris Daerah Kota Cimahi Periode Tahun 2001 Sampai Tahun 2005, menambah khazanah arsip statis Kota Cimahi dan sebagai memori kolektif bangsa..

Sosialisasi penanganan arsip covid-19

2. Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kota Cimahi

Terdapat 1 sub kegiatan pada Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kota Cimahi. Indikator kinerja Sub Kegiatan Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis adalah :

SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	CAPAIAN
Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Pendampingan Pengelolaan Arsip Dinamis	1 aktivitas	1 aktivitas

Pendampingan pengelolaan Arsip Dinamis pada Perangkat Daerah Kota Cimahi dilaksanakan melalui pelaksanaan pengawasan kearsipan internal Kota Cimahi. Pengawasan dilakukan berbasis pendampingan kepada Perangkat Daerah sehingga dihaerapkan dapat meningkatkan pengelolaan arsip aktif dan arsip inaktif pada pencipta arsip.

Pengawasan Kearsipan Internal di lingkup pencipta Arsip Pemerintah Kota Cimahi dilaksanakan oleh Tim Pengawas Kearsipan Internal Kota Cimahi. Pengawasan dilakukan berdasarkan hasil penilaian mandiri Pencipta Arsip menggunakan formulir ASKI dan kunjungan ke Pencipta Arsip.

Aspek penilaian dalam pengawasan sistem kearsipan internal meliputi:

- 1) pengelolaan Arsip Dinamis yang meliputi penciptaan arsip, penggunaan arsip, pemeliharaan arsip dan penyusutan arsip; dan
- 2) sumber daya kearsipan yang meliputi sumber daya manusia kearsipan, dan prasarana dan sarana.

Ouput pengawasan berupa Laporan Audit Kearsipan Internal (LAKI) selanjutnya harus ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah sebagai langkah-langkah untuk meninkata penyelenggaraan kearsipan pada masing-masing Perangkat Daerah.

Hasil penilaian dan peringkat pengelolaan arsip dinamis pada Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.18. Peringkat dan Kategori Hasil Audit Kearsipan Internal di Lingkup Pemerintah Kota Cimahi Tahun 2021

NO.	PERANGKAT DAERAH KOTA CIMAHI	NILAI (%)	KATEGORI
1	Dinas Komunikasi Informatika Kearsipan dan Perpustakaan Kota Cimahi	56.03	Cukup
2	Rumah Sakit Umum Daerah Cibabat Kota Cimahi	53.47	Cukup
3	Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi	46.84	Kurang
4	Sekretariat Daerah Kota Cimahi	45.41	Kurang
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cimahi	38.06	Kurang
6	Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi	36.59	Kurang
7	Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi	35.57	Kurang
8	Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi	34.54	Kurang
9	Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Cimahi	28.96	Sangat Kurang
10	Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi	25.33	Sangat Kurang
11	Kantor Kesatuan Bangsa Kota Cimahi	24.68	Sangat Kurang
12	Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Cimahi	23.48	Sangat Kurang
13	Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perindustrian Kota Cimahi	22.19	Sangat Kurang
14	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Cimahi	20.31	Sangat Kurang
15	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi	0	Sangat Kurang
16	Inspektorat Kota Cimahi	0	Sangat Kurang
17	Dinas Pendidikan Kota Cimahi	0	Sangat Kurang
18	Dinas Kesehatan Kota Cimahi	0	Sangat Kurang
19	Dinas Perhubungan Kota Cimahi	0	Sangat Kurang
20	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cimahi	0	Sangat Kurang

NO.	PERANGKAT DAERAH KOTA CIMAHI	NILAI (%)	KATEGORI
21	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi	0	Sangat Kurang
22	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi	0	Sangat Kurang
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cimahi	0	Sangat Kurang
24	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Cimahi	0	Sangat Kurang
25	Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi	0	Sangat Kurang
26	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Cimahi	0	Sangat Kurang
27	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cimahi	0	Sangat Kurang
28	Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi	0	Sangat Kurang

3. Kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/ Kota

Indikator kinerja Sub Kegiatan Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten / Kota adalah :

SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	CAPAIAN
Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pembinaan Kearsipan	1 kali	1 kali

Pemberdayaan kapasitas Lembaga kearsipan Daerah Kota Cimahi dilaksanakan dengan mengikuti Bimbingan Teknis tentang Pengawasan Kearsipan yang diselenggarakan oleh ANRI secara virtual, dengan praktek pengisian instrument ASKI, penyusunan RHAS dan penyusunan LAKI.

Dalam masa pandemi, terdapat banyak aktivitas webinar yang diselenggarakan baik oleh ANRI maupun Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Barat. BVBeberapa webinar yang diikuti antara lain :

- Webinar pengelolaan arsip statis series 3 : "Jawa Barat Dalam Lintas Peristiwa Konferensi Asia Afrika
- ekspose inventaris arsip wees-En Boedelkamers Seri Faillissement"
- Penyusunan naskah sumber arsip statis
- Opening ceremony SARBICA 2021 and webinar day 1 Archives memory andworld documentary Heritage
- SARBICA 2021 Day 2 : Archives and Pandemic Response
- Webinar *archives Authenticity and recent challenge* Arsip Nasional RI
- Webinar Pengelolaan Arsip Dalam Rangka Penyiapan Pusat Studi Arsip Tsunami
- autentifikasi arsip statis dengan Dispusipda Jabar
- Webinar Pekan MemoriSukarno Mengguncang Dunia
- workshop Restorasi Digital Arsip Film
- Workshop online preservasi arsip seri 7 "magnetic tape preservation and transfer to digital.
- webinar Pengelolaan arsip menuju digital

Pengawasan Kearsipan adalah proses kegiatan dalam menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah dan standard kearsipan penyelenggaraan kearsipan. Pengawasan kearsipan dilaksanakan untuk mewujudkan tujuan penyelenggaraan kearsipan yaitu menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya untuk perlindungan kepentingan Negara dan hak-hak keperdataan rakyat. Kaidah-kaidah dalam pelaksanaan kearsipan yang harus diperhatikan baik oleh auditor maupun auditee adalah :

- 1) Pelaksanaan audit meliputi proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, objektif dan profesional berdasarkan standar kearsipan untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan penyelenggaraan kearsipan di masing-masing pencipta arsip.
- 2) Menggunakan dua metode yaitu Audit Kearsipan dan Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Kearsipan
- 3) Pengawasan meliputi berbagai aspek dalam penyelenggaraan kearsipan yang terdiri dari: aspek ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan bidang kearsipan dalam penetapan kebijakan kearsipan, aspek program kearsipan, aspek pengelolaan arsip inaktif dan atau pengelolaan arsip statis, aspek penyusutan, aspek sumber daya manusia kearsipan, aspek kelembagaan serta aspek prasarana dan sarana kearsipan.

Pengawasan kearsipan eksternal dilakukan terhadap lembaga kearsipan dan sampel dari pencipta arsip. Persiapan yang dilakukan adalah menyiapkan bukti-bukti dari penyelenggaraan kearsipan di Kota Cimahi berdasarkan instrument pengawasan kearsipan eksternal dan tindak lanjut hasil pengawasann kearsipan tahun sebelumnya.

Gambar 3.20. Aktivitas webinar yang diselenggarakan oleh ANRI Tahun 2021



4. Kegiatan Pemusnahan Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota yang memiliki etensi di bawah 10 (sepuluh) Tahun

Terdiri dari satu sub kegiatan, indikator kinerja pada Sub kegiatan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi dibawah 10 (sepuluh) Tahun adalah :

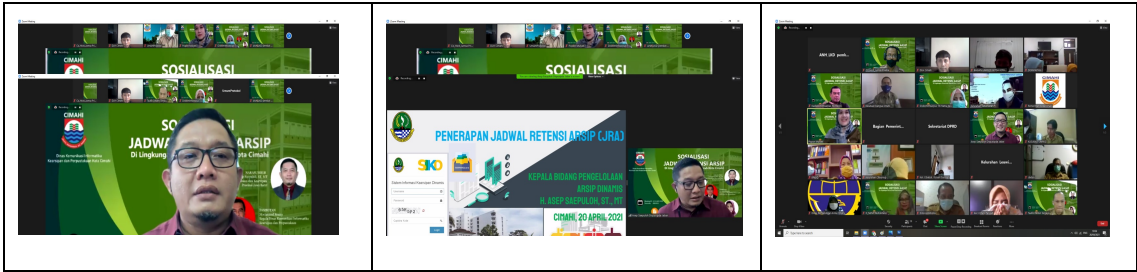
SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	CAPAIAN
Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi diBawah 10 (sepuluh) Tahun	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan pendampingan dalam rangka pelaksanaan pemusnahan arsip	3 PD	1 PD

Penilaian, penetapan dan pelaksanaan pemusnahan arsip yang memiliki retensi dibawah 10 (sepuluh) tahun merupakan aktivitas kearsipan yang dilaksanakan pada Unit Kearsipan. Instrumen dasar bagi pelaksanaan aktivitas ini adalah Naskah Jadwal Retensi Arsip (JRA), yang tercantum dalam Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 48 Tahun 2019.

Sosialisasi Jadwal Retensi Arsip (JRA) dilaksanakan kepada 28 Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kota Cimahi untuk mengingatkan kepada Perangkat Daerah /Pencipta Arsip untuk melakukan penyusutan arsip aktif dan arsip inaktifnya. Sosialisasi JRA dilaksanakan secara virtual karena masih kondisi pandemi Covid-19.

Praktek dari sosialisasi JRA dalam bentuk pendampingan kepada perangkat daerah dilaksanakan terlebih dahulu pada Unit Kearsipan Dinas Komunikasi, Informtika, Kearsipan dan Perpustakaan Kota Cimahi.

Gambar 3.21. Sosialisasi JRA Kota Cimahi Tahun 2021 secara Virtual



5. Kegiatan Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/ Kota

Indikator kinerja Sub kegiatan Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup adalah :

SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	CAPAIAN
Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah Daftar Arsip Perangkat Daerah yang Bersifat Tertutup berdasarkan pedoman dari Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis (SKKAAD)	3 daftar	3 daftar

Akses arsip dapat terbatas atau tertutup dikarenakan beberapa hal, yaitu untuk melindungi kepentingan negara atau negara lain, melindungi masyarakat dan negara dari konflik yang dapat ditimbulkan, dan melindungi kepentingan perseorangan dengan menjaga hak-hak pribadi. Pembatasan akses arsip bagi publik meliputi arsip-arsip surat yang menurut sifatnya dirahasiakan, arsip yang dapat mengungkapkan rahasia pribadi seperti riwayat dan kondisi anggota keluarga, arsip yang dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional yang jika dibuka akan membahayakan seperti saham dan aset vital milik negara, arsip mengenai sengketa batas wilayah daerah dan negara dan masih banyak lainnya. Arsip yang bersifat tertutup merupakan arsip dengan kondisi akses fisik dan informasi yang terbatas bagi pihak lain karena adanya pertimbangan proses, kepentingan Lembaga, organisasi kepentingan nasional dan kepentingan hukum sehingga diharuskan untuk dijaga kerahasiaannya.

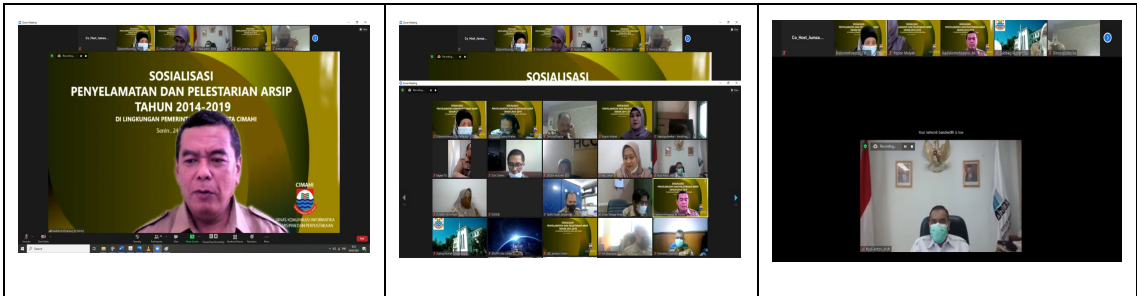
Arsip yang bersifat tertutup dapat dinyatakan terbuka oleh Kepala Lembaga Kearsipan sesuai dengan lingkup kewenangannya setelah melewati masa penyimpanan selama 25 tahun, namun juga dapat dinyatakan terbuka sebelum masa penyimpanan selama 25 tahun sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Kepala Arsip Nasional (ANRI) Nomor 28 tahun 2011 mengenai Pedoman dan Akses Layanan Arsip Statis.

Sosialisasi Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip secara virtual dengan peserta Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan Pengelola Arsip Perangkat Daerah Kota Cimahi, diselenggarakan dalam upaya menyusun daftar arsip Perangkat Daerah yang bersifat tertutup berdasarkan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis (SKKAAD) Kota Cimahi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 29 Tahun 2019. Sosialisasi tersebut dilaksanakan sebagai langkah awal untuk mendukung terlaksananya layanan penggunaan arsip tertutup di Kota Cimahi sehingga dapat mewujudkan akses arsip tertutup yang mudah bagi masyarakat, lembaga, atau organisasi sesuai dengan kaidah kearsipan.

Adapun daftar arsip yang bersifat tertutup berdasarkan pedoman dari Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis (SKKAAD) yaitu:

- a. Urusan Lingkungan Hidup
- b. Urusan Perpustakaan
- c. Urusan Kehutanan

Gambar 3.22. Sosialisasi SKKAD Kota Cimahi Tahun 2021 secara Virtual



F. Urusan Pendukung Pemerintahan

Urusan pendukung pemerintahan didalamnya terdiri dari program, kegiatan dan sub kegiatan untuk menunjang dan mendukung terselenggaranya tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan dan Perpustakaan Kota Cimahi agar berjalan efektif dan efisien. Urusan pendukung pemerintahan secara struktural diemban oleh Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan dan Perpustakaan Kota Cimahi.

Sekretariat pada suatu perangkat daerah merupakan struktur dalam organisasi yang menjalankan fungsi manajemen sumber daya pada perangkat daerah melalui layanan internal atau supporting system, meliputi aspek perencanaan, pelaporan, keuangan, kepegawaian dan umum. Kinerja layanan internal Dinas Komunikasi Informatika Kearsipan dan Perpustakaan Kota Cimahi Tahun 2021, sebagai berikut:

Tabel 3.19. Pencapaian Target Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan Dan Perpustakaan Urusan Pendukung Pemerintahan

ESELON	SASARAN	INDIKATOR	INDIKATOR KINERJA		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
II	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan dan Perpustakaan Kota Cimahi	Nilai SAKIP	BB	BB	100%
III	Meningkatnya kinerja organisasi	Nilai LAKIP	75,65 Indeks	75,65 Indeks	100%
III	Tersusunnya dokumen perencanaan dan evaluasi	Prosentase dokumen perencanaan dan evaluasi yang disusun	100 persen	100 persen	100%
		Jumlah Dokumen Perencanaan dan Monev Yang Disusun;	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
IV	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan PD	2 dokumen	2 dokumen	100%
IV	Terlaksananya monitoring dan evaluasi	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja PD	2 dokumen	2 dokumen	100%

ESELON	SASARAN	INDIKATOR	INDIKATOR KINERJA		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
III	Terselenggaranya administrasi penyelenggaraan barang milik daerah	Pesentase penyelenggaraan administrasi barang milik daerah	75 persen	75 persen	100%
IV	Terlaksananya pengamanan barang milik daerah	Jumlah barang milik daerah yang dilakukan pengamanan	6 unit	6 unit	100%
III	Tersedianya administrasi umum	Prosentase penyediaan administrasi umum	50 persen	100 persen	100%
		Jumlah Bulan Penyediaan Adminitrasi Umum;	12 Bulan	12 Bulan	100%
IV	Tersedianya bahan logistik kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Logistik Kantor;	12 Bulan	12 Bulan	100%
IV	Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan penyediaan cetakan dan penggandaan;	12 Bulan	12 Bulan	100%
IV	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah set peralatan dan perlengkapan kantor;	2 Set	2 Set	100%
IV	Terfasilitasinya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah aktivitas koordinasi dan konsultasi yang difasilitasi	76 Aktivitas	102 Aktivitas	134%
III	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Prosentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	50 persen	50 persen	100%
		Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12 bulan	12 bulan	100%
IV	Terlaksananya pelayanan jasa surat menyurat	Jumlah Bulan Pelayanan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	12 Bulan	100%
IV	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	12 Bulan	100%
IV	Tersedianya layanan yang memenuhi kebutuhan umum kantor	Jumlah bulan penyediaan kebutuhan perlengkapan kebersihan dan jasa tenaga kebersihan	12 Bulan	12 Bulan	100%
		jumlah bulan penyediaan umum kantor	12 bulan	12 bulan	100%
III	Terpeliharanya barang milik daerah	Prosentase pemeliharaan barang milik daerah	50 persen	50 persen	100%
		Jumlah bulan pemeliharaan barang milik daerah	12 bulan	12 bulan	100%
IV	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas operasional/lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dilakukan pemeliharaan	6 unit	6 unit	100%
IV	Terlaksananya pemeliharaan gedung/kantor dan bangunan lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan gedung/kantor dan bangunan lainnya	12 Bulan	12 bulan	100%
IV	Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor	Jumlah sarana dan prasarana yang dilakukan pemeliharaan	19 unit	19 unit	100%
III	Terfasilitasinya pembinaan pegawai	Jumlah Pegawai Yang terfasilitasi pembinaan	48 Pegawai;	43 Pegawai	100%
IV	Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan kepada seluruh pegawai	Jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi	48 Pegawai;	43 Pegawai	100%
III	Terlaksananya administrasi keuangan	Prosentase administrasi keuangan terlaksana	100 persen	100 persen	100%

ESELON	SASARAN	INDIKATOR	INDIKATOR KINERJA		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
		Jumlah Dokumen Keuangan Yang Disusun;	21 Dokumen	21 Dokumen	100%
IV	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terfasilitasi gaji dan tunjangan;	48 Pegawai	43 Pegawai	100%
IV	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bulan penatausahaan dan verifikasi keuangan	12 bulan	12 bulan	100%

Secara umum kinerja layanan internal Dinas Komunikasi Informatika Kearsipan dan Perpustakaan Kota Cimahi baik sehingga operasional dan pelaksanaan program dan kegiatan seluruhnya berjalan dengan baik dan dapat mencapai target kinerja yang diharapkan.

3.1.2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Capaian Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan dan Perpustakaan Kota Cimahi tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2020 sebagaimana tersebut di bawah ini :

Tabel 3.20 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama (*impact*) Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan dan Perpustakaan Kota Cimahi, Tahun 2020 dan 2021

No	SASARAN STRATEGIS (RENSTRA)	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KINERJA 2020		KINERJA 2021		KETERANGAN
				TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	
1	Meningkatnya akses membaca masyarakat	Presentase Peningkatan Pemustaka Aktif	%	-0,79%	- 0,53%	1,07%	181,34 %	Meningkat
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	SAKIP	Index	BB	BB	BB	BB	Meningkat
3	Meningkatnya Kinerja Kearsipan Daerah Pada Pencipta Arsip	Indeks LAKE (Laporan Audit Kearsipan Eksternal)	Nilai	72,32	79,99	72,32	64,17	Menurun
4	Meningkatnya tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik	Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	Nilai	3,16	3,25	3,18	2,75	Menurun

No	SASARAN STRATEGIS (RENSTRA)	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KINERJA 2020		KINERJA 2021		KETERANGAN
				TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	
5	Meningkatnya tata kelola statistik sektoral daerah	Prosentase Perangkat daerah yang telah melakukan integrasi data statistik sektoral	%	74	82,14	80	89	Meningkat

Capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan dan Perpustakaan Kota Cimahi Tahun 2021 dibandingkan dengan capaian pada Tahun 2020, terdapat capaian 2 indikator yang menurun, sebagai berikut :

- a. Capaian Indeks LAKE Kota Cimahi pada Tahun 2021 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2020 karena pengawasan kearsipan eksternal yang dilakukan oleh ANRI dilaksanakan dengan menggunakan instrumen pengawasan kearsipan yang berbeda dengan tahun sebelumnya yaitu menggunakan instrument pengawasan sebagaimana diatur dalam lampiran Keputusan Kepala ANRI Nomor 92 Tahun 2021 tentang Instrumen Pengawasan Atas Pelaksanaan Penyelenggaraan Kearsipan Dan Tata Cara Penilaian Pengawasan Kearsipan.
- b. Capaian Indeks SPBE Kota Cimahi mengalami penurunan target karena terdapat perubahan indikator-indikator dan penambahan indicator yang digunakan dalam penghitungan Indeks SPBE dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada Tahun 2020 diterbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang mencabut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aaparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 yang sebelumnya digunakan sebagai pedoman evaluasi SPBE, sehingga penilaian SPBE yang sebelumnya menggunakan 35 indikator berubah menjadi 47 indikator.

3.1.3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan target Jangka Menengah Perubahan RENSTRA Dinas Komunikasi Informatika Kearsipan dan Perpustakaan Kota Cimahi Tahun 2018-2022 sebagai berikut:

Tabel 3.21. Perbandingan Realisasi Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan dan Perpustakaan Kota Cimahi Tahun 2021 dengan Target Kinerja pada Perubahan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan dan Perpustakaan Kota Cimahi Tahun 2018-2022

NO	SASARAN STRATEGIS (RENSTRA)	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN TAHUN SEBELUMNYA (2020)	TAHUN 2021			TARGET TAHUN 2022	TARGET AKHIR RENSTRA	Capaian Tahun x terhadap Target AkhirRenstra (%)
					TARGET	REALISASI	% REALISASI			
1	Meningkatnya akses membaca masyarakat	Presentase Peningkatan Pemustaka Aktif	%	-0,53%	1,07%	181,34 %	100	0,22%	0,22%	100%
		Pemustaka Aktif	Jml	6.131	10.292	28.835	100	12.576	12.576	100%
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	SAKIP	Indeks	BB	BB	BB	100	BB	BB	100%
3	Meningkatnya Kinerja Kearsipan Daerah Pada Pencipta Arsip	Indeks LAKE (laporan Audit Kearsipan Eksternal)	Nilai	79,99	72,32	64,17	100	72,32	72,32	88,7%
4	Meningkatnya tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik	Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	Nilai	3,25	3,18	2,75	100	3,19	3,19	86,2%
5	Meningkatnya tata kelola statistic sektoral daerah	Prosentase Perangkat daerah yang telah melakukan integrasi data statistik sektoral	%	82,14	80	89	100	85	85	100%

1. Sararan Strategis : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja

Berdasarkan tabel 3... tersebut di atas terlihat bahwa indikator kinerja dengan nilai SAKIP Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan dan Perpustakaan Kota Cimahi tahun 2020 diperkirakan mencapai nilai BB. Apabila capaian kinerja dibandingkan dengan target akhir jangka menengah dokumen Renstra tahun 2022 maka presentase capaian kinerja sudah mencapai 25%. Dengan demikian

untuk tahun 2022, karena sudah pecah dinas maka Dinas Arsip Daerah Kota Cimahi dan Dinas Komunikasi dan Informatika masih harus meningkatkan lagi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada tahun 2022 untuk mencapai nilai A yang diharapkan.

2. Sasaran Strategis : Meningkatnya akses membaca masyarakat

Pada tabel 3... tersebut di atas, realisasi kinerja untuk indikator kinerja Persentase Peningkatan Pemustaka Aktif tahun 2021 telah mencapai target yang telah ditetapkan karena meskipun masih berada dalam masa pandemi covid-19 namun sosialisasi yang gencar, kerjasama yang baik dengan sekolah dan inovasi Cimahi Reading Habit secara online melalui e-library. Namun demikian jumlah pemustaka aktif harus terus ditingkatkan dan sasarannya diperluas untuk meningkatkan literasi dan pengetahuan masyarakat Kota Cimahi. Demikian pula harus diantisipasi bahwa pada tahun 2022 kondisi pandemi covid-19 masih belum benar-benar tuntas maka diharapkan ada metoda layanan pinjam baca buku yang lebih efektif daripada pelayanan sistem tertutup yang sekarang dilaksanakan.

3. Meningkatnya Kinerja Kearsipan Daerah Pada Pencipta Arsip

Berdasarkan tabel 3... bahwa dibandingkan dengan capaian nilai LAKE pada tahun sebelumnya 2020 terdapat penurunan capaian karena adanya perubahan indikator pengukuran pengawasan kearsipan oleh ANRI. Demikian pula untuk tahun 2022 terdapat indikator penilaian yang berbeda yang akan diterapkan yaitu 60% nilai LAKE dan 40% Nilai LAKI. Terutama pula untuk Tahun 2002 dengan adanya dinas baru sebagai Lembaga Kearsipan Daerah Kota Cimahi maka akan berpengaruh pada penurunan nilai LAKE karena harus dimulai lagi dari nol. Pada Tahun 2023 akan diterapkan aplikasi SRIKANDI secara menyeluruh, sehingga diharapkan mampu mendorong pengelolaan arsip baik pada Lembaga Kearsipan Daerah maupun pada Perangkat Daerah sebagai pencipta Arsip.

4. Sasaran Strategis : Meningkatnya Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Hasil evaluasi SPBE Kota Cimahi Tahun 2021 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya karena adanya perubahan dan tambahan indikator penilaian SPBE. Kekurangan dalam SPBE Kota Cimahi adalah belum disahkannya dan disusunnya dokumen-dokumen SPBE, sehingga

untuk mencapai target Rentra pada Tahun 2022 masih diperlukan banyak upaya dan kerja.

5. Sasaran Strategis : Meningkatnya Tata Kelola Statistik Sektoral Daerah

Capaian indikator Meningkatnya Tata Kelola Statistik Sektoral Daerah pada tahun 2021 sebesar 89% sudah melampaui target akhir renstra sebesar 85%. Namun demikian karena data-data statistik harus selalu terbaru maka kinerja yang telah dicapai harus tetap dipertahankan dan ditingkatkan.

3.1.4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Dalam pelaksanaan urusan Komunikasi dan Informatika, urusan Persandian, Urusan Statistik, Urusan Kearsipan dan Urusan perpustakaan tidak terdapat standard nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

3.1.5. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Dalam proses untuk mencapai target kinerja organisasi selama tahun 2021 terdapat beberapa hal penting yang menjadi bahan pembelajaran untuk pelaksanaan kinerja selanjutnya. Analisis terhadap keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja Dinas Komunikasi Informatika Kearsipan dan Perpustakaan Kota Cimahi Tahun 2021, sebagai berikut :

1. Urusan Persandian

Tabel 3.22. Analisa Keberhasilan dan Kegagalan Urusan Persandian Dalam Proses Pencapaian Kinerja Organisasi Tahun 2021

No.	Uraian	Keberhasilan/ Kegagalan	Penyebab	Alternati Solusi yg dilakukan/ disarankan
1	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Sosialisasi dan Bimbingan teknis tentang keamanan informasi kepada perangkat daerah dilakukan secara intensif (B)	Komitmen untuk mengawal keamanan informasi	Dilakukan sosialisasi dalam skala lebih luas terhadap seluruh personil dan masyarakat
		Masih rendahnya pemahaman dan perilaku pengguna TIK terhadap keamanan informasi (G)	Kekurang pedulian terhadap masalah keamamnan informasi	Dilakukan sosialisasi dalam skala lebih luas terhadap seluruh personil dan masyarakat

No.	Uraian	Keberhasilan/ Kegagalan	Penyebab	Alternatif Solusi yg dilakukan/ disarankan
		Belum terpetakannya Sumber Daya komunikasi dan informasi (G)	Belum dilakukan penghitungan secara detail ttg sumberdaya komunikasi dan informasi	Kerjasama dengan perguruan tinggi / lembaga penelitian
		Peralatan sandi yang dimiliki Kota Cimahi cukup untuk kegiatan persandian (B)	Bantuan dari BSSN	Mensosialisasikan penggunaan peralatan sandi untuk keamanan informasi
		Tidak adanya tempat Persandian (G)	Ruangan tidak memadai	Koordinasi dengan Pimpinan
2	Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah	Seluruh perangkat daerah dan sebagian besar ASN telah memiliki akun email berdomain cimahikota.go.id(B)	Layanan dan pendampingan pembuatan dan penggunaan email resmi pemerintah Kota Cimahi	Menggalakkan penggunaan email resmi berdomain cimahikota.go.id
		Prosentase perangkat daerah yang menggunakan Pola Hubungan Komunikasi Sandi masih sangat rendah (G)	Penggunaan email cimahikota.go.id kurang mudah atau belum dibiasakan	Membangun kemudahan penggunaan email cimahikota.go.id
		Peralatan sandi yang dimiliki Kota Cimahi cukup untuk kegiatan persandian (B)	Bantuan dari BSSN	Mensosialisasikan penggunaan peralatan sandi untuk keamanan informasi
		Tidak adanya tempat Persandian (G)	Ruangan tidak memadai	Koordinasi dengan Pimpinan

2. Urusan Komunikasi dan Informatika

Tabel 3.23. Analisa Keberhasilan dan Kegagalan Urusan Komunikasi dan Informatika, Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dalam Proses Pencapaian Kinerja Organisasi Tahun 2021

No	Uraian	Keberhasilan/ Kegagalan	Penyebab	Alternatif Solusi yg dilakukan/ disarankan
1	Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Gencarnya pemberitaan tentang pembangunan Kota Cimahi (B)	Kerjasama yang baik dengan media massa	Dilakukannya perencanaan publikasi
		Hasil survei Prosentase masyarakat yang mengetahui program pemerintah rendah	sarana penyebaran informasi belum tepat dg kondisi masyarakat	Dilakukannya penelitian terhadap penyebaran informasi yang efektif perencanaan publikasi
		Publikasi kegiatan kepala daerah melalui media sosial sangat intensif (B)	Fokus pendokumentasian kegiatan kepala daerah sangat tinggi	Kerjasama dengan perangkat daerah untuk dokumentasi kegiatan yang menghadirkan kepala daerah
a	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Target iklan/display/naskah release/talkshow/siaran dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah harus lebih terukur	Belum adanya perencanaan publikasi	Dilakukannya perencanaan publikasi
b	Pelayanan Informasi Publik	Adanya fasilitas /sarana pelayanan informasi yang baik (B)	Dilaksanakannya perencanaan untuk sarpras pelayanan informasi	Peningkatan layanan informasi
		Respon terhadap pengaduan masyarakat masih rendah (G)	Belum adanya sistem yang efektif untuk mengawal respon terhadap pengaduan masyarakat	Peningkatan kinerja layanan pengaduan masyarakat
c	Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan	analisis berita media dilakukan untuk setiap berita tentang	Adanya langganan Koran dan majalah	Hasil analisis berita dievaluasi

No	Uraian	Keberhasilan/ Kegagalan	Penyebab	Alternati Solusi yg dilakukan/ disarankan
	komunikasi	pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan Kota Cimahi (B)	secara rutin	secara lebih mendetail secara substansi sebagai bahan masukan bagi pengamalan kebijakan pimpinan
		Hasil analisis berita belum digunakan sebagai <i>feedback</i> bagi kegiatan publikasi (G)	Tidak terpetakannya alur kerja publikasi dan layanan informasi	Penyusunan proses bisnis bidang informasi dan komunikasi publik
2	Pengelolaan Nama Domain Yang Telah Ditetapkan	Seluruh perangkat daerah telah terlayani jaringan internet (B)	Meningkatnya pengarusutamaan SPBE	Pelaksanaan SOP Layanan Jaringan
		Beberapa unit layanan pemerintah belum disambungkan jaringan FO (G)	Lokasi gedung tidak permanen	Menggunakan saluran VPN untuk komunikasi berbasis TIK
3	Pengelolaan E-government	Kebutuhan internet seluruh perangkat daerah dapat dipenuhi (B)	Kapasitas bandwidth tersedia dan kualitas sarana peralatan sangat menunjang	Pemeliharaan jaringan infrastruktur harus terkontrol
a	Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi	Belum adanya peraturan perundangan daerah tentang pengelola SPBE (G)	Arsitektur SPBE nasional belum ditetapkan	Pembahasan draft perwal Tata Kelola SPBE
		Belum dimilikinya masterplan Infrastruktur Jaringan TIK (G)	Menunggu masterplan ducting oleh Dinas Pekerjaan Umum yang terintegrasi dengan jaringan drainase	Koordinasi intensif dengan Dinas Pekerjaan Umum
b	Kompetensi SDM bidang	Seluruh personil SDM Infrastruktur mengikuti	Tersedianya alokasi anggaran	Mengikuti perkembangan

No	Uraian	Keberhasilan/ Kegagalan	Penyebab	Alternati Solusi yg dilakukan/ disarankan
	infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi	pelatihan secara rutin setiap tahun (B)	dan lembaga pelatihan yang kompeten	kemajuan infrastruktur TIK
		Jumlah aparatur yang mempunyai kemampuan dalam infrastruktur jaringan hanya 1 orang (G)	Memperkerjaan tenaga ahli dan tenaga honorer	Menyampaika m usulan penerimaan ASN yang mempunyai kemampuan bidang infrastruktur jaringan TIK
c	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Penggunaan aplikasi sistem informasi meningkatkan kinerja organisasi (B)	Jumlah aplikasi yang terintegrasi semakin banyak	Kebijakan baru terkait aplikasi umum dan khusus harus disikapi dengan cerdas
		Personil yang menguasai pemograman hanya 1 (G)		Menyampaika m usulan poenerimaan ASN yang mempunyai kemampuan bidang infrastruktur jaringan TIK

3. Urusan Statistik

Tabel 3.24. Analisa Keberhasilan dan Kegagalan Urusan Statistik Dalam Proses Pencapaian Kinerja Organisasi Tahun 2021

No.	Uraian	Keberhasilan/ Kegagalan	Penyebab	Alternati Solusi yg dilakukan/ disarankan
1	Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis Dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Koordinasi belum berdampak secara efektif pada pengembangan data statsitik (G)	Koordinasi dilakukan satu arah	Metode dan materi koordinasi disesuaikan dengan situasi atau kondisi yang dihadapi
2	Peningkatan Kapasitas SDM	Pembinaan kepada	Pengelola data statistic	Adanya nomenklatur

No.	Uraian	Keberhasilan/ Kegagalan	Penyebab	Alternati Solusi yg dilakukan/ disarankan
	Statistik	pengelola statistik belum berdampak pada peningkatan kualitas dan kuantitas data statistik (G)	pada perangkat daerah pada umumnya kasubag program & pelaporan, disamping tugas kasubag program dan pelaporan lainnya	jabatan khusus pengelola data
		Terdapat perangkat daerah yang ketersediaan datanya baik yaitu lengkap dan series yaitu Dinas kesehatan, Dinas Kependudukan dan catatan Sipil, Dinsos P2KBP3A, Dinas Tenaga Kerja (B)	Adanya sistem pendataan dan perekaman hasil pendataan yang baik	Bisa menjadi bahan pembelajaran untuk
		Banyak data yang tidak ada/ tidak tersedia pada perangkat daerah (G)	Tidak dilakukannya kegiatan pendataan untuk data-data tertentu, karena bukan merupakan hasil aktivitas rutin/ harian perangkat daerah, karena tidak adanya anggaran untuk pendataan dan perawatan data	Menyusun prioritas data dan prioritas pendataan.
		Tidak semua instansi bersikap kooperatif dan responsive terhadap survey	Survey dianggap sebagai tambahan beban	Memperbaiki metode dan waktu survey

No.	Uraian	Keberhasilan/ Kegagalan	Penyebab	Alternati Solusi yg dilakukan/ disarankan
		(G)	pekerjaan	
		Waktu publikasi data terlalu lama / tidak (G)	Waktu pelaksanaan survei terlambat atau tidak tepat sehingga data yang dihasilkan kurang bermanfaat dari sisi waktu	Memperbaiki metode dan waktu survei

4. Urusan Perpustakaan

Tabel 3.25. Analisa Keberhasilan dan Kegagalan Urusan Perpustakaan Dalam Proses Pencapaian Kinerja Organisasi Tahun 2021

No	Uraian	Keberhasilan/ Kegagalan	Penyebab	Alternati Solusi yg dilakukan/ disarankan
1	Pengelolaan Perpustakaan Umum Kota Cimahi	Kebutuhan masyarakat akan bahan bacaan (B)	Kondisi ekonomi melemah karena pandemi covid-19	Penambahan koleksi bacaan
		Jumlah pengunjung perpustakaan sangat jauh menurun (G)	Terjadi pandemi covid-19	Meningkatkan kinerja e-library
		Jumlah dan kenyamanan pemustaka tidak dapat ditingkatkan (G)	Kapasitas ruang baca maksimal 10 orang	Pembangunan gedung perpustakaan baru sesuai standard 0,008 per kapita
a	Sarana dan prasarana	Dukungan penambahan sarpras dari instansi vertikal (B)	Adanya potensi Bantuan keuangan Provinsi Jawa Barat dan DAK	Meningkatkan koordinasi dan relasi secara lebih efektif dan efisien
		Penambahan atau penggantian sarpras yang sdh tdk layak tdk dapat dilaksanakan (G)	Alokasi anggaran terbatas dan kebijakan TAPD tdk mendukung	Menggunakan dan memelihara sarpras yang ada walaupun kurang layak
		Perpustakaan belum dianggap penting (G)	Kurangnya pemahaman pembuatn keputusan	Memviralkan prestasi dan pentingnya membaca dan perpustakaan
b	Penyediaan bahan pustaka	Daya tampung penambahan buku	Keterbatasan ruang	Optimalisasi dan promosi e-

No	Uraian	Keberhasilan/ Kegagalan	Penyebab	Alternatif Solusi yg dilakukan/ disarankan
		fisik sangat terbatas (G)	penyimpanan buku bahan bacaan	Library
		Koleksi buku bahan bacaan mengikuti perkembangan ilmu dan isu (B)	Komunikasi yg efektif dg penerbit, serta kemampuan dan pengalaman membaca situasi dan kebutuhan masyarakat	Secara aktif mengikuti perkembangan jaman
c	Pengembangan perpustakaan	Dalam masa pandemi banyak layanan yang tidak bisa dilaksanakan antara lain perpustakaan keliling dan perpustakaan keluarahan dan kecamatan tidak difasilitasi operasionalnya (G)	1. Kepatuhan pada protokol kesehatan 2. Keterbatasan anggaran	Mencari alternatif pengembangan layanan
d	Monitoring dan pembinaan	Belum dilakukan monitoring terhadap perpustakaan dan taman bacaan / sudut baca (G)	Belum dimilikinya konsep monitoring perpustakaan dan belum ada data perpustakaan dan taman / sudut baca	Menggunakan data terkait lainnya
e	Peningkatan kualitas SDM	Pengelola perpustakaan sekolah telah mengikuti bimtek pengelolaan perpustakaan (B)	Kerjasama dengan dinas pendidikan	Komunikasi yg efektif dan membangun kerjasama yg baik
2	Pembudayaan gemar membaca	Adanya aktivitas gemar membaca di masyarakat yang rutin (B)	kepedulian komunitas baca	Penghargaan dan dukungan kepada komunitas membaca
		beberapa sekolah bersemangat melaksanakan kegiatan Cimahe reading Habit (B)	Pemahaman yang baik pengelola sekolah tentang pentingnya mendorong gemar membaca	Penghargaan kepada anak-anak yang telah mencapai tingkat bacaan tertentu
		Masih banyak sekolah yang belum mengikuti program CRH (G)	Kurang sosialisasi dan publikasi program CRH	Informasi kepada penyedia
		Siswa sekolah tingkat SMP belum disentuh	Belum ada konsep program gemar membac	Komunikasi dengan stakeholder

No	Uraian	Keberhasilan/ Kegagalan	Penyebab	Alternatif Solusi yg dilakukan/ disarankan
		dengan program yang khusus sesuai dengan karakter dan usia remaja (G)	dan mencari contoh untuk anak usia smp	
		Tidak ada lomba yang unik untuk masyarakat secara umum (G)	Kurangnya kemauan dan kreativitas untuk penyelenggaraan	Pengembangan wawasan dan pendorongan minat dari pengelola kegiatan
a	Sosialisasi Budaya Baca Dan Literasi	Publikasi kegiatan perpustakaan melalui medsos yang intensif (B)	Adanya media sosial yang memudahkan dan memurahkan biaya sosialisasi (B)	Secara rutin mengupload foto2 kegiatan
		Masyarakat masih banyak yang belum mengetahui perpustakaan dan program-programnya (G)	Kurangnya publikasi dan komunikasi kepada masyarakat secara luas	Komunikasi dengan stakeholder melalui forum diskusi secara formal dan non formal
b	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Dorongan dari pusat dan provinsi untuk mengembangkan literasi berbasis inklusi (B)	Program perpustakaan secara nasional	Bermitra dan menyusun program bersama dengan perangkat daerah lain
		Belum dilaksanakan sesuai dengan pedoman (G)	Masih dalam masa pandemi	Pengembangan secara online

5. Urusan Kearsipan

Tabel 3.26. Analisa Keberhasilan dan Kegagalan Urusan Kearsipan Dalam Proses Pencapaian Kinerja Organisasi Tahun 2021

No	Uraian	Keberhasilan/ Kegagalan	Penyebab	Alternatif Solusi yg dilakukan/ disarankan
1	Pengelolaan arsip statis	Pengelolaan arsip statis belum dapat dilakukan oleh Lembaga Kearsipan Daerah Kota Cimahi (G)	Belum dilakukannya penyusutan arsip dinamis pada masing-masing Perangkat Daerah karena JRA masih dalam proses penyusunan	Sosialisasi pedoman JRA dan pendampingan penyusunan daftar arsip yang akan dihapuskan
a	Sarana	LKD tidak bisa	Kurangnya	Jumlah box arsip

No	Uraian	Keberhasilan/ Kegagalan	Penyebab	Alternati Solusi yg dilakukan/ disarankan
	pengolahan dan penyimpanan arsip	menambah sarana dan prasarana (G)	komitmen untuk meningkatkan pengelolaan arsip daerah	dan rak tidak cukup untuk memfasilitasi seluruh kebutuhan pada seluruh perangkat daerah. Pengadaan selanjutnya pada masing-2 perangkat daerah sesuai dengan standard yang ditetapkan
b	Depo Arsip	Belum dimilikinya gudang / depo arsip (G)	Belum adanya lahan untuk pembangunan Depo Arsip	Meningkatkan informasi kepentingan penyediaan Depo Arsip kepada pimpinan
2	Pengelolaan Arsip Dinamis	Telah adanya kesadaran perangkat daerah terhadap pengelolaan arsip inaktif (B)	Adanya pendampingan dan penyampain hasil evaluasi pengelolaan arsip inaktif yang telah difasilitasi	Pemantauan secara berkala terhadap pengolahan arsip inskatif perangkatan daerah (audit LAKI)
		Belum terukurnya pengolahan arsip inaktif yang telah dilakukan perangkat daerah (G)	Sistem informasi arsip dinamis belum digunakan secara efektif	Pemantauan secara berkala terhadap pengolahan arsip inskatif perangkatan daerah (audit LAKI)
		Penataan arsip belum dilakukan untuk seluruh dokumen atau arsip pada seluruh pencipta arsip (G)	Belum adanya kesadaran dan pengetahuan tentang pengelolaan arsip pada seluruh aparatur	Sosialisasi kearsipan secara intensif kepada seluruh ASN
3	Pemberdayaan kapasitas unit kearsipan dan LKD	Pembinaan kearsipan telah dilakukan terhadapmseluruh pengelola arsip Perangkat Daerah dan pelatihan intensif untuk beberapa pengelola arsip daerah (B)	Pembinaan kearsipan diselenggarakan setiap tahun oleh LKD	Evaluasi terhadap pelaksanaan pembinaan kearsipan
		Dampak dan tindak lanjut dari pembinaan dan pelatihan kearsipan belum terlihat nyata (G)	Kurangnya dukungan sumberdaya untuk pengelolaan kearsipan secara menyeluruh sangat kurang	Kampanye pengelolaan kearsipan dan pemberian penghrgaan untuk pengelolaan arsip terbaik
	Pengembangan SDM kearsipan	LKD telah mempunyai Arsiparis (B)	Fasilitasi dari unsur-unsur terkait sangat	Target kinerja Urusan kearsipan di breakdown ke

No	Uraian	Keberhasilan/ Kegagalan	Penyebab	Alternati Solusi yg dilakukan/ disarankan
			baik	dalam rencana kerja arsiparis
		Belum adanya nomenklatur jabatan penata arsip di seluruh perangkat daerah (G)	Urusan kearsipan belum dianggap penting dalam implementasi administrasi pemerintahan	Disediakannya insentif yang dapat merangsang kinerja kearsipan daerah
4	Pemusnahan Arsip	Pemusnahan arsip sesuai dengan peraturan kearsipan belum dilaksanakan pada pencipta arsip dan LKD (G)	Pengelolaan arsip dinamis belum dilakukan secara benar, baik dan menyeluruh	Pendampingan dan sosialisasi secara lebih intensif
5	Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Penggunaan arsip yang bersifat tertutup belum mengacu pada peraturan kearsipan (G)	Belum adanya pemahaman tentang SKKAD	Pendampingan dan sosialisasi secara lebih intensif

6. Urusan Penunjang Pemerintahan

Tabel 3.27 Analisa Keberhasilan dan Kegagalan Kegiatan Kesekretariatan Dalam Proses Pencapaian Kinerja Organisasi Tahun 2021

No.	Uraian	Keberhasilan/ Kegagalan	Penyebab	Alternati Solusi yg dilakukan/ disarankan
1	Penyusunan standar pelayanan operasional dan prosedur PD	Jumlah SOP yang tersusun melampaui target (B)	Kerjasama dengan instansi / lembaga yang tidak hanya fokus kepada uang	Membina hubungan baik dg lembaga yang punya pengabdian yang tinggi kepada masyarakat
		Penghitungan waktu kerja standar tidak dirumuskan berdasarkan pengamatan atau simulasi (G)	Waktu penyusunan kurang panjang	Evaluasi pelaksanaan SOP
2	Penyusunan dokumen perencanaan	Matriks renja dilakukan perubahan terus menerus menyesuaikan dengan jadwal asistensi sehingga	Tidak adanya jadwal dan pembedaan antara perencanaan pembangunan dan penyusunan anggaran	1. adanya siklus jadwal perencanaan pembangunan pada awal tahun 2. adanya siklus jadwal penyusunan anggaran pd awal tahun 3. komitmen terhadap jadwal dan siklus yg

No.	Uraian	Keberhasilan/ Kegagalan	Penyebab	Alternati Solusi yg dilakukan/ disarankan
		dokumen renja tidak jelas kapan selesainya seharusnya (G)	Penggunaan istilah renja untuk matriks rekap penyusunan anggaran tahun (n+1)	telah ditetapkan
		Kebiajakn pemerintah pusat yg terus menerus berdampak pd renstra yg harus menyesuaikan terus menerus (G)	Tidak adanya konsep yg matang	Dokumen Renstra disesuaikan terus menerus
3	Evaluasi Kinerja	Substansi LAKIP merupakan narasi pelaksanaan tupoksi (B)	Data harus lengkap dan riil	Perbaikan mekanisme pengumpulan data kinerja
		Adanya indikator baru dalam LPPD yang datanya harus diupayakan melalui pendataan (G)	i. Kurangnya komunikasi dengan instansi vertikal ii. Tidak disediakannya akses untuk berkomunikasi dengan instansi vertikal	Perbaikan pemahaman pentingnya pengelola perencanaan untuk dapat berkomunikasi dg instansi vertikal
		Capaian progress target menyesuaikan dengan realisasi keuangan (G)	Kurangnya perhatian dan pemahaman tentang tupoksi dan indikator kinerja	Senantiasa belajar dalam bekerja
4	Penyusunan laporan keuangan	Penyerapan anggaran tidak sesuai dengan prediksi anggaran kas (G)	Perhitungan kurang cermat	Antisipasi tidak tercapainya target kinerja karena kekurangtepatan perkiraan penyerapan anggaran
	Tertib administrasi keuangan	pertanggung jawaban sesuai aturan (B)	Verifikasi yang cermat	Peningkatan pengetahuan tentang administrasi keuangan
5	Administrasi Umum	Perencanaan kebutuhan ATK sering diabaikan	Kurangnya pemahaman terhadap	Pengelolaan berdasarkan selera

No.	Uraian	Keberhasilan/ Kegagalan	Penyebab	Alternati Solusi yg dilakukan/ disarankan
		(G)	perencanaan stok dan flow	dan insting
	Jasa komunikasi, listrik dan air	Komunikasi dinas cenderung menggunakan alat pribadi (G)	Kemudahan peralatan berbasis IT	Mencari terobosan baru
	Pengadaan dan pemeliharaan meubeleur kantor	Penambahan jumlah kursi rapat melalui perbaikan kursi yg rusak (B)	Adanhya kebutuhan anggaran yg lebih prioritas	Pemeliharaan mebeleur yang ada
	gudang kantor	Barang-barang yang sudah tidak bias dimanfaat disimpan menumpuk di Gudang kantor	Belum bisa dihapuskan	Koordinasi dengan bidang Aset
	Penataan arsip daerah diskominfoarpus	Pengelolaan arsip dinamis tidak sesuai stndar (G)	Diserahkan kepada anak PKL untuk surat masuk dan keluar	Perbaikan kinerja
	Penyediaan makanan dan minuman	Fasilitasi makanan minuman untuk rapat terpenuhi (B)	ketersediaan anggaran yang memadai	Manajemen alokasi sumberdaya makanan minuman
6	Pembinaan Pegawai	Tidak ada anggaran untuk pelatihan dan bimtek (G)	Tidak menjadi prioritas anggaran	Koordinasi terkait kebutuhan peningkatan kapasitas SDM

3.1.6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/kegiatan terdiri atas dua yaitu efisiensi sumber daya biaya dan sumber daya manusia. Persentase efisiensi sumber daya biaya dapat dihitung dengan rumus :

$$\text{Persentase efisiensi Biaya} = 100 \% - \left[\frac{\text{Realisasi Biaya}}{\text{Target Biaya}} \times 100 \% \right]$$

$$= 100 \% - (17.244.672.161 / 18.980.171.637 \times 100\%)$$

$$= 9,14 \%$$

Pada tahun 2021 realisasi biaya untuk keseluruhan adalah Rp. 17.244.672.161 sedangkan target biaya untuk semua program yaitu Rp. 18.980.171.637. Dengan rumus efisiensi diatas, diperoleh persentase efisiensi biaya pada level program adalah 9,14 %. Persentase efisiensi ini tersebut cukup baik, sehingga dapat diasumsikan bahwa pada tahun 2021 secara umum terdapat efisiensi dari penggunaan sumber daya biaya meskipun tidak besar.

3.1.7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Analisa program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran strategis adalah :

a. Program Pembinaan Perpustakaan.

Minat masyarakat untuk mengunjungi Perpustakaan Umum Kota Cimahi cukup tinggi namun karena masih dalam masa pandemi maka jumlah kunjungan dibatasi dan pelayanan menggunakan sistem tertutup. Fokus utama pembinaan dan pelayanan perpustakaan adalah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi yaitu melalui fasilitas pertemuan virtual dan e-library.

b. Program Pengelolaan Kearsipan

LAKE merupakan indikator komposit yang membutuhkan kerjasama yang baik antara Lembaga Kearsipan Daerah dan Perangkat Daerah. Penurunan nilai LAKE Kota Cimahi dan adanya indikator baru dalam perhitungan nilai LAKE harus ditindaklanjuti dengan peningkatan pengelolaan arsip dinamis pada Perangkat Daerah Kota Cimahi, pelaksanaan pengelolaan arsip statis, peningkatan kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah, penyusutan arsip, penyediaan daftar arsip yang bersifat tertutup, penggunaan instrument penyelenggaraan akearsipan, persiapan pemanfaat aplikasi SRIKANDI.

c. Program Aplikasi Informatika

Pada kurun waktu saat ini, teknologi informasi dan komunikasi menjadi basis bagi peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan, sehingga peningkatan pengetahuan dan ketrampilan dalam bidang TIK, penyediaan infrastruktur dan aplikasi TIK menjadi kebutuhan dasar bagi peningkatan kinerja pemerintahan.

Layanan jaringan sudah dilakukan meliputi seluruh wilayah Kota Cimahi baik menggunakan jaringan *fiber optic* maupun saluran VPN untuk seluruh

Perangkat Daerah. Integrasi sistem informasi dilakukan sejauh aplikasinya memenuhi syarat untuk bisa dilakukan integrasi. Pendampingan kepada masyarakat dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dilakukan sebagai bagian dari tanggung jawab literasi TIK.

- d. Program pengembangan data/informasi/statistik daerah

Kurangnya sumber daya manusia menjadi kendala yang signifikan. Satu Data Kota Cimahi disajikan melalui aplikasi opendata.cimahikota.go.id. Jumlah Perangkat Daerah yang datanya disajikan pada OPEN DATA meningkat cukup pesat.
- e. Program Peyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

Dengan kondisi keterbatasan sarana prasarana, sumberdaya manusia serta anggaran, beberapa layanan persandian dapat dilakukan. Jumlah perangkat daerah yang mengajukan layanan sertifikasi elektronik pada tahun 2020 sebanyak 3 menunjukkan semakin meningkatkan pemahaman tentang pentingnya sertifikasi elektornik. Untuk layanan jamming, Pemerintah Kota Cimahi mendapatkan bantuan pinjaman peralatan dari Jammer dari BSSN. Jumlah layanan jamming masih sedikit karena kebutuhan perangkat daerah untuk jamming memang masih rendah. Sedangkan monitoring menara telekomunikasi atau BTS terdapat kendala adanya keraguan bahwa monitoring BTS bukan merupakan tupoksi Diskominfoarpus.

3.3. Realisasi Anggaran

Pagu anggaran Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan dan Perpustakaan Kota Cimahi Tahun 2021 sebesar Rp.18.908.171.673. Realisasi Anggaran pada tahun 2021 sebesar Rp.17.244.672.161 atau mencapai 91,20 % dengan sisa anggaran sebesar Rp.1.735.499.476. Realisasi anggaran untuk setiap kegiatan, sebagai berikut :

Tabel 3.28. Realisasi Anggaran Dinas Komunikasi Informatika Kearsipan dan Perpustakaan Kota Cimahi Tahun 2021

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN / TPA
1	2	3	4	5
1	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	7.036.766.600	6.070.058.257	86,26%
	Kegiatan Pengelolaan Nama Domain Yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat Dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.433.895.500	1.422.705.661	99,22%

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN / TPA
1	2	3	4	5
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	1.433.895.500	1.422.705.661	99,22%
	Kegiatan Pengelolaan E-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	5.602.871.100	4.647.352.596	82,95%
	Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	5.166.048.000	4.406.224.211	85,29%
	Sub Kegiatan Penyelenggaran Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	214.543.000	208.403.485	97,14%
	Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	222.280.100	32.724.900	14,72%
2	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	2.512.031.800	2.148.646.459	85,53%
	Kegiatan Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.512.031.800	2.148.646.459	85,53%
	Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik	140.700.000	128.729.341	91,49%
	Sub Kegiatan Layanan Hubungan Media	2.161.845.200	1.833.448.771	84,81%
	Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	209.486.600	186.468.347	89,01%
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	8.357.436.237	8.193.767.017	98,04%
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.020.000	15.010.000	99,93%
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.020.000	5.020.000	100,00%
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.000.000	9.990.000	99,90%
	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	23.012.000	21.336.290	92,72%
	Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	23.012.000	21.336.290	92,72%
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	294.680.420	292.410.376	99,23%
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	29.298.200	29.284.600	99,95%
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.638.500	12.632.700	99,95%
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	91.503.720	89.588.523	97,91%
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	161.240.000	160.904.553	99,79%
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90.038.100	82.536.997	91,67%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	39.430.000	35.536.447	90,13%

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN / TPA
1	2	3	4	5
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.600.000	2.938.380	81,62%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	47.008.100	44.062.170	93,73%
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	144.869.100	140.340.500	96,87%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	65.739.100	61.435.000	93,45%
	Sub Kegiatan Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	45.630.000	45.405.500	99,51%
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	33.500.000	33.500.000	100,00%
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.800.000	2.800.000	100,00%
	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	2.800.000	2.800.000	100,00%
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.787.016.617	7.639.332.854	98,10%
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.735.966.617	7.592.535.884	98,15%
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	51.050.000	46.796.970	91,67%
4	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	258.061.400	230.043.194	89,14%
	Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral Di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	258.061.400	230.043.194	89,14%
	Sub Kegiatan Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis Dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	258.061.400	230.043.194	89,14%
5	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	100.438.200	89.159.550	88,77%
	Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	42.138.200	33.633.250	79,82%
	Sub Kegiatan Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	42.138.200	33.633.250	79,82%
	Kegiatan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	58.300.000	55.526.300	95,24%
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Analisis Kebutuhan Dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	30.800.000	28.207.250	91,58%

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN / TPA
1	2	3	4	5
	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	27.500.000	27.319.050	99,34%
6	Program Pembinaan Perpustakaan	373.467.800	359.925.860	96,37%
	Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	323.836.800	311.744.860	96,27%
	Sub Kegiatan Pembinaan Perpustakaan Pada Satuan Pendidikan Dasar Di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Dengan Standar Nasional Perpustakaan	10.600.000	9.200.000	86,79%
	Sub Kegiatan Pengembangan Perpustakaan Di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	312.736.800	302.544.860	96,74%
	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan Dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	500.000	0	0%
	Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	49.631.000	48.181.000	97,08%
	Sub Kegiatan Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	31.431.000	31.431.000	100,00%
	Sub Kegiatan Sosialisasi Budaya Baca Dan Literasi Pada Satuan Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Khusus Serta Masyarakat	18.200.000	16.750.000	92,03%
7	Program Pengelolaan Arsip	312.869.600	142.731.824	45,62%
	Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	11.946.400	5.696.000	47,68%
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Dan Penyusutan Arsip Dinamis	11.946.400	5.696.000	47,68%
	Kegiatan Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	291.625.000	127.901.124	43,86%
	Sub Kegiatan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, Dan Akses Arsip Statis	291.625.000	127.901.124	43,86%
	Kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	9.298.200	9.134.700	98,24%
	Sub Kegiatan Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	9.298.200	9.134.700	98,24%
8	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	19.400.000	6.840.000	35,26%
	Kegiatan Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	19.400.000	6.840.000	35,26%
	Sub Kegiatan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	19.400.000	6.840.000	35,26%
9	Program Perizinan Penggunaan Arsip	9.700.000	3.500.000	36,08%

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN / TPA
1	2	3	4	5
	Kegiatan Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	9.700.000	3.500.000	36,08%
	Sub Kegiatan Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	9.700.000	3.500.000	36,08%
JUMLAH		18.980.171.637	17.244.672.161	91,77%

Ditinjau dari tingkat penyerapan anggaran, dari 37 sub kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan dan Perpustakaan Kota Cimahi pada tahun 2021 tingkat penyerapan anggaran (TPA) sebagai berikut :

- a. TPA 90% - 100% : 26 sub kegiatan atau 70,27%
- b. TPA 80% - 89% : 4 sub kegiatan atau 10,81%
- c. TPA 70% -79% : 1 sub kegiatan atau 2,70%
- d. TPA 40% - 49% : 2 sub kegiatan atau 5,41%
- e. TPA 30% - 39% : 2 sub kegiatan atau 5,41%
- f. TPA 10% -19% : 1 sub kegiatan atau 2,70%
- g. TPA 0% : 1 sub kegiatan atau 2,74%

Tingkat penyerapan anggaran sub kegiatan di atas 70% sebanyak 83,78%. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan anggaran dilakukan dengan baik. Adapun sub kegiatan dengan tingkat penyerapan anggaran sangat rendah atau kurang dari 50% sebanyak 16,22% menunjukkan bahwa terdapat hal-hal krusial yang harus diperhatikan secara seksama. Sub kegiatan/kegiatan/program yang TPA nya kurang dari 50%, sebagai berikut :

1. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota capaian realisasi anggaran atau TPA nya 0%. Sub kegiatan ini semula direncanakan menyelenggarakan pembinaan bagi pengelola perpustakaan sekolah di Kota Cimahi secara tatap muka pada bulan Agustus 2021, namun hal tersebut tidak memungkinkan untuk dilaksanakan karena kondisi pandemi covid-19 varian delta pada bulan Juni-Agustus 2021 sangat tinggi dan letal/mematikan serta banyak pegawai mengalami serangan virus covid-19 sehingga aktivitas kantor dilakukan dari rumah atau *work from home* sampai dengan awal bulan November 2021. Selanjutnya pembinaan dilakukan secara daring melalui aplikasi zoom sehingga anggaran tidak dilakukan penyerapan.
2. Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/ Kota Cerdas capaian realisasi anggarannya sebesar 14,72%. Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp.222.280.100,00 semula direncanakan untuk pelaksanaan evaluasi Kota Cerdas, Cimahi Smart City dan penyusunan

dokumen Arsitektur SPBE. Karena tingkat urgensinya sangat tinggi, anggaran terkait penyusunan dokumen Arsitektur SPBE dialokasikan pada masa APBD Perubahan Kota Cimahi Tahun 2021 sebesar Rp.184.200.000,00 atau sebesar 83,36% dari pagu anggaran sub kegiatan ini, terdiri dari :

- 1) belanja cetak Arsitektur dan Peta Jalan Rencana SPBE sebesar Rp.3.500.000,00
- 2) belanja Honorarium Narasumber atau pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia sebesar Rp.11.800.000,00
- 3) belanja Jasa Konsultansi sebesar Rp.170.000.000,-

Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, untuk penyusunan dokumen Arsitektur SPBE, metode pengadaan jasa konsultansi semula direncanakan secara swakelola tipe III dengan bekerjasama dengan perguruan tinggi swasta yang kedudukannya disetarakan dengan organisasi kemasyarakatan.

Ditinjau dari aspek waktu pelaksanaan pengadaan barang/Jasa, telah difahami bahwa pelaksanaan pengadaan pada masa APBD perubahan sangatlah terbatas karena seringkali terjadi untuk sampai pada saat penetapan APBD Perubahan membutuhkan proses dan waktu yang sangat panjang sehingga waktu pelaksanaan pekerjaan pun sangat terbatas pula. Mengingat keterbatasan waktu tersebut, direncanakan bahwa proses pengadaan akan dimulai sebelum penetapan APBD Perubahan dan pelaksanaan pekerjaan akan dimulai setelah penetapan APBD Perubahan. Namun kemudian pada tanggal 31 Mei 2021 terdapat penetapan baru Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia yang mencabut Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 2018, antara lain bahwa persiapan pengadaan baru dapat dimulai setelah penetapan APBD, sehingga rencana semula untuk melakukan proses pengadaan sebelum penetapan APBD tidak bisa dilaksanakan.

APBD Perubahan Kota Cimahi Tahun 2021 ditetapkan pada tanggal 29 Oktober 2021, sehingga proses pengadaan jasa konsultansi untuk penyusunan dokumen Arsitektur APBE Kota Cimahi Tahun 2021 baru dimulai tanggal 1 November 2021. Pada saat proses pengadaan kemudian terdapat situasi bahwa penyedia tidak dapat memenuhi persyaratan sehingga proses pengadaan tidak dilanjutkan. Selanjutnya dengan waktu yang semakin sempit, direncanakan akan melakukan penggantian penyedia perguruan tinggi swasta lainnya. Namun kemudian setelah diperhatikan lagi disadari

bahwa terdapat kesalahan dalam DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) yaitu terdapat ketidaksesuaian kode rekening dengan substandi dan jenis jasa konsultansinya. Kode rekening yang seharusnya untuk belanja penyusunan arsitektur SPBE dengan spesifikasi konsultasi perencanaan, ternyata tercantum dalam kode rekening 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultasi Konstruksi, kode rekening 5.1.02.02.08.0013 Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya. Oleh karena itu proses pengadaan tidak dapat dilanjutkan, rencana pekerjaan tidak dapat dilaksanakan, dan anggaran tidak dapat dilakukan penyerapan.

3. Total anggaran urusan Kearsipan sebesar Rp.341.969.000 dan realisasi anggaran sebesar Rp.153071.824,00 atau sebesar 44,76%. Terdiri dari 3 program, 5 kegiatan/sub kegiatan, capaian realisasi anggaran semuanya dibawah 50%.

Pada Program Pengelolaan Arsip, capain realisasi anggaran sebesar 45,62%. Dari 3 kegiatan/sub kegiatan terdapat 2 kegiatan/sub kegiatan yang realisasi anggarannya di bawah 50% yaitu sub kegiatan Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip dinamis sebesar 47,68% dan sub kegiatan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis sebesar 43,86%.

Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip capaian sebesar 35,26% dan program Perizinan Penggunaan Arsip capainnya 36,08%.

Capaian realisasi anggaran sebesar Dari anggaran yang tidak terserap dilakukan analisa sebagai berikut :

- 1) Honorarium Narasumber : Anggaran honorarium narasumber sebesar 49.500.000 atau 14,47% dari keseluruhan pagu anggaran. Realisasi anggaran narasumber sebesar Rp.30.200.000,00 atau 61,01 % dari pagu anggaran. Berdasarkan informasi ini bahwasanya penyebab tidak terserapnya anggaran adalah perencanaan anggaran tidak dilakukan dengan baik.
- 2) Terdapat 1 orang tenaga layanan umum pada bidang arsip. Biaya Jasa Tenaga Pelayanan Umum sebesar Rp.35.000.000 atau 10,26% dari total pagu anggaran. Anggaran yang tidak terserap sebesar Rp.5.940.000,00 atau 16,92% dari pagu Jasa Tenaga Pelayanan Umum. Hal ini terjadi karena pada saat penyusunan anggaran, jumlah orang/hari terlalu banyak kurang jumlah libur.
- 3) Layanan Jasa Khusus : pagu anggaran sebanyak Rp.150.000,00. Semula direncanakan pagu anggaran tersebut akan digunakan untuk pencetakan buku Penelusuran Arsip Bersejarah Sekda yang disusun pada Tahun 2021. Karena pagu anggaran jasa khusus sebesar 63,13% dari total

anggaran maka dampaknya sangat besar terhadap capaian realisasi anggara urusan kearsipan. Alokasi anggaran Jasa Khusus ini dilakukan pada APBD Perubahan Kota Cimahi Tahun 2021 sehingga dengan jumlah anggaran yang besar untuk pelaksanaannya membutuhkan kemampuan perencanaan dan perhitungan waktu yang baik.

Berdasarkan analisa tersebut di atas, dapat dirumuskan bahwa perencanaan dan penyusunan anggaran dalam urusan kearsipan tidak dilakukan dengan baik sebagai dampak dari kurangnya kemampuan SDM.

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan dan Perpustakaan Kota Cimahi Tahun 2021 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kendala dalam mencapai sasaran strategis yang tercermin pada capaian indikator kinerja.

Secara umum capaian sasaran strategis menunjukkan perkembangan yang signifikan, meskipun terdapat capaian kinerja yang belum sesuai dengan target. Secara internal hal ini disebabkan oleh masih kurangnya kapasitas SDM dan kemampuan dalam perencanaan dan pelaksanaan. Sedangkan secara eksternal hal tersebut disebabkan oleh kurangnya komitmen dan kerjasama dari perangkat daerah lainnyadan masyarakat.

Pada tanggal 31 Desember 2021 Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan dan Perpustakaan Kota Cimahi dipecah menjadi dua dinas yaitu Dinas Arsip Daerah, serta Dinas Komunikasi dan Informatika. Kendala dan permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya indikator sasaran pada tahun 2021 akan menjadi fokus perbaikan kinerja pada masing-masing dinas di tahun mendatang baik secara eksternal maupun internal. Secara internal peningkatan kualitas dan kapasitas sumberdaya dan proses, sedangkan secara eksternal adalah melalui upaya peningkatan koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi di pusat, provinsi maupun perangkat daerah di Kota Cimahi, mengingat target indikator hanya dapat dicapai dengan membutuhkan dukungan dari pemerintah pusat dan provinsi dan melibatkan perangkat daerah Kota Cimahi yang terkait.